

**PENOLAKAN WARGA KAMPUNG PULO TERHADAP PROGRAM
RELOKASI PEMPROV DKI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama
Sosiologi Pembangunan**

Disusun Oleh :

Taufik Alhakim

Nim : 135120107111033



JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program Relokasi Pemprov DKI
(Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur)

Disusun Oleh :
Taufik Alhakim
135120107111033

Telah diuji dan dinyatakan lulus sarjana pada sidang ujian skripsi :
Jumat, 6 Oktober 2017

Tim Penguji :

Pembimbing Utama



Dhanny S Sutopo, S.Sos., M.Si
NIK. 200906 730915 1 001

Pembimbing Pendamping



Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc
NIK. 201304 80909 1 001

Anggota Penguji I



Ucca Arawindha, S.Sos., MA
NIK. 20130687 1118 2 001

Anggota Penguji II



Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si
NIK. 20160790 0404 2 001

Malang,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, AK
NIP. 19690814 199402 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

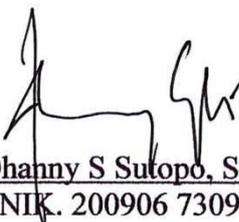
Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program Relokasi Pemprov DKI
(Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur)

Disusun Oleh :

Taufik Alhakim
135120107111033

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk diujikan :

Pembimbing Utama


Dhanny S Sutopo, S.Sos., M.Si
NIK. 200906 730915 1 001

Pembimbing Pendamping


Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc
NIK. 20130486 0909 1 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Alhakim

NIM : 135120107111033

Dengan ini menyatakan, laporan akhir untuk memenuhi persyaratan gelar kesarjanaan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya dengan judul : “PENOLAKAN WARGA KAMPUNG PULO TERHADAP PROGRAM RELOKASI PEMPROV DKI (KAMPUNG PULO, KELURAHAN KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR)” adalah benar-benar karya saya sendiri.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia diberi sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar kesarjanaan Sosiologi.

Malang, 6 Oktober 2017
Yang Menyatakan,



Taufik Alhakim
135120107111033

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama untuk Allah SWT karena atas rahmat dan izin Allah, saya bisa menyelesaikan kuliah ini dan menjadi seorang sarjana.

Kedua untuk Papa dan Mama yang selalu mendoakan tiada hentinya saat saya jauh dari rumah, yang selalu support dan selalu memberikan yang terbaik sehingga saya bisa menjadi seorang sarjana. Karena tanpa Papa dan Mama saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini.

Ketiga untuk almarhum Oma saya, karena atas doa dan dukungan beliau juga saya bisa menjadi seorang sarjana.

Keempat untuk adik saya Akmal, yang sudah mendoakan dan support saya.

Terimakasih udah jagain Papa dan Mama waktu saya sekolah dan jauh dari rumah.

Kelima untuk Eci, yang setia nemenin dan mendengarkan keluh kesah saya, selalu support yang terbaik untuk saya dan juga selalu mendoakan saya.

Keenam untuk Om saya, Om Edi Sekeluarga. Karena atas jasa om Edi juga saya dapat kuliah disini dan menjadi seorang sarjana.

Ketujuh untuk Tante Ade dan Nai, yang sudah mendoakan dan support saya sehingga saya bisa menjadi seorang sarjana.

Dan terakhir untuk teman-teman yang sudah support saya dan mengajarkan arti kehidupan selama saya berada di Malang (Mas Doni, Mas Brian, Dani, Mas Bas & Wahyu). Semoga kalian semua juga akan sukses.

ABSTRAK**“PENOLAKAN WARGA KAMPUNG PULO TERHADAP PROGRAM
RELOKASI PEMPROV DKI”**

Penelitian pada relokasi Kampung Pulo ini didasari pada penolakan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Relokasi yang dilakukan Pemprov DKI bertujuan untuk memecahkan masalah sosial yang selama ini ada di Kampung Pulo. Namun, program relokasi ini tidak kunjung selesai sejak pertama kalinya kebijakan relokasi ini dikeluarkan pada tahun 2014 sampai dengan saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah, memahami tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI. Peneliti menggunakan perspektif teori Tindakan Rasional James Coleman untuk memahami tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan warga Kampung Pulo sebagai aktor yang menolak direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat dikarenakan faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor hukum yang menjadi alasan utama warga dalam menolak relokasi. Dalam penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo, warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan efektif untuk mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat.

Tindakan efektif yang dilakukan oleh para aktor dilakukan dengan cara : Bertahan di Kampung Pulo, aksi protes ke kantor Kecamatan, aksi demo, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciliwung Merdeka sebagai aktor korporat, serta menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Tindakan efektif yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo ini merupakan bentuk dari tindakan dalam mencapai tujuan dan kepentingan aktor dari pilihan menolak program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Dimana tujuan yang ingin dicapai oleh aktor dari penolakan terhadap program relokasi ini adalah, tujuan ekonomi dan sosial.

Kata Kunci : Kampung Pulo, Penolakan, Relokasi, Rasionalitas

ABSTRACT

The research on the relocation of Kampung Pulo is based on the rejection by the villagers of Pulo towards the relocation program to the Flats West Jatinegara proclaimed by the Provincial Government of DKI. The relocation done by Jakarta Provincial Government aims to solve the social problems that existed in Kampung Pulo. However, this relocation program has not been completed since the first time this relocation policy was issued in 2014 until now.

This research uses qualitative research method, with case study approach. The purpose of this study is to understand the act of rejection by residents of Kampung Pulo against the relocation program launched by the towers to the city government. Researchers use Rational action theory perspective James Coleman for m emahami action the refusal to residents of Kampung Pulo against the relocation program launched by the towers to the city government.

The results of this study indicate that the reason residents of Kampung Pulo as an actor who refused to be relocated to Flats West Jatinegara due to economic factors, social factors and legal factors are the main reason the people in resisting relocation. In the rejection by Pulo villagers, Pulo villagers as actors took effective action to achieve the objective of the rejection of the relocation program to the Flats West Jatinegara.

Effective action taken by the actors is done by: Surviving in Kampung Pulo, protest to the district office, demonstrations, in collaboration with the Governmental Organization (NGO) Ciliwung Merdeka as corporate actors, and sued the city government to the State Administrative Court (PTUN) East Jakarta. Effective action taken by the residents of Pulo villagers this is the form of action in achieving the goals and interests of the actor refused a relocation program to Flats West Jatinegara initiated by the city government. Where the objectives to be achieved by the actors from the rejection of this relocation program are the economic and social objectives.

Keywords: Pulo village, Rejection , Relocation , Rationality

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, meridhoi perjalanan penulis sampai tahap akhir untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul : Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program Relokasi Pemprov DKI(Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur) antara lain sebagai berikut :

1. ALLAH SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua yang selalau bersedia untuk mendoakan dan memberi semangat demi terselesaikannya laporan tugas akhir ini;
3. Bapak Dhanny S Sutopo, S.Sos., M.Si dan Bapak Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc selaku Dosen pembimbing penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, dorongan, semangat, serta ilmu yang luar biasa kepada penulis agar tercapai laporan tugas akhir yang baik;
4. Dosen penguji Ibu Ucca Arawindha,S.Sos., MA dan Ibu Wida Ayu Puspitosari,S.Sos., M.Si yang sudah berkenan untuk menjadi Dosen penguji penulis dan memberikan saran yang sangat membantu dalam penelitian ini, sehingga laporan tugas akhir ini dapat selesai dengan baik;
5. Ibu Anif Fatma Chawa M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya Malang;

6. Seluruh Dosen pengajar jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya Malang yang telah membimbing dalam pembelajaran khususnya secara akademik mulai awal hingga akhir;

7. Seluruh informan warga Kampung Pulo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;

8. Seluruh teman-teman Sosiologi Angkatan 2013 Universitas Brawijaya Malang;

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan, dukungan dan dorongannya.

Penulis juga menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi substansi maupun teknis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan terbuka agar laporan tugas akhir ini dapat lebih bermanfaat. Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya.

Malang, 6 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 Pilihan Rasional Menurut Coleman	17
2.3 Definisi Konsep	28
2.3.1 Permukiman Kampung Kota.....	28
2.3.2 Relokasi Permukiman	29
2.3.3 Rumah Susun	31
2.3.4 Massa Apung.....	32
2.4 Kerangka Berfikir	35



BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian	42
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Penentuan Informan.....	46
3.7 Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	51
4.1 Gambaran Permasalahan Relokasi	51
4.2 Gambaran Umum Permukiman Kampung Kota	57
4.3 Gambaran Umum Kampung Pulo	59
4.3.1 Sejarah Kampung Pulo	67
4.4 Kondisi Ekologis Kampung Pulo	69
4.5 Kondisi Sosial dan Kependudukan Kampung Pulo.....	72
4.6 Profil Informan	78
BAB V PEMBAHASAN	87
5.1 Aktor, Sumber Daya dan Tujuan Menolak Relokasi.....	87
5.1.1 Modal Sosial	108
5.2 Tindakan dan Perilaku Kolektif Aktor	112
5.2.1 Norma.....	118
5.2.2 Aktor Korporat.....	123
5.3 Proposisi Akhir Penelitian.....	133
BAB VI PENUTUP	135
6.1 Kesimpulan.....	135
6.2 Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	143



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 14
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian..... 47
Tabel 3. Pembagian Jumlah RT Dan RW 63
Tabel 4. Keterangan Status Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Di Kampung Pulo
..... 64
Tabel 5. Jenjang Pendidikan Warga Kampung Pulo..... 75
Tabel 6. Jenis Pekerjaan Warga Kampung Pulo 76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta pembagian wilayah administratif di Kelurahan Kampung Melayu	61
Gambar 2 : Peta Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah(RTRW) DKI Jakarta	62
Gambar 3 : Kawasan Pusat Usaha Jatinegara	66
Gambar 4 : Terminal Kampung Melayu	67
Gambar 5 : Permukiman Kampung Pulo Yang Berbatasan Langsung Dengan Kali Ciliwung	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Guide Interview 143
Lampiran 2. Reduksi Data Penelitian/ Koding 146
Lampiran 3. Data Warga Kampung Pulo 147



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia yang cenderung bersifat sentralistik, serta laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan semakin kompetitif. Sehingga menyebabkan kota menjadi daya tarik migrasi kota dan menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota.

Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan umumnya berasal dari migrasi kota, seperti kota Jakarta yang merupakan kota dengan tingkat migrasi kota yang paling tinggi dibandingkan kota yang lainnya, dengan persentase 100,0% yang merupakan angka migrasi kota tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya yang ada di Indonesia (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014).

Namun tingginya angka migrasi kota ini tidak diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota Jakarta, sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman Kampung Kota.

Permukiman Kampung Kota merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di Jakarta. Terbentuknya permukiman Kampung Kota, yang sering disebut sebagai *slum area* juga sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Salah satu permukiman Kampung Kota di Jakarta yang terkenal adalah Kampung Pulo, yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang sudah ada sejak tahun 1930. Mayoritas kampung ini dihuni oleh etnis Betawi dan sejak tahun 1970-an banyak warga pendatang dari

daerah Bogor, yang berasal dari etnis Tionghoa, juga warga keturunan Arab, Padang, dan Batak (Data Lembaga swadaya masyarakat Ciliwung Merdeka, 2015). Keberadaan Kampung Pulo yang semakin bertambah jumlah penduduknya, yaitu 12.828 warga yang terdiri dari 3096 kepala keluarga menyebabkan wilayah Kampung Pulo semakin padat (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Dengan wilayah yang semakin padat dan letak Kampung Pulo yang berada tepat di bantaran Kali Ciliwung, menyebabkan penyempitan pada luas Kali Ciliwung yang melintasi wilayah Kampung Pulo. Sehingga menyebabkan debit air yang mengalir setiap kali hujan turun tertahan di wilayah Kampung Pulo dan menyebabkan debit air yang mengalir di Kali Ciliwung dari kiriman pintu air Katulampa Bogor tertahan ketika melintasi wilayah Kampung Pulo dan menyebabkan kampung ini selalu kebanjiran.

Permukiman Kampung Pulo yang termasuk dalam wilayah Kelurahan kampung Melayu termasuk salah satu daerah yang mengalami kerugian paling besar akibat banjir. Berdasarkan data yang didapat, banjir Kampung Melayu pada saat banjir besar tahun 2007, telah menimbulkan korban hingga mencapai 1.980 Kepala keluarga yang terdiri dari 6.740 jiwa. Bahkan banjir yang terjadi di Kampung Pulo yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Kampung Melayu merupakan banjir yang tertinggi di wilayah administrasi Jakarta Timur dengan ketinggian debit air yang mencapai 6 meter (Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, 2007). Bukan hanya berdampak pada bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, dampak bagi warga Kampung Pulo itu sendiri juga menjadi masalah sosial karena menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan rendahnya kualitas lingkungan Kampung Pulo. Dapat dilihat dari

data yang menunjukkan jumlah warga yang terkena berbagai penyakit terutama penyakit ISPA dan Diare, pasca banjir melanda Kampung Pulo, dimana data tersebut menunjukkan bahwa, 5055 warga atau sekitar 39,40% warga Kampung Pulo telah mendatangi puskesmas di Kampung Pulo dengan berbagai macam keluhan penyakit pasca banjir melanda Kampung Pulo pada tahun 2015 lalu (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat. Seperti Rusun Jatinegara Barat yang telah selesai pembangunannya dan telah ditempati oleh 3 RW dari jumlah total 9 RW yang ada di Kampung Pulo atau sekitar 2184 warga Kampung Pulo yang sebelumnya sudah direlokasi.

Pemprov DKI juga beralasan relokasi Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana Pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung. Rencana normalisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo, demi mewujudkan Jakarta yang bersih dari permukiman Kampung Kota dan bebas banjir (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2014). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 pasal 3 tentang rumah susun, menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya peningkatan kualitas hidup penghuni rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan

serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Perumahan Nasional, 2011).

Namun permasalahannya, relokasi yang dilakukan Pemprov DKI dalam upayanya mewujudkan tujuan yang ada dalam Perda dan memecahkan masalah sosial yang selama ini ada di Kampung Pulo, sulit sekali terwujud. Dikarenakan adanya penolakan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Penolakan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, yaitu sejak pertama kalinya kebijakan relokasi ini dikeluarkan pada tahun 2014 sampai dengan saat ini. Warga Kampung Pulo menolak dipindah ke Rusun Jatinegara Barat dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dengan alasan bahwa pindah dari Kampung Pulo tidak semudah memindahkan fisik, melainkan juga karena kehidupan sosial dan ekonomi mereka sudah melekat sejak lama di Kampung Pulo. Penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo juga mengakibatkan terjadinya keributan antara warga Kampung Pulo dengan aparat penegak hukum setiap kali pengusuran akan dilakukan, dan penolakan ini mengakibatkan relokasi tidak pernah selesai sampai dengan saat ini.

Dalam permasalahan ini, peneliti tertarik dengan masalah ini karena permasalahan relokasi ini tidak pernah selesai dari tahun ke tahun dan bahkan sampai dengan hari ini. Padahal jika dilihat dari program Pemprov DKI yang berupaya untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun yang layak huni, sehat, dan fasilitas rumah tangga yang lengkap, relokasi ini justru menguntungkan warga Kampung Pulo itu sendiri. Karena dengan rumah susun yang layak huni dan tidak berada di bantaran kali, mereka akan terbebas dari

banjir yang setiap kali hujan turun menghampiri rumah mereka, dan dapat meningkatkan kesehatan serta kualitas lingkungan mereka. Namun warga Kampung Pulo lebih memilih untuk bertahan dan menolak untuk direlokasi. Jika dilihat dari proposisi awal dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial. Dan tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan solidaritas antar warga Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi. Dari penjelasan di atas, menarik untuk diteliti secara lebih mendalam bagaimana tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI.

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam sebuah kota yang sedang mengencarkan pembangunan dan memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal warganya, khususnya yang tinggal di permukiman Kampung Kota dengan kondisi yang buruk menjadi salah satu penghambat perkembangan kota tersebut seperti yang terjadi Kampung Pulo, Disini Pemprov DKI yang sedang gencar melaksanakan pembangunan di Jakarta, berupaya untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke tempat tinggal yang lebih layak, yaitu ke Rusun Jatinegara. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk merelokasi warga Kampung Pulo, dari tahun ke tahun tidak pernah berhasil. Dan selalu mendapatkan penolakan warga Kampung Pulo. Oleh karena itu yang menjadi rumusan dari penelitian ini, adalah :

“Bagaimana tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap penolakan program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI.
2. Mengetahui tujuan dan dasar penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar nantinya dapat memberi masukan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi masalah program relokasi di Kampung Pulo.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama Sosiologi, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan akan program relokasi.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya terutama tentang program relokasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, dengan temuan baru atau teori-teori dari hasil penelitian sebelumnya yang sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai data pendukung dan salah satu tinjauan pustaka untuk membantu melengkapi isi dari penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama, adalah penelitian yang dilaksanakan oleh (Attamimi). Permasalahan yang terjadi di dalam penelitian (Attamimi) diawali karena adanya pembangunan tol tengah Kota Surabaya, Proyek ini dibuat untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Surabaya, namun hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari kalangan warga pinggiran rel Kota Surabaya.

Pembangunan Tol Tengah Kota nantinya menggusur seluruh rumah di sisi timur rel kota Surabaya sebagai trayek jalan tol yang akan dibangun. Kemudian inilah yang mengawali kemunculan gerakan penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh warga pinggir rel ini yaitu Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (TAP MPRS). Penelitian yang dilakukan oleh (Attamimi) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti dan menggambarkan fenomena perlawanan warga sisi timur rel kereta api dalam wadah Tim Anti Penggusuran

Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (TAP MPRS). Pendekatan teoritis yang digunakan (Attamimi) dalam penelitiannya adalah teori resistensi yang dikemukakan oleh Scott. Dalam membahas permasalahan resistensi warga pinggir rel Surabaya, menurut teori yang dikemukakan Scott, resistensi yang dilakukan para warga pinggir rel kereta api di Surabaya dengan wadah pergerakannya yang disebut Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya. Jika penelitian yang dilaksanakan oleh (Attamimi) menggunakan pendekatan teoritis Scott dalam melihat bentuk perlawanan yang dilakukan oleh warga sisi timur rel kereta api yang tergabung dalam Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (TAP MPRS), berbeda dengan penelitian ini dimana peneliti menggunakan pendekatan teoritis yang dikemukakan oleh Coleman dalam memahami tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI.

Penelitian yang dilaksanakan (Attamimi) fokus kajian penelitian yaitu melihat karakteristik sosial dan ekonomi warga pinggir rel Surabaya yang tergabung dalam Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya dan melihat peranan serta bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya dalam menghadapi rencana penggusuran permukiman sepanjang sisi timur rel kereta api untuk pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya (TTKS) yang dicanangkan oleh pihak PemKot Surabaya dan investor. Jika penelitian yang dilaksanakan oleh (Attamimi) fokus kajian penelitian yaitu melihat karakteristik sosial dan ekonomi warga yang menolak relokasi, berbeda dengan penelitian ini dimana dalam penelitian ini fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti disini adalah tindakan penolakan yang

dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI.

Hasil dari penelitian (Attamimi) ini adalah Karakteristik sosial dan ekonomi warga pinggir rel yang tergabung dalam Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya, bahwa warga pinggir rel menempati kelas ekonomi menengah ke bawah. Jika dilihat dari diferensiasi pekerjaan yang dimiliki sebagian besar dari mereka masih banyak yang menempati sektor informal, tentu untuk mendapatkan sebuah rumah atau tempat tinggal dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus sangat menyesuaikan penghasilan yang diterima agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga memaksa warga pinggir rel untuk melakukan perlawanan kepada Pemerintah yang akan menggusur rumah mereka dengan alasan pembangunan tol tengah kota.

Selain itu, mereka memiliki keterikatan sosial yang kuat dan rasa persaudaraan yang tinggi antar warga yang menumbuhkan kesadaran kolektif dengan cepat untuk melakukan perlawanan agar rumah mereka dapat dipertahankan dari rencana penggusuran. Dan bentuk resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel (TAP MPRS) dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya adalah melakukan serangkaian aksi perlawanan. Perlawanan dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan tidak berwujud dalam kekerasan, namun lebih kepada usaha untuk melakukan konsolidasi dalam menentukan sikap dan keputusan mengenai permasalahan yang memunculkan ketegangan antara kedua belah pihak, yakni masyarakat dengan Pemerintah. Demonstrasi yang dilakukan pun tidak sampai pada tindak kerusuhan dan

kekerasan namun lebih dimaksudkan sebagai perlawanan terbuka untuk mengartikulasikan kepentingan mereka di hadapan Pemerintah langsung dan ranah publik.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh (Amalia). Permasalahan yang terjadi di dalam penelitian (Amalia) diawali karena pengembang PT. Ciputra Surya, Tbk atau yang biasa disebut dengan Citraland dan PemKot Surabaya selaku pemberi izin kebijakan pembangunan, untuk menormalisasikan waduk dan sisanya dibangun perumahan di atas waduk.

Pembangunan perumahan di atas waduk ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitaran waduk tergusur dari tempat tinggalnya, yang kemudian rencana ini ditolak oleh masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar waduk, yaitu warga Perdukuan Sepat RW III dan RW V Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Masyarakat setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pengembang Citraland. Namun menurut status tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah menjadi milik pengembang Citraland dalam GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754.

Meskipun demikian, warga tetap pada pendiriannya tidak mau melepas waduk dan menuntut pengembalian pengelolaan waduk kepada masyarakat setempat karena berbagai alasan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara warga Perdukuan Sepat dengan PT. Ciputra Surya Tbk atau Citraland.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Amalia), fokus kajian penelitiannya yaitu kepada latar belakang konflik yang meliputi sejarah konflik dan penyebab konflik, serta pola perlawanan yang dilakukan masyarakat setempat terhadap

pengembang dalam rangka mempertahankan tempat tinggal dan waduk agar tetap menjadi milik masyarakat umum. Jika penelitian yang dilaksanakan (Amalia) memfokuskan kepada penyebab konflik dan pola perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap pengembang dalam rangka mempertahankan tempat tinggal dan waduk agar tetap menjadi milik masyarakat umum, sama dengan penelitian ini dimana obyek penelitian ini adalah masyarakat Kampung Kota, namun berbeda dengan fokus dalam penelitian ini dimana fokus penelitian ini lebih kepada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI. Dan juga pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan pendekatan teoritis penelitian yang dilaksanakan (Amalia), dimana peneliti disini menggunakan pendekatan teoritis Coleman untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh (Amalia), adalah bahwa latar belakang konflik antara warga Perdukuhan Sepat dengan pengembang Citraland terjadi karena adanya perbedaan pandangan dari pihak pengembang Citraland dan warga setempat terhadap status lahan waduk. Sementara penyebab dari konflik ini sendiri dibagi menjadi tiga lingkup besar, yakni masalah lingkungan, ideologi dan nilai sejarah, serta kesejahteraan sosial. Kemudian pola perlawanan yang digunakan masyarakat setempat terhadap pengembang Citraland adalah perlawanan terselubung dan terbuka. Bentuk dari perlawanan terselubung adalah dengan ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil, tidak mau menerima dana 3 miliar yang dikucurkan oleh pengembang Citraland, bersikap sinis baik kepada panitia

pembagian dana yang masih dihitung sebagai warga sendiri, orang-orang yang dianggap sebagai pekerja Citraland, kepolisian, aparat Pemerintah, serta bersikap waspada kepada orang-orang luar yang tidak dikenal yang dicurigai berhubungan dengan proyek pengalih fungsian waduk, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk perlawanan terbuka yaitu mulai dari aksi-aksi perundingan seperti mengadakan pertemuan dengan panitia pembagian dana 3 miliar, Kelurahan, Kecamatan untuk mencegah pembagian dana 3 miliar, menghadiri hearing yang diadakan oleh Komisi A dan Komisi B DPRD Surabaya, hingga aksi-aksi frontal seperti menggelar aksi demonstrasi/unjuk rasa di berbagai tempat seperti di Kelurahan, Grahadi dan Balai Kota Surabaya, perlawanan fisik ketika terjadi pemagaran waduk, aksi damai dengan menyebarkan pamflet di traffic light pintu masuk Citraland, lain sebagainya.

Dari kedua penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu subjek penelitian adalah masyarakat permukiman Kampung Kota yang terkena kebijakan pembangunan khususnya pengusuran dan relokasi. Namun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki karakteristik dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Dibandingkan kedua penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya melihat latar belakang, karakteristik sosial dan ekonomi warga yang terkena program relokasi. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tindakan penolakan yang dilakukan warga yang terkena program relokasi. Sehingga penelitian ini dapat menemukan tujuan dan dasar penolakan dari tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga yang terkena kebijakan relokasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menambah kajian mengenai relokasi permukiman Kampung Kota. Penelitian ini lebih fokus pada masyarakat

permukiman Kampung Kota sebagai subyek aktif dalam menghadapi kebijakan pembangunan yang berupaya untuk merelokasi mereka dari tempat tinggal mereka, terutama fokus kepada tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga permukiman Kampung Kota terhadap kebijakan relokasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penggunaan teoritis dari perspektif Coleman dalam memahami tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap penolakan program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam mendeskripsikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada klasifikasi tabel yang ada di bawah ini :



Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Topik Penelitian	Metode penelitian	Teori	Hasil Penelitian
<p>(Attamimi, 2014) Universitas Airlangga. “ Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya”</p>	<p>Fokus kajian penelitian melihat karakteristik sosial dan ekonomi warga pinggir rel Surabaya yang tergabung dalam Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya dan melihat peranan serta bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya dalam menghadapi rencana penggusuran permukiman sepanjang sisi timur rel kereta api untuk pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya (TTKS) yang dicanangkan oleh pihak PemKot Surabaya dan investor.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis moral ekonomi dan perlawanan yang dikemukakan oleh Scott</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial dan ekonomi warga pinggir rel yang tergabung dalam Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya, bahwa warga pinggir rel menempati kelas ekonomi menengah ke bawah. • Bentuk resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel (TAP MPRS) dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya adalah melakukan serangkaian aksi perlawanan, Perlawanan yang dilakukan adalah dalam bentuk demonstrasi tanpa kekerasan.
<p>(Amalia, 2012) Universitas Airlangga. “Konflik Waduk Sepat”</p>	<p>Fokus kajian penelitian yaitu kepada latar belakang konflik yang meliputi sejarah konflik dan penyebab konflik, serta pola perlawanan yang dilakukan masyarakat setempat terhadap pengembang dalam rangka mempertahankan tempat tinggal dan waduk agar tetap menjadi milik masyarakat umum.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>	<p>Perspektif teoritis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perlawanan Scott</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang konflik antara warga Perdukuhan Sepat dengan pengembang Citraland terjadi karena adanya perbedaan pandangan dari pihak pengembang Citraland dan warga setempat terhadap status lahan waduk. • Penyebab dari konflik ini sendiri dibagi menjadi tiga lingkup besar, yakni masalah lingkungan, ideologi dan nilai sejarah, serta kesejahteraan sosial. • Pola perlawanan yang digunakan masyarakat setempat terhadap pengembang Citraland adalah perlawanan terselubung dan terbuka.

				<p>Bentuk dari perlawanan terselubung adalah dengan sikap sinis, waspada, curiga terhadap orang luar, dan lain-lain. Sedangkan bentuk perlawanan terbuka yaitu dengan unjukrasa, hearing ke DPRD Surabaya, penanaman pohon, dan lain sebagainya.</p>
<p>Penelitian oleh Taufik Alhakim “Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program Relokasi Pemprov DKI”</p>	<p>Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI..</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>	<p>Perspektif teoritis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pilihan Rasional Coleman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan dari tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor yang menolak direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat dikarenakan faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor hukum yang menjadi alasan utama warga dalam menolak relokasi. Dalam penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo, warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan efektif untuk mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat. • Tindakan efektif yang dilakukan oleh para aktor dilakukan dengan cara : Bertahan di Kampung Pulo, aksi protes ke kantor Kecamatan, aksi demo, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciliwung Merdeka, serta menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta Timur. Tindakan efektif yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo ini merupakan bentuk dari tindakan dalam mencapai tujuan dan kepentingan aktor dari



pilihan menolak program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Dimana tujuan yang ingin dicapai oleh aktor dari penolakan terhadap program relokasi ini adalah, tujuan ekonomi dan sosial.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pilihan Rasional Menurut Coleman

- **Aktor & Sumber Daya**

Pada kajian teori ini, peneliti membangun pijakan analisis pembahasan dengan menggunakan teori pilihan rasional dari James Coleman. Teori pilihan rasional James Coleman dengan teori rasional Max Weber memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi alasan peneliti lebih memilih teori pilihan rasional James Coleman karena dalam penjabaran teori, Coleman menjelaskan secara rinci bagaimana individu memilih sebuah pilihan/tindakan sosial individu dengan yang akan mereka capai. Tindakan Sosial pada Masyarakat Konsep tentang tindakan sosial pertama kali dicetuskan oleh Max Weber. Weber sebagai pengemuka pertama dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Sehingga inti tesis yang dibuatnya adalah "tindakan yang penuh arti" dari individu. Dalam tesis yang dimaksudkan dengan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu (Ritzer G. , 2011). Tindakan sosial mengandung tiga konsep, yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman. Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi berdasarkan konsep tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial antara yakni :

1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata yang bersifat membanting sepenuhnya dan bersifat subjektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang disengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan yang diarahkan kepada orang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Tindakan sosial dapat dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lampau maupun waktu masa mendatang.

Weber menggunakan metode verstehen sebagai metode analisisnya. Verstehen adalah suatu upaya peneliti untuk memahami tindakan aktor melalui interpretasi dari tindakan si aktor itu sendiri. Weber menyarankan dua cara untuk memahami motif aktor yakni melalui kesungguhan dan mencoba menyelami pengalaman si aktor. Sehingga sebagai peneliti kita harus menempatkan diri dalam posisi aktor atau individu dan mencoba memahami objek sesuai dengan pemahaman individu atau aktor. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksisosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Teori pilihan rasional James S. Coleman menitikberatkan pada aktor, Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Teori ini

menjadi populer ketika Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* pada 1989 yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Tindakan rasional lebih menekankan kepada kenapa seorang aktor melakukan tindakan tertentu, rasionalitasnya seperti apa dan bagaimana proses terbentuknya rasionalitas, Coleman lebih melihat kepada pilihan rasional individu untuk mencapai tujuannya dimana lingkungan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tindakan individu. Coleman lebih memberikan gambaran rinci mengenai proses individu melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan aspek yang terlibat dalam sebuah struktur (Coleman J. , 2008).

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya. Ada dua elemen penting dalam pilihan rasional (Coleman J. S., 2011), yaitu:

1. Aktor, yaitu pelaku yang berkepentingan untuk melakukan tindakan berdasarkan kepentingan. Pelaku disini terhadap sumberdaya bisa memiliki kuasa atau kepentingan.

2. Sumber Daya, yaitu segala sesuatu yang dikuasai ataupun yang menjadi kepentingan dari pelaku/ aktor.

Jadi didalam tindakan rasional individu terdapat kuasa dan kepentingan. kepentingan dimiliki oleh setiap individu namun tidak semua kuasa dimiliki individu satu. Terkadang kuasa dimiliki oleh individu yang lain sehingga individu yang satu harus melakukan pertukaran dengan individu yang lain. Aktor dalam penelitian ini yaitu warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi, dalam melakukan pilihan rasional aktor akan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dimana ketika dia tidak bisa menguasai maka akan membutuhkan hak kuasa dari aktor yang lain. Aktor disini memiliki sumberdaya berupa hubungan kekerabatan, jaringan dan solidaritas antara aktor yang satu dengan yang lainnya yang ikut menolak direlokasi ke Rusun. Sumberdaya lainnya yang dimiliki aktor adalah sertifikat tanah dan bangunan yang saat ini mereka tempati di Kampung Pulo yang merupakan akses bagi dirinya untuk tetap menempati rumah yang ia miliki di Kampung Pulo dan menolak untuk direlokasi ke Rusun.

Pilihan rasional merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan bisa berkaitan dengan modal sosial yang dimiliki.

Seorang individu melakukan tindakan atau sebuah pilihan tentunya berdasarkan rasionalitasnya demi mencapai tujuan walaupun terkadang pilihan rasional individu itu menurut orang lain tidak rasional. Dalam membangun rasionalitas individu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor disekitarnya yang kemudian Coleman menyebutnya sebagai modal sosial. Tujuan yang dicapai bisa saja dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki oleh individu. Tindakan rasional dan modal sosial bisa berkaitan karena dalam menentukan pilihan seseorang akan

mempertimbangkan berbagai aspek termasuk menggunakan modal sosial ataukah pilihannya akan membentuk modal sosial baru yang dikemudian hari dapat membantunya untuk mencapai tujuan. Menggunakan ataupun membentuk modal sosial yang baru adalah cara individu untuk bisa memanfaatkannya dalam mencapai tujuan ataupun kepentingan dari individu itu sendiri. Selain pelaku/aktor, sumberdaya, kepentingan dan kuasa. Aspek penting yang lain dalam pilihan rasional Coleman yaitu kesadaran. Jadi individu secara sadar melakukan sebuah tindakan ataupun pilihan dengan perhitungan mencapai tujuan ataupun kepentingan dirinya. Kesadaran adalah dimana aktor/pelaku secara sadar demi kepentingannya akan melakukan pertukaran dengan aktor/pelaku yang lain demi mendapatkan penguasaan atas sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya tidak dapat diberikan namun hak untuk menguasai sumberdaya itu bisa diberikan. Dari situ peneliti melihat kesadaran, kepentingan dan penguasaan menjadi aspek penting dalam teori pilihan rasional Coleman. Sama halnya dalam penelitian ini dimana warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi memiliki kesadaran dan kepentingan untuk menguasai apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.

Tindakan seorang aktor dalam mengambil sebuah keputusan dipengaruhi oleh rasional dirinya dan lingkungan disekitarnya (Ritzer G. , 2011). Hal semacam ini juga dibahas oleh James Coleman mengenai rasionalitas bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki alasan tertentu dalam mengambil sebuah tindakan dan pilihan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pelaku (Coleman J. S., 2011). Kondisi yang semacam ini juga tak jauh berbeda ketika warga Kampung Pulo menolak untuk direlokasi dan bertahan di Kampung Pulo. Hal semacam ini termasuk dalam teori tindakan "beralasan" atau lebih dikenal sebagai teori

"rasional". Untuk menolak untuk direlokasi bukanlah pilihan yang mudah karena mereka harus bentrok dengan aparat penegak hukum setiap kali pengusuran akan dilakukan dan terancam akan direlokasi secara paksa oleh Pemprov DKI. Keputusan yang diambil oleh warga Kampung Pulo untuk menolak direlokasi merupakan salah satu tindakan yang memiliki alasan tersendiri bagi mereka ketika memilih bertahan di Kampung Pulo. Tingkat rasional seseorang sering kali dipertanyakan orang lain karena dianggap tidak rasional, dan hal tersebut muncul karena perbedaan pendapat dari setiap individu, maka dari itulah rasional atau tidak rasionalnya seseorang pada akhirnya dikembalikan lagi pada cara pandang orang tersebut karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda (Coleman J. S., 2011).

Coleman menyebutkan bahwa dua unsur utama dalam teori pilihan rasionalnya yaitu aktor dan sumber daya, posisi sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor (Ritzer G. , 2011). Coleman juga memperhatikan adanya sebuah perilaku kolektif aktor. Perilaku kolektif bertujuan sebagai sebuah pengendalian diri atas tindakan aktor terhadap aktor lainnya sehingga dalam praktiknya aktor dapat mencapai sebuah tujuan bersama. Penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi Pemprov DKI merupakan suatu bentuk tindakan yang berupaya untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Adanya tindakan penolakan oleh warga Kampung Pulo juga merupakan upaya memaksimalkan kepentingan individual yang antara beberapa aktor dan kemudian menghasilkan keseimbangan kontrol dalam masyarakat Kampung Pulo itu sendiri. Perilaku kolektif lebih cenderung mengacu pada kondisi saling ketergantungan antara aktor terhadap aktor yang lain

yang memiliki tujuan yang sama sehingga mereka dapat mencapai tujuan maksimal jika dilakukan secara bersama.

- **Norma Sosial**

Dalam teori pilihan rasional yang berlandaskan pada tindakan individu yang rasional, posisi norma seperti pedoman tindakan. Sebagaimana yang disampaikan Coleman (2011) bahwa norma-norma menentukan tindakan-tindakan mana yang dianggap tepat atau tidak tepat, pantas atau tidak pantas oleh sekelompok orang. Biasanya norma ditegakkan melalui sanksi berupa imbalan atau hukuman. Pelaku memperoleh imbalan kalau melakukan tindakan yang dipandang benar atau pantas serta hukuman kalau melakukan tindakan yang dipandang salah/tidak pantas. Dari situ terlihat bahwa norma memberikan makna tentang tindakan, serta disertai oleh sanksi yang menaruh konsekuensi terhadap setiap tindakan pelaku.

Norma ditujukan untuk tindakan tertentu yang disebut tindakan utama. Berdasarkan hal tersebut maka norma dapat dibedakan menjadi norma anjuran dan norma larangan. Norma larangan adalah norma yang cenderung menghentikan atau melarang tindakan utama. Norma ini memberikan umpan balik negatif ke dalam sistem karena menghambat tindakan utama. Sedangkan norma anjuran adalah norma yang mendorong atau menganjurkan tindakan utama disebut sebagai norma anjuran. Norma ini memberikan umpan-balik positif karena dapat memperluas tindakan utama (Coleman J. S., 2011). Bukan hanya norma yang terklasifikasikan melainkan juga sanksi. Coleman menyampaikan bahwa sanksi bisa jadi positif atau negatif. Sanksi positif diarahkan untuk mendorong

tindakan utama yang diperbolehkan norma sedangkan sanksi negatif diarahkan untuk menghentikan tindakan utama yang dilarang norma (Coleman J. S., 2011).

Sebagai pedoman tindakan, norma menawarkan pilihan untuk mengikutinya atau tidak. Pilihan itu dibuat pelaku tentunya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan menaati atau melanggar norma di kemudian hari. Seperti yang disampaikan Coleman (2011) bahwa orang-orang yang tindakannya tunduk, berpegang pada norma ataupun tidak tunduk dan tidak berpegang pada norma akan mempertimbangkan norma norma tersebut, potensi imbalan atau hukumannya. Meskipun begitu yang perlu ditekankan adalah norma bukanlah faktor penentu mutlak tindakan pelaku, tetapi sebagai elemen yang mempengaruhi keputusannya mengenai tindakan apa yang dapat dia lakukan untuk kepentingannya. Begitupula orang-orang yang menciptakan ataupun mempertahankan adanya suatu norma dipandang sebagai pihak yang merasa diuntungkan oleh kepatuhannya terhadap norma dan merugi karena melanggarnya. Pemaparan itu jelas menunjukkan perspektif teori ini yang melihat penciptaan, kepatuhan, ataupun ketidakpatuhan terhadap norma adalah keputusan pelaku yang terkait dengan kepentingannya. Kehadiran norma sosial yang disertai sanksi tidak dapat terlepas dari adanya berpegang persoalan hak.

Bagi Coleman (2011) orang-orang yang menaati atau pada norma berarti menyatakan haknya untuk menerapkan sanksi serta mengakui hak orang lain yang berpegang pada norma itu untuk menerapkan sanksi. Tidak ada norma yang muncul kalau tidak ada hak yang muncul, atau selama individu memegang hak kontrol atas tindakannya sendiri. Norma hanya muncul kalau pelaku lain memegang hak untuk mempengaruhi arah bagi tindakan yang akan diambil oleh

seorang pelaku. Norma muncul saat adanya konsensus dalam sistem sosial atau sub sistem sosial yang menyatakan bahwa hak untuk mengontrol tindakan dipegang bukan oleh si pelaku tetapi pelaku-pelaku lain. Hak yang terkait dengan norma sosial itu adalah hak yang ditetapkan secara sosial bukan secara hukum atau berdasarkan aturan formal. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat terlihat bahwa norma yang menentukan tindakan mana yang benar atau salah, yang disertai sanksi yang ditegakkan oleh pelaku lain. Maka itu Coleman (2011) menyampaikan bahwa norma sebagai struktur sosial menjadi bagian dari proses umpan-balik, yang juga meliputi umpan balik negatif, yang jika efektif akan memperkecil atau mengurangi tindakan tertentu, atau umpan-balik positif yang jika efektif akan mendorong tindakan tertentu lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, norma dibentuk oleh warga Kampung Pulo sebagai aturan atau mekanisme tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo sebagai aktor. Norma tersebut dapat terlihat dari tindakan kolektif yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam menolak program relokasi, dimana warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan kolektif yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan dari penolakan. Dan norma tersebut muncul sejak pertama kali warga Kampung Pulo sepakat melakukan tindakan bersama dalam menolak program relokasi dan dipertahankan hingga saat ini. Norma juga dijadikan pedoman berperilaku antara aktor warga Kampung Pulo dengan LSM sebagai aktor korporat. Norma tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kedua belah pihak dan telah ditandatangani oleh kedua pihak dengan berisi kesepakatan yang mengatur tindakan kedua belah pihak dalam melakukan penolakan.

- **Modal Sosial**

Modal Sosial Dalam teori pilihan rasional, relasi kepercayaan, norma-norma dan relasi wewenang dikelompokkan ke dalam satu konsep yaitu konsep modal sosial. Menurut Coleman (2011) penggunaan konsep modal sosial akan mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak ada proses yang berbeda dengan proses-proses yang dibahas pada bab-bab lainnya. Konsep ini mengelompokkan beberapa proses tersebut bersama-sama dan mengaburkan perbedaan di antara jenis-jenis relasi sosial, perbedaan yang penting untuk tujuan-tujuan lain. Nilai konsep tersebut terletak pada fakta bahwa konsep tersebut mengidentifikasi beberapa aspek struktur sosial berdasarkan fungsinya tanpa memperhatikan perbedaan bentuk, penampilan, dan susunan (dengan kata lain apapun bentuk, jenisnya, mereka memiliki satu fungsi yang sama).

Fungsi yang diidentifikasi dengan konsep "modal sosial" adalah nilai aspek-aspek struktur sosial bagi para pelaku, sebagai sumber yang dapat digunakan oleh para pelaku untuk merealisasikan kepentingannya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat terlihat bahwa konsep modal sosial fokus melihat fungsi dari relasi-relasi tersebut yaitu sebagai sumber bagi pelaku yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mewujudkan kepentingannya. Relasi-relasi itu dipandang memiliki satu fungsi yang sama sehingga dikelompokkan ke dalam satu konsep modal sosial.

Coleman (2011) melihat bahwa modal sosial sama dengan modal lainnya modal finansial, dan modal manusia. Modal sosial bersifat seperti modal fisik, produktif yang memungkinkan pelaku dapat mencapai tujuannya yang tidak dapat tercapai tanpa keberadaan modal sosial itu. Meskipun begitu, modal sosial sama

halnya dengan modal fisik dan modal manusia yang sepenuhnya tidak dapat ditukar, tetapi dapat ditukar terkait dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Tidak seperti modal manusia yang letaknya pada diri individu atau modal fisik yang letaknya pada alat produk fisik, modal sosial melekat pada struktur relasi di antara pelaku.

Konsep modal fisik, sebagaimana yang diwujudkan dalam peralatan, mesin, dan alat produktif lainnya, dapat diperluas dengan memasukkan modal manusia. sebagaimana modal fisik yang diciptakan dengan mengubah materi untuk membentuk alat yang memudahkan produksi, modal manusia diciptakan dengan mengubah orang dengan memberi mereka keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Modal sosial, pada gilirannya, tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan (Coleman, 2011).

Dalam penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo, modal sosial ini ditunjukkan dalam bentuk tindakan efektif yang mereka lakukan bersama-sama. Tindakan efektif ini dapat terbentuk karena adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing aktor dalam pilihan menolak direlokasi dan bertahan di Kampung Pulo. Dengan adanya tindakan efektif ini, kepentingan aktor akan lebih mudah untuk dilakukan ataupun dicapai. Aktor juga memanfaatkan jaringan dan solidaritas yang mereka miliki sebagai sumber daya. Dimana dengan sumberdaya tersebut aktor dapat lebih mudah mencapai tujuan dari tindakan penolakan yang ia lakukan dalam menolak program relokasi. Pemanfaatan sumber daya dalam konteks solidaritas antara aktor juga merupakan bentuk modal sosial yang terbentuk dari relasi kepercayaan antara aktor. Dimana dengan relasi

kepercayaan antara aktor, kemudian aktor memberikan wewenang kepada aktor lain untuk merealisasikan kepentingannya, dan pemberian wewenang kepada aktor lain juga termasuk dalam modal sosial.

2.3 Definisi Konsep

2.3.1 Permukiman Kampung Kota

Permukiman Kampung Kota adalah suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri antara lain: penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya. Permukiman Kampung Kota merupakan permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. Apabila dikaji berdasarkan strukturnya, Kampung Kota merupakan salah satu elemen pembentuk kota. Secara fisik kondisi Kampung Kota saat ini pada umumnya buruk. Kondisi terutama dipicu masalah kepadatan dan tidak terorganisirnya struktur fisik lingkungan Kampung Kota tersebut. Ketiadaan struktur formal teritorialitas ini sering dikaitkan dengan permukiman ilegal. Dengan kata lain tidak terstrukturnya permukiman Kampung Kota dikarenakan tidak adanya penataan ruang yang didukung oleh infrastruktur yang terprogram secara formal. Ciri-ciri permukiman Kampung Kota adalah permukiman Kampung Kota sering kali disebut sebagai permukiman sektor informal karena banyak dihuni oleh orang-orang dengan pekerjaan yang bergerak dibidang informal dan juga sering disebut sebagai lingkungan yang miskin struktur,

tidak teratur, dan terkesan Kampung Kota jika dilihat dari lingkungan fisik arsitektural permukiman Kampung Kota (Wiryomartono, 1999).

Dalam konteks penelitian ini, Kampung Pulo termasuk dalam kategori permukiman Kampung Kota yang mana Kampung Pulo berada pada lahan legal dengan kualitas lingkungan fisik sarana dan prasarana yang rendah dan cenderung menurun. Kondisi dapat dilihat dari ciri Kampung Pulo, dimana tingkat frekuensi dan volume kepadatan warga yang tinggi di Kampung Pulo dengan luas wilayah 8.575 hektar yang ditempati oleh 12.828 warga yang terdiri dari 3096 kepala keluarga (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Kemudian fasilitas umum yang ada di Kampung Pulo kondisinya juga tidak memadai, seperti sistem drainase, tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang tidak dimiliki masing-masing warga Kampung Pulo di rumah mereka sendiri dan memanfaatkan bantaran Kali sebagai tempat mereka untuk melakukan kegiatan MCK setiap harinya. Kondisi hunian rumah dan permukiman yang sempit dan padat penduduk, juga menunjukkan bahwa warga Kampung Pulo termasuk dalam kategori warga yang kurang mampu atau miskin, sebagaimana ciri-ciri yang termasuk kategori Kampung Kota.

2.3.2 Relokasi Permukiman

Relokasi atau *resettlement* merupakan proses pemindahan penduduk dari lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang baru disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota. Menurut Hudohusodo relokasi dilakukan terhadap permukiman lokasi permukiman yang tidak diperuntukkan bagi perumahan atau lokasi permukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana. Relokasi atau *resettlement* merupakan

salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman Kampung Kota, status lahannya tidak legal (illegal) atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru (Agung, 2001). Berkaitan dengan obyek penelitian dalam penelitian ini, Salah satu permukiman Kampung Kota di Jakarta yang terkenal adalah Kampung Pulo, yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kampung Pulo yang selalu banjir saat hujan turun dan saat ada kiriman dari pintu air Katulampa Bogor, menimbulkan masalah perkotaan dan masalah sosial sosial karena banjir menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan rendahnya kualitas lingkungan Kampung Pulo (Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo dengan merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun Jatinegara.

2.3.3 Rumah Susun

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, pengertian dan pembangunan rumah susun adalah :

1. Lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya secara keseluruhan merupakan tempat permukiman.
2. Satuan lingkungan rumah susun adalah kelompok susun yang terletak pada tanah bersama sebagai salah satu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan pengelolaan.
3. Prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sehingga dapat disimpulkan, rumah susun dapat diartikan sebagai suatu bangunan gedung bertingkat yang memiliki sistem kepemilikan perseorangan dengan hak bersama, yang penggunaannya bersifat hunian, untuk mewadahi fungsi dan aktivitas keluarga yang dilaksanakan secara sederhana.

Pembangunan rumah susun diarahkan untuk mempertahankan kesatuan komunitas kampung asalnya. Pembangunannya diprioritaskan pada lokasi di atas bekas kampung Kampung Kota dan sasaran utamanya adalah penghuni Kampung Kota itu sendiri yang mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah (Peraturan Pemerintah RI No 4/1988).

Dalam konteks penelitian ini, Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat.

Pemprov DKI juga beralasan relokasi Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana Pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung. Rumah susun Jatinegara Barat sebelumnya yang telah disediakan oleh Pemprov DKI merupakan rumah susun yang layak huni, sehat, fasilitas rumah tangga yang lengkap, dan ditanggung oleh Pemprov DKI yang mana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 pasal 3 tentang rumah susun, menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya peningkatan kualitas hidup penghuni rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Perumahan Nasional, 2011). Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh UU 20 tahun 2011 pasal 3 tentang rumah susun, upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan membangun Rusun Jatinegara Barat merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pembangunan dalam mewujudkan permukiman layak huni, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan bagi warga Kampung Pulo itu sendiri.

2.3.4 Massa Apung

Kehidupan masyarakat di perkotaan kelas bawah dengan meminjam terminologi Hans Dieter Evers (1982) sebagai “massa apung kota” mencerminkan realitas sebuah kehidupan yang serba terbatas. Istilah massa apung digunakan oleh Hans Dieter Evers untuk menyebut golongan miskin di Jakarta. Dalam konteks tersebut, Evers menyebut orang miskin di Jakarta yang sangat banyak jumlahnya itu sebagai orang-orang yang tidak memiliki orientasi tunggal, sangat disibukkan oleh kepentingan subsistensi ekonomi. Massa apung kota yang lebih

dikenal dengan istilah warga miskin atau wong melarat merupakan refleksi dari keberadaan kaum tak beruntung umpama: tunakisma, tunakarya, gelandangan, pengemis, buruh kasar dan anak jalanan. Mereka cenderung tinggal tak menentu di sembarang tempat seperti belakang gedung bertingkat, kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, tepi bantaran sungai, kios kosong di sudut pasar, trotoar pertokoan, pekuburan umum yang kontras berbeda dengan kondisi kehidupan gemerlap di permukaan kota (Evers, 1986).

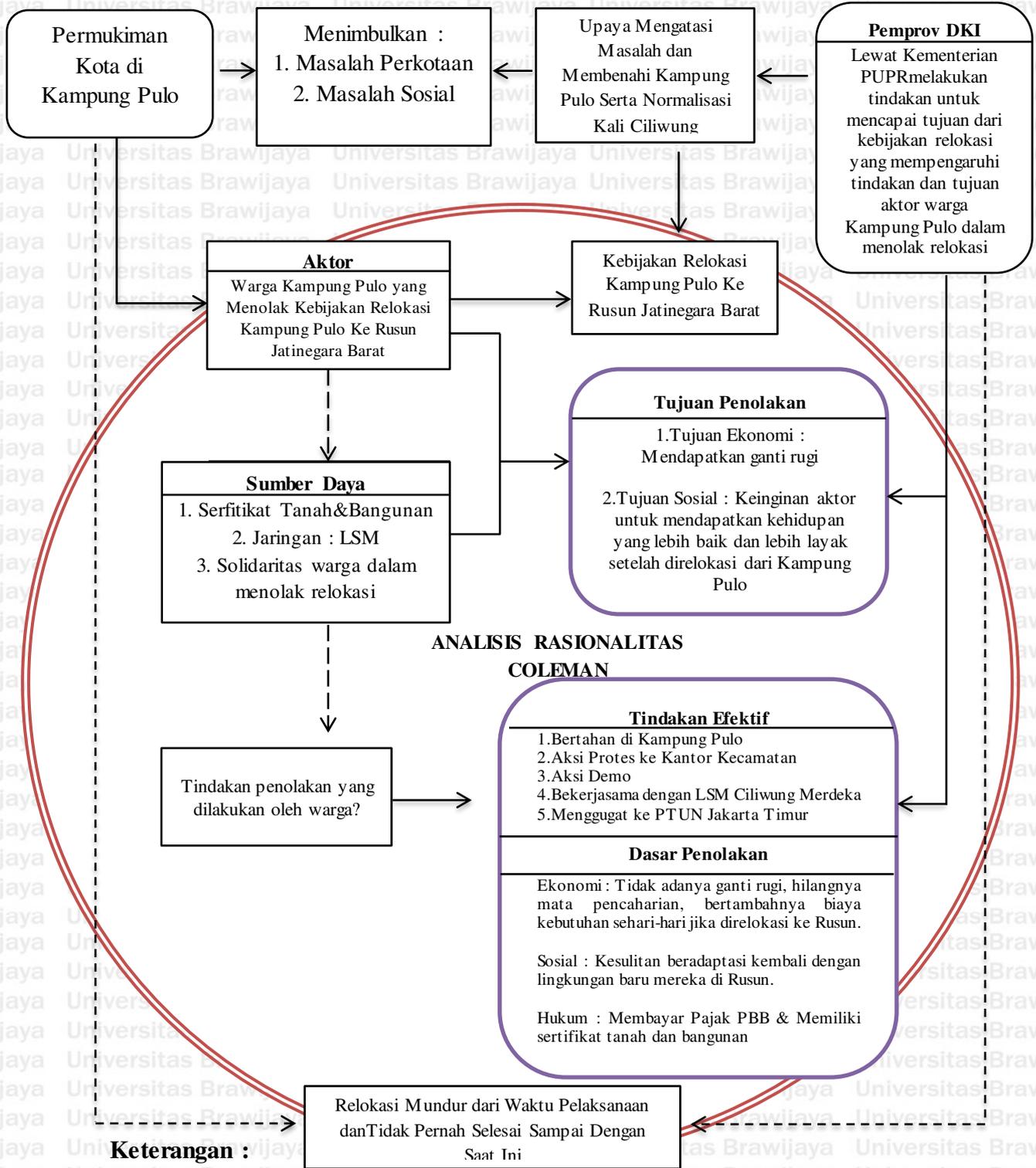
Ciri khas massa apung adalah mobilitas geografis dan pekerjaan mereka yang tinggi. Mereka merupakan kelompok yang mencari pekerjaan, tak punya tempat tinggal, memiliki pendidikan yang rendah dan tingkat pendapatan yang rendah serta sangat beragam (Wirosardjono, 1976). Kelompok massa apung kehidupan ekonominya hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar (Suparlan, 1993). Kondisi mereka yang miskin itu sangat rentan untuk dipergunakan oleh kelompok elit politik demi kepentingan politik tertentu karena kebutuhan ekonomi cepat mengakibatkan massa ini gampang dibawa ke arah tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain kelompok massa apung merupakan komunitas yang secara politik tidak memiliki orientasi politik yang tetap.

Dalam konteks penelitian ini, warga Kampung Pulo juga merupakan termasuk kelompok massa apung. Dimana jika dilihat dari tingkatan ekonomi penduduk Kampung Pulo terutama didominasi perekonomian yang rendah dengan penghasilan yang rendah dan tidak tetap. Dalam politik warga Kampung Pulo juga dipergunakan oleh kelompok elit politik sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu, seperti dalam Pilkada DKI Jakarta. Dimana dalam Pilkada DKI

Jakarta warga Kampung Pulo seringkali dibawa ke arah tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkada DKI dengan berbagai macam kontrak politik yang akan diterima oleh warga Kampung Pulo, yang salah satunya terkait dengan program relokasi.



2.4 Kerangka Berfikir



Keterangan :

---> : Menunjukkan kondisi di lapangan

—> : Menunjukkan hubungan langsung

□ : Hasil akhir penelitian

○ : Analisis Rasionalitas Coleman

Penelitian ini dilakukan atas dasar ketertarikan peneliti mengenai permasalahan relokasi yang terjadi di Kampung Pulo. Keberadaan Kampung Pulo yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur selama ini telah menjadi masalah perkotaan, ini disebabkan karena Kampung Pulo yang merupakan Kampung Kota terletak tepat di bantaran Kali Ciliwung yang seharusnya di bantaran Kali Ciliwung ini, bebas dari bangunan permukiman. Masalah perkotaan tersebut kemudian menjadi masalah sosial, karena permasalahan banjir yang selalu melanda Kampung Pulo saat hujan turun ataupun saat air kiriman datang dari pintu air Katulampa Bogor. Banjir juga dikarenakan letak Kampung Pulo yang berada di bantaran Kali Ciliwung, yang membuat air yang mengalir Kali Ciliwung terhambat saat melewati Kampung Pulo dan menggenangi Kampung Pulo. Dan dikarenakan minimnya sistem drainase dan sampah yang menumpuk di permukiman Kampung Pulo. Masalah sosial lainnya di Kampung Pulo adalah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan rendahnya kualitas lingkungan Kampung Pulo akibat banjir yang melanda Kampung Pulo. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini dan untuk membenahi permukiman Kampung Pulo serta menormalisasikan kembali Kali Ciliwung, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat.

Namun permasalahannya, relokasi yang dilakukan Pemprov DKI lewat Kementerian PUPR dalam upayanya mewujudkan tujuan yang ada dalam Perda dan memecahkan masalah sosial yang selama ini ada di Kampung Pulo, sulit sekali terwujud. Dikarenakan adanya penolakan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang sudah dilakukan selama

bertahun-tahun, yaitu sejak pertama kalinya kebijakan relokasi ini dikeluarkan pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, sehingga mengakibatkan waktu relokasi mundur dari pelaksanaannya. Dari penjelasan alur pikir di atas, peneliti melihat permasalahan penolakan relokasi ini dengan merujuk pada teori pilihan rasional Coleman. Pada fokus permasalahan yang diangkat penelitian ini adalah pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI. Dimana jika dilihat dari perspektif Coleman, warga Kampung Pulo yang melakukan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun merupakan seorang aktor yang memiliki tujuan tertentu dalam melakukan penolakan. Warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam melakukan penolakan juga memiliki sumber daya berupa jaringan dan solidaritas antar warga yang menolak yang dapat mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan kepentingan mereka dari adanya penolakan ini. Dengan penggunaan teoritis dari perspektif Coleman dalam memahami tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI, nantinya diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam menolak program relokasi didasari atas faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor hukum yang menjadi alasan utama warga dalam menolak relokasi. Faktor ekonomi tersebut adalah, tidak adanya ganti rugi dari Pemprov DKI, hilangnya mata pencaharian, dan bertambahnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika direlokasi ke Rusun. Faktor sosial yang menjadi alasan warga Kampung Pulo menolak direlokasi ke Rusun adalah,

kesulitan yang harus di hadapi warga ketika mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan baru mereka di Rusun. Sedangkan warga merasa bahwa tempat tinggal yang mereka miliki merupakan tanah yang sah secara hukum milik mereka karena atas dasar kepemilikan surat dan bukti pembauaran pajak PBB.

Dalam penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo, warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan efektif untuk mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat.

Tindakan efektif tersebut dapat terbentuk atas pemanfaatan sumberdaya berupa jaringan dan solidaritas yang dimiliki warga Kampung Pulo sebagai aktor. Dan juga dapat terbentuk atas kesepakatan bersama para aktor dalam menentukan tindakan efektif dalam mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Tindakan efektif menolak program relokasi yang pertama adalah dengan cara bertahan di Kampung Pulo. Tindakan efektif kedua yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan melakukan aksi protes langsung ke kantor Kecamatan. Kemudian tindakan efektif ketiga yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan melakukan demo di jalan Jatinegara Barat. Tindakan efektif keempat yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dan tindakan efektif terakhir yang dilakukan aktor adalah dengan menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Dalam melakukan tindakan efektif, tindakan tersebut dilakukan oleh warga Kampung Pulo untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh warga Kampung Pulo dari penolakan terhadap program relokasi ini, yaitu tujuan

ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi yang ingin didapatkan aktor dalam penolakan ini adalah, adanya ganti rugi berupa uang atas tanah dan bangunan yang ia miliki dan tempati di wilayah Kampung Pulo yang terkena relokasi.

Sedangkan tujuan sosial yang ingin didapatkan aktor dalam penolakan ini adalah, keinginan aktor untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak setelah direlokasi dari Kampung Pulo.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial yang telah dialami oleh subyek. Pada dasarnya penelitian kualitatif mengamati orang-orang dalam lingkungan sosial, bagaimana berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka terhadap lingkungan disekitarnya. Seperti apa yang disampaikan Moleong bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, keinginan dan lain-lain secara utuh (*holistic*), dan dengan melalui deskriptif lewat kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2009).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pendekatan studi kasus pada hakikatnya terfokus kepada satu fenomena (Husaini, 2008). Studi kasus menurut (Yin, 2008) adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana:

multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Dalam terminologi Yin mengkategorikan studi kasus ke dalam tiga jenis tipologi yaitu eksplanatoris, eksploratif dan deskriptif (Yin, 2015). Dari tipologi studi kasus tersebut, peneliti menggunakan teknik studi kasus deskriptif. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses, kondisi sosial, atau fenomena melalui kata-kata. Dimana dalam penelitian ini, pendekatan aktor lebih menekankan pada pandangan subyektif aktor. Hasil pemahaman atas fenomena dan pandangan subyektif aktor tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk menjadi data penelitian. Data penelitian dikumpulkan dan dilukiskan dalam narasi yang cukup deskriptif sehingga pembaca bisa memahami dan ikut mengalami peristiwa tersebut (Stake, 2011).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan masalah sosial dalam penelitian ini yaitu mengenai tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo program relokasi Pemprov DKI yang ditinjau dengan perspektif pilihan rasional James S. Coleman, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif dengan memfokuskan pada penguraian kasus yang sedang diteliti. Lebih lanjut, tipe studi kasus yang dipakai untuk memperkuat pendeskripsian permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe studi kasus instrinsik. Studi kasus instrinsik lebih kepada mendalami kasus yang ada karena keunikan dari suatu kasus. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus instrinsik karena tidak berusaha untuk mengeneralisasikan kasus dan

berangkat dari kasus tunggal. Studi kasus instrinsik dimaksudkan untuk meneliti permasalahan dari awal sampai akhir dan untuk memahami serta mengetahui secara detail mengenai permasalahan relokasi di Kampung Pulo.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian adalah di Kampung Pulo yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Lokasi tersebut dipilih menjadi lokasi penelitian adalah karena peneliti tertarik dengan permasalahan relokasi yang tidak kunjung usai di Kampung Pulo yang merupakan salah satu permukiman Kampung Kota yang terkenal di Jakarta yang sudah ada sejak tahun 1930. Upaya Pemprov DKI mengambil kebijakan untuk membenahi Kampung Pulo dengan merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun Jatinegara Barat yang layak huni dan sehat sulit sekali terwujud. Dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi yang dicanangkan oleh Pemprov DKI, dan permasalahan tersebut menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kampung Pulo. Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan Februari 2017 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI. Alasan peneliti memfokuskan penelitian pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak program relokasi, adalah karena upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk merelokasi warga Kampung Pulo, dari tahun ke tahun tidak pernah

berhasil dan selalu mendapatkan penolakan dari warga Kampung Pulo. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi untuk menjawab rumusan masalah dan permasalahan yang terjadi di Kampung Pulo, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori Tindakan Rasional James Coleman.

3.4 Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Menurut (Kriyantono, 2006) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian itu sendiri. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi, dimana melalui wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah sehingga melalui data primer peneliti bisa mendapatkan data yang akurat karena

terlibat wawancara langsung dengan warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari subjek ke dua atau sekunder (Kriyantono, 2006). Data sekunder yang diperoleh di dalam penelitian ini yakni dari kajian pustaka seperti berita surat kabar, website dari internet dan buku-buku yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti dan dokumen-dokumen berupa jurnal yang terkait dengan relokasi Kampung Kota khususnya yang berkaitan dengan relokasi Kampung Pulo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan, dan pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni:

a. Observasi

Observasi langsung menurut Cartwright Herdiansyah (2010) dalam mendefinisikan observasi sebagai suatu proses untuk melihat, melakukan pengamatan dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan yang nantinya akan disimpulkan atau diagnosis, observasi hanya bisa dilakukan pada sesuatu yang tampak (Suharsaputra, 2012). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung yaitu dengan turun lapang melihat kondisi sosial yang sedang terjadi pada warga Kampung Pulo. Peneliti juga melakukan wawancara awal untuk

memperkuat topik yang akan diteliti sehingga peneliti memperoleh data mengenai apa saja yang menjadi alasan warga Kampung Pulo untuk menolak direlokasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian yang tidak bisa dilakukan dengan observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu responden atau informan (Suharsaputra, 2012). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan guide interview sebagai pedoman pertanyaan agar yang disampaikan terarah dan peneliti disini juga tidak membatasi apa yang disampaikan oleh informan. Peneliti mewawancarai warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi untuk memperoleh data dari topik yang ingin dijelaskan oleh peneliti. Sehingga dari hasil wawancara akan diperoleh data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian dari masa lalu yang ditulis atau dicetak berupa catatan, surat, buku harian serta dokumen-dokumen (Suharsaputra, 2012). Pada dasarnya dalam penelitian ini dokumen digunakan sebagai data sekunder, dengan menggunakan dokumentasi peneliti bisa menghemat biaya, waktu dan tenaga relatif efisien. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berita-berita maupun dokumen yang terkait dengan program relokasi Kampung Pulo dan data-data yang diperoleh melalui informan. Seperti berita-berita mengenai penolakan

warga Kampung Pulo terhadap program relokasi, surat keputusan relokasi, dan pernyataan tertulis penolakan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi. dan dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam seperti video atau audio. Agar memudahkan peneliti memilah data dan juga data akan lebih tahan lama sehingga peneliti dapat memutar atau melihatnya berkali-kali. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan menggunakan kamera ataupun recorder yang ada di handphone ketika peneliti melakukan observasi dilapangan dan juga ketika melakukan wawancara dengan warga Kampung Pulo sehingga data yang tersimpan akan lebih mudah untuk dianalisis.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, sumber data disebut dengan informan, yakni orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data atau, disebut juga subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang berlaku (Suprayogo, 2001). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive. Purposive adalah peneliti menggunakan pertimbangan sendiri (dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi) untuk menentukan anggota sampel (Silalahi, 2003).

Menurut pendapat Spradley dalam (Faisal, 1999) mengidentifikasi lima syarat informan yang baik yaitu (1) Enkulturasasi penuh yakni mereka yang dijadikan informan adalah mereka yang memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga informan bukan hanya sekedar mengetahui namun juga menghayati. (2)

Informan yang dipilih merupakan informan yang berkecimbung dalam kegiatan

yang diteliti. (3) Non analitik yakni informan yang mempertahankan diri sebagai insider dari kegiatan bukan informan yang memposisikan diri sebagai outsider. (4)

Informan mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk diminta keterangan (Agus, 2006). Peneliti menentukan beberapa informan dengan mempertimbangkan karakteristik yang diusulkan oleh Spradley(Faisal, 1999).

Dalam penerapan di lapangan, peneliti juga menentukan yang lebih spesifik, yaitu : Informan yang telah ditentukan merupakan warga Kampung Pulo yang ikut menolak program relokasi. Dalam penelitian ini informan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Informan kunci Informan kunci adalah orang yang dirasa dapat memberikan pandangan tentang informan-informan lain. Dan banyak mengetahui tentang kondisi masyarakat serta dinamika penolakan relokasi yang terjadi di Kampung Pulo, yaitu : Tokoh Kampung Pulo.
- 2) Informan utama, Informan utama adalah seseorang yang memberikan data-data mendalam tentang fenomena yang menjadi topik penelitian. Yakni terkait dengan penolakan relokasi, yaitu : Warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi ke Rusun.
- 3) Informan tambahan. Informan tambahan digunakan untuk melihat atau membandingkan data yang sebelumnya diperoleh dari informan utama. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Staff Kelurahan Kampung Melayu.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Latar belakang	Status
1	AO	Tokoh Kampung Pulo	Informan Kunci
2	IS	Tokoh Kampung Pulo	Informan Kunci

3	U	Warga Kampung Pulo	Informan Utama
4	F	Warga Kampung Pulo	Informan Utama
5	I	Warga Kampung Pulo	Informan Utama
6	Y	Warga Kampung Pulo	Informan Utama
7	H	Staff Kelurahan Kampung Melayu	Informan Tambahan

Sumber : *Pengolahan Data Pribadi, 2017*

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam metode studi kasus menurut Robert K. Yin terdapat tiga teknik analisis, yaitu: penjadohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu (Yin, 2015). Masing-masing strategi tersebut dapat diterapkan pada penelitian kasus tunggal maupun multikasus. Dengan beberapa pertimbangan, penelitian studi kasus deskriptif akan lebih relevan dengan logika penjadohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data internal dengan pola yang diprediksikan atau dengan beberapa prediksi alternatif jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Dalam tahap ini peneliti berusaha membandingkan apa yang ada di lapangan dengan apa yang ada dalam wacana dapat dikatakan juga sebagai apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Sehingga setelah melakukan tahap penjadohan pola, peneliti akan menemukan kesimpulan yang sesuai dengan analisis (Yin, 2015).

Penerapan teknik ini digunakan dalam melihat asumsi dasar atau proposisi yang muncul dalam observasi awal penelitian. Proposisi awal dalam penelitian ini yang dibentuk oleh peneliti adalah tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial. Dan tindakan penolakan yang

dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan solidaritas antar warga Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi. Penjodohan pola nantinya dilakukan berdasarkan data di lapangan dengan proposisi-proposisi awal yang telah dibuat sebelumnya. Penjodohan pola ini dapat dilakukan secara sederhana seperti dengan teknik "bola mata" saja setelah dipandang cukup meyakinkan untuk menarik suatu kesimpulan (Yin, 2015). Penjodohan pola yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah dengan cara membandingkan proposisi yang diprediksikan dengan proposisi yang didasarkan atas kejadian. Jika dalam penelitian ini ditemukan banyak kesamaan, maka hasil penelitian ini akan menguatkan validitas data penelitian mengenai tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI. Teknik penjodohan pola yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut (Yin, 2008):

1. Membuat suatu pernyataan proposisi awal;

Proposisi awal yang dibuat oleh peneliti di dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial. Dan tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber

daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan solidaritas antar warga

Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi.

2. Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan proposisi awal;
3. Memperbaiki pernyataan atau proposisi;
4. Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka perbaikan tersebut;
5. Memperbaiki lagi pernyataan atau proposisi;
6. Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta dari kasus dan mengulangi proses ini sampai batas yang diperlukan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Permasalahan Relokasi

Permasalahan relokasi yang terjadi di Kampung Pulo sejak pertama kalinya kebijakan relokasi ini dikeluarkan oleh Pemprov DKI pada bulan Agustus tahun 2014 tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk membenahi permukiman Kampung Pulo serta menormalisasikan kembali Kali Ciliwung, dengan mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat belum juga terselesaikan sepenuhnya sampai saat ini. Dalam mengeluarkan kebijakan ini, Pemprov DKI beralasan relokasi Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana Pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung.

Rencana normalisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo, demi mewujudkan Jakarta yang bersih dari permukiman Kampung Kota dan bebas banjir (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2014).

Kebijakan relokasi ini juga muncul karena permasalahan klasik permukiman Kampung Kota yang sejak lama telah berkembang di Jakarta. Keberadaan Kampung Pulo, yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur selama ini telah menjadi masalah perkotaan, Ini disebabkan karena Kampung Pulo yang merupakan Kampung Kota terletak tepat

di bantaran Kali Ciliwung yang seharusnya di bantaran Kali Ciliwung ini, bebas dari bangunan permukiman. Masalah perkotaan tersebut kemudian menjadi masalah sosial, karena menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan rendahnya kualitas lingkungan Kampung Pulo. Sehingga menyebabkan Kelurahan kampung Melayu menjadi salah satu daerah yang mengalami kerugian paling besar akibat banjir.

Pemprov DKI sebagai aktor yang merumuskan kebijakan relokasi Kampung Pulo memiliki pandangan yang berbeda dengan warga Kampung Pulo sebagai aktor yang menolak program relokasi, terkait dengan pandangan mengenai arti relokasi. Arti relokasi bagi Pemprov DKI, adalah program relokasi ini bertujuan untuk membenahi Kampung Pulo dengan memindahkan warga Kampung Pulo ke rumah susun yang layak huni dan sehat. Dengan rumah susun yang layak huni, sehat, dan tidak berada di bantaran Kali, warga Kampung Pulo akan terbebas dari banjir yang setiap kali hujan turun menghampiri rumah mereka, dan program relokasi ini juga dapat meningkatkan kesehatan serta kualitas lingkungan warga Kampung Pulo. Pernyataan mengenai arti relokasi di atas juga disampaikan oleh bapak H yang merupakan staff Kelurahan kampung melayu, yang menjadi perwakilan dari Pemprov DKI dalam mensosialisasikan program relokasi Kampung Pulo. Mengenai arti relokasi, bapak H menyatakan bahwa :

“Kalau relokasi menurut saya sebagai pihak dari pemprov ya sebetulnya program ini memiliki tujuan yang baik. Warga Kampung Pulo yang selama ini selalu kebanjiran, selalu menjadi sorotan media, sorotan warga jakarta dan menjadi perhatian khusus bagi kita karena masalah banjir yang telah melanda kampung ini setiap tahunnya bahkan hampir setiap hari saat musim hujan itu ngga pernah selesai. Kita coba liat dampaknya, waktu banjir itu gimana? Hampir semua rumah terendam, ngga tanggung-tanggung bahkan sampe satu lantai kan bisa terendam karena mereka tinggal di bantaran kali. Dampaknya

bagi kesehatan mereka itu bagaimana? Banyak kan yang kena diare, gatel-gatel waktu itu ditanganin sama orang puskesmas sama relawan juga waktu abis banjir banjir. Kemudian dengan adanya program relokasi ini, warga Kampung Pulo dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat dan Rusun lainnya yang telah disediakan, program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di Kampung Pulo. Maksud kita (pemprov) disini bukannya menggusur, kita kan mengganti dengan unit Rusun yang telah disediakan. Seperti yang kemarin yang sudah direlokasi sebelumnya, itu kan kita kasih mereka unit Rusun satu persatu, kita pake sistem undian pembagian kamar dan lantainya. Buat apa? Ya buat memperbaiki kondisi warga Kampung Pulo itu tadi. Nah begitu garis besarnya.”(Wawancara, 10 April 2017)

Tujuan Pemprov DKI sebagai aktor yang merumuskan kebijakan relokasi Kampung Pulo, adalah untuk membenahi Kampung Pulo dengan memindahkan warga Kampung Pulo ke rumah susun yang layak huni dan sehat. Dengan rumah susun yang layak huni, sehat, dan tidak berada di bantaran kali, warga Kampung Pulo akan terbebas dari banjir yang setiap kali hujan turun menghampiri rumah mereka, dan program relokasi ini juga dapat meningkatkan kesehatan serta kualitas lingkungan warga Kampung Pulo. Program relokasi ini juga bertujuan untuk menormalisasi sungai Ciliwung. Rencana normalisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo, demi mewujudkan Jakarta yang bersih dari permukiman Kampung Kota dan bebas banjir (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2014). Tujuan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh bapak H yang merupakan staff Kelurahan kampung melayu, yang menjadi perwakilan dari Pemprov DKI dalam mensosialisasikan program

relokasi Kampung Pulo. Bapak H dalam wawancara bersama peneliti, menyampaikan bahwa :

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tujuan pemprov dengan adanya program relokasi ini adalah memperbaiki kondisi warga Kampung Pulo. Dengan dipindah ke Rusun, mereka akan terbebas dari banjir. Mereka tidak perlu lagi repot-repot untuk mengungsi. Dari segi fasilitas, fasilitas yang telah kita sediakan di Rusun juga lebih baik dibandingkan dengan di Kampung Pulo. dari segi kesehatan mereka akan terbebas dari penyakit yang biasa mereka alami setiap musim penghujan dan banjir terutama. Dari segi ekonomi, mereka akan mendapatkan subsidi dan dana bantuan sosial dari kita setiap bulannya. Dari segi sosial juga taraf hidup mereka otomatis lebih baik dibandingkan dengan di Kampung Pulo. Dengan dipindahkannya mereka ke Rusun, rumah-rumah mereka ini yang berada di bantaran Kali Ciliwung akan kita bongkar untuk melebarkan bantaran kali dan terutama untuk normalisasi Kali Ciliwung yang selama puluhan tahun ini bantarannya dipenuhi permukiman-permukiman warga. Normalisasi Kali Ciliwung ini juga merupakan upaya kita dalam mewujudkan jakarta yang bersih dan bebas dari banjir.” (Wawancara, 10 April 2017)

Kemudian, pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak TI Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, bapak TI menyampaikan bahwa :

“Proyek normalisasi Ciliwung bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi kondisi normal yakni antara 35 - 50 meter. Dengan demikian diharapkan kapasitas tampung air menjadi meningkat dari 200 m³/detik menjadi 570 m³/detik. Pekerjaan normalisasi Sungai ini meliputi perkuatan tebing, pembuatan tanggul, dan jalan inspeksi (6 -8 meter) serta penataan kawasan di sepanjang sisi Sungai. Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung tidak hanya pekerjaan kontruksi untuk mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta, namun juga bertujuan agar di masa depan Kali Ciliwung menjadi Kali yang bersih dimana ikan-ikan bisa hidup. Saat ini yang hidup di Kali Ciliwung hanya satu jenis ikan yaitu ikan sapu-sapu, padahal dimasa lalu banyak jenis ikan yang ada di Kali Ciliwung”

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam mencapai tujuan dari program relokasi, tindakan yang dilakukan pemprov DKI adalah

seperti yang disampaikan oleh bapak H. Berikut pernyataan bapak H terkait dengan tindakan Pemprov DKI :

“Kalau berbicara soal tindakan, tindakan yang kita lakukan sebagai pemerintah DKI Jakarta ya sesuai dengan undang-undang. Tanah yang ditempati oleh warga Kampung Pulo itu kan milik pemprov dan sebagian milik tanah adat. Program relokasi ini juga ada bukan tanpa alasan, kebijakan ini sudah dirancang lama sejak 2014, namun pelaksanaannya baru saat pak ahok jadi Gubernur sekarang ini. Kita berkaca dari relokasi Kampung Pulo yang sebelumnya ya, kan udah ada sebagian yang di pindah ke Rusun sini. Sebelum adanya program ini, tindakan yang kita lakukan pastinya adalah sosialisasi. Sosialisasi ini terkait dengan maksud dari tujuan program relokasi ini, kemudian kita kasih surat ke rumah warga, kita datengi rumah warga, RT dan RW nya juga semua kita panggil ke kecamatan terkait pelaksanaan program ini. Tindakan kita dalam melaksanakan program relokasi ini bukan dengan cara yang represif, secara tiba-tiba mengusir warga Kampung Pulo. Relokasi yang kemarin juga kan baru 3 tahun setelah program muncul baru bisa dilaksanakan, itu juga belum semuanya hanya sebagian warga Kampung Pulo yang berhasil kita pindahkan ke rusun. Masih banyak warga yang menolak direlokasi kan dari 9 RW yang ada. Yang kemarin berhasil juga bukan tanpa masalah, kita juga di protes warga karena kita tidak mengganti rugi ke mereka. Sedangkan Gubernur sendiri sudah mengatakan bahwa mereka akan diganti, digantinya bukan berbentuk uang tapi diganti dengan unit rusun. Sampai waktu itu ricuhkan warga saat eksekusi sebagian wilayah Kampung Pulo, sampe bentrok warga sama aparat. Kita menurunkan aparat juga karena kita sudah tidak bisa lagi nahan tindakan anarkis warga yang sampe bakar alat berat, kita juga takut kita yang jadi korban nantinya. Makanya kita bertindak dengan menurunkan aparat keamanan, polisi, tentara, dan satpol pp juga ikut membantu kita saat eksekusi tahun 2015 yang lalu.” (Wawancara, 10 April 2017)

Kemudian bapak H juga menyampaikan, bahwa :

“Kemudian setelah sebagian wilayah Kampung Pulo berhasil kami relokasi ke rusun, bukan berarti program kita telah selesai. Karena kita masih harus merelokasi sebagian warga Kampung Pulo lagi, yang sampai tahun ini belum juga terealisasi. Setelah kita memindahkan sebagian warga Kampung Pulo, kita mulai merapihkan bantaran Kali Ciliwung. Ini juga salah satu tujuan yang ingin dicapai pemprov dari relokasi ini, kita dapat menata kembali Ciliwung, kita normalisasi agar

banjir di Jakarta dapat berkurang dan permukiman liar di bantaran kali juga bisa dirapihkan. Tindakan yang kita lakukan selama dua tahun belakangan ini, adalah kita memperbaiki bantaran Ciliwung, kita juga membersihkan sampah-sampah yang ada di bantaran Ciliwung khususnya dari wilayah Kampung Pulo sampe pintu air manggarai. Sambil kita terus kerjakan normalisasi Ciliwung ini, juga kita tetap berupaya merelokasi sebagian warga Kampung Pulo lagi. Tindakan kita juga tetap sesuai dengan prosedur relokasi seperti yang sebelumnya dan soal penggantian juga Pemprov DKI menegaskan tidak akan mengganti rumah warga yang terkena relokasi dengan uang. Kenapa Pemprov tidak mengganti dengan uang? Karena tanah yang ditempati warga ini merupakan milik pemerintah, memang ada sebagian tanah yang diakui warga sebagai miliknya, tapi itu tanah adat yang belum bersertifikat. Maka dari itu Pemprov DKI tetap akan mengganti dengan unit rusun yang telah disediakan sebelumnya.“ (Wawancara, 10 April 2017)

Dari tindakan dan tujuan yang telah disampaikan di atas, tindakan yang dilakukan Pemprov DKI dalam upayanya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat, Tindakan tersebut dianggap Pemprov DKI telah sesuai dengan Undang-Undang. Tindakan relokasi tersebut dilakukan bukan dengan cara represif, melainkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga Kampung Pulo, yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemprov DKI juga beralasan bahwa tanah yang ditempati oleh warga Kampung Pulo merupakan milik pemprov DKI, dan sebagian tanah merupakan tanah adat, sehingga Pemprov DKI tidak memberikan ganti rugi berupa uang kepada warga yang direlokasi.

Tujuan yang disampaikan oleh Pemprov DKI dari adanya kebijakan relokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat, adalah Pemprov DKI bertujuan untuk menata permukiman Kampung Pulo yang berada di bantaran kali Ciliwung. Dengan rumah susun yang layak huni, sehat, dan tidak berada di bantaran kali, warga Kampung Pulo akan terbebas dari banjir yang setiap kali hujan turun menghampiri rumah mereka, dan program relokasi ini juga dapat

meningkatkan kesehatan serta kualitas lingkungan warga Kampung Pulo. Penataan ini juga bertujuan untuk menormalisasikan Kali Ciliwung dari Permukiman liar dan agar banjir di Jakarta dapat berkurang. Namun, relokasi yang dilakukan Pemprov DKI dalam upayanya mewujudkan tujuan yang ada dalam Perda dan memecahkan masalah sosial yang selama ini ada di Kampung Pulo, sulit sekali terwujud. Dikarenakan adanya penolakan oleh warga Kampung Pulo sebagai aktor terhadap program relokasi ke rumah susun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Warga Kampung Pulo sebagai aktor menolak dipindah ke Rusun Jatinegara Barat dengan berbagai macam alasan dan tujuan yang ingin dicapai dari pilihannya untuk tetap bertahan di Kampung Pulo dan menolak dipindah ke Rusun Jatinegara Barat. Untuk mencapai tujuan dari penolakan program relokasi ke Rusun, warga Kampung Pulo sebagai aktor juga melakukan tindakan efektif demi mencapai tujuan dari pilihannya menolak dipindah ke Rusun Jatinegara Barat dan tetap bertahan di Kampung Pulo.

4.2 Gambaran Umum Permukiman Kampung Kota

Permukiman Kampung Kota merupakan suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia. Dengan ciri antara lain: penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya. Permukiman Kampung Kota merupakan permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi

kota. Apabila dikaji berdasarkan strukturnya, Kampung Kota merupakan salah satu elemen pembentuk kota.

Beranjak dari paradigma perencanaan kota, Kampung Kota sebenarnya dapat menjadi awal dimulainya paradigma baru perencanaan kota dalam mewujudkan kota yang lebih baik. Kampung dengan segala aktivitasnya, sedikit banyak dapat memberi gambaran bagaimana kehidupan urban yang terjadi. Kepadatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota. Perilaku padat dapat dilihat pada kampung-kampung di perkotaan, dengan perbandingan kebutuhan ruang-ruang terbuka yang minim, derajat ketertutupan ruang dan keterdekatan antar bangunan. Disadari atau tidak, kepadatan dan keterbatasan memberikan kreativitas bagi manusia penghuninya untuk bertindak dan berperilaku. Secara fisik kondisi Kampung Kota saat ini pada umumnya buruk.

Kondisi ini terutama dipicu masalah kepadatan dan tidak terorganisirnya struktur fisik lingkungan Kampung Kota tersebut. Ketiadaan struktur formal teritorialitas ini sering dikaitkan dengan permukiman ilegal. Dengan kata lain tidak terstrukturnya permukiman Kampung Kota dikarenakan tidak adanya penataan ruang yang didukung oleh infrastruktur yang terprogram secara formal. Ciri-ciri permukiman Kampung Kota adalah permukiman Kampung Kota sering kali disebut sebagai permukiman sektor informal karena banyak dihuni oleh orang-orang dengan pekerjaan yang bergerak dibidang informal dan juga sering disebut sebagai lingkungan yang miskin struktur, tidak, teratur, dan terkesan Kampung Kota jika dilihat dari lingkungan fisik arsitektural permukiman Kampung Kota (Wiryoartono, 1999).

Dalam konteks penelitian ini, Lokasi penelitian yang berada di Kampung Pulo ini termasuk dalam kategori permukiman Kampung Kota, yang mana Kampung Pulo berada pada lahan legal dengan kualitas lingkungan fisik sarana dan prasarana yang rendah dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat dilihat dari ciri Kampung Pulo, dimana tingkat frekuensi dan volume kepadatan warga yang tinggi di Kampung Pulo dengan luas wilayah 8.575 hektar yang ditempati oleh 12.828 warga yang terdiri dari 3096 kepala keluarga(Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Kemudian fasilitas umum yang ada di Kampung Pulo kondisinya juga tidak memadai, seperti sistem drainase, tempat MCK(Mandi,Cuci,Kakus) yang tidak di miliki masing-masing warga Kampung Pulo di rumah mereka sendiri dan memanfaatkan bantaran Kali sebagai tempat mereka untuk melakukan kegiatan MCK setiap harinya. Kondisi hunian rumah dan permukiman yang sempit dan padat penduduk, juga menunjukkan bahwa warga Kampung Pulo termasuk dalam kategori warga yang kurang mampu atau miskin, sebagaimana ciri-ciri yang termasuk kategori Kampung Kota.

4.3 Gambaran Umum Kampung Pulo

Lokasi penelitian ini berada di Kampung Pulo, secara administratif Kampung Pulo berada di Kelurahan Kampung Melayu merupakan bagian dari Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Batas-batas wilayah Kelurahan Kampung Melayu sebagai berikut:

- Utara : Kelurahan Manggarai.
- Selatan : Ciliwung dan Kelurahan Bidaracina.
- Barat : Ciliwung dan Kelurahan Bukit Duri.
- Timur : Jalan Jatinegara Barat dan Kelurahan Balimester.

Di sebelah barat Kampung Pulo, terdapat Kelurahan Bukit Duri yang dipisahkan oleh Kali Ciliwung. Di sebelah timur terdapat Kelurahan Balimester yang juga dipisahkan oleh Jalan raya Jatinegara Barat dengan Kampung Pulo.

Disebelah selatan Kampung Pulo terdapat Kelurahan Bidara Cina yang juga termasuk dalam daerah aliran Kali Ciliwung. Sebagian tempat tinggal di kawasan

Kampung Pulo terbuat dari bahan semi permanen. Dan sebagiannya terbuat dari bahan permanen seperti batako dan batu bata. Daerah ini merupakan daerah yang

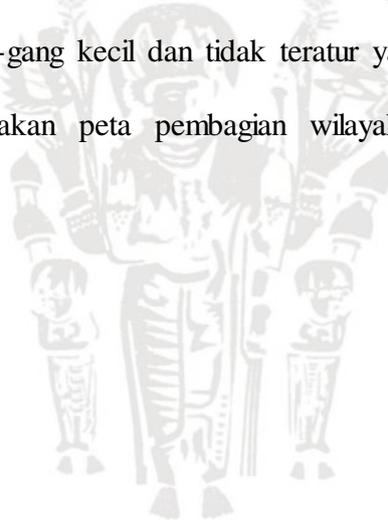
padat. Pada dasarnya terdapat jalur utama di Kampung Pulo yang mengitari

wilayah ini. Namun, jumlah jalur utama ini tidak lebar dan hanya cukup untuk dilewati oleh dua sepeda motor sehingga mobil tidak dapat masuk. Di Kampung

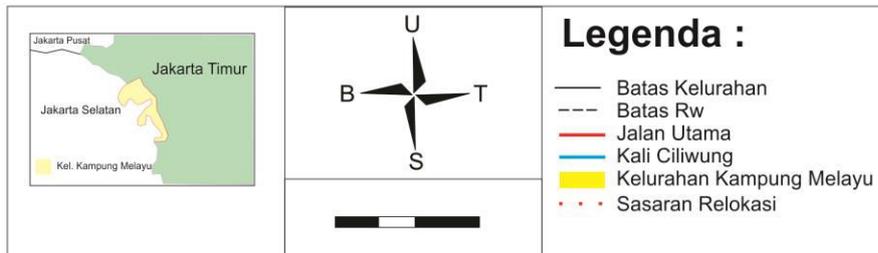
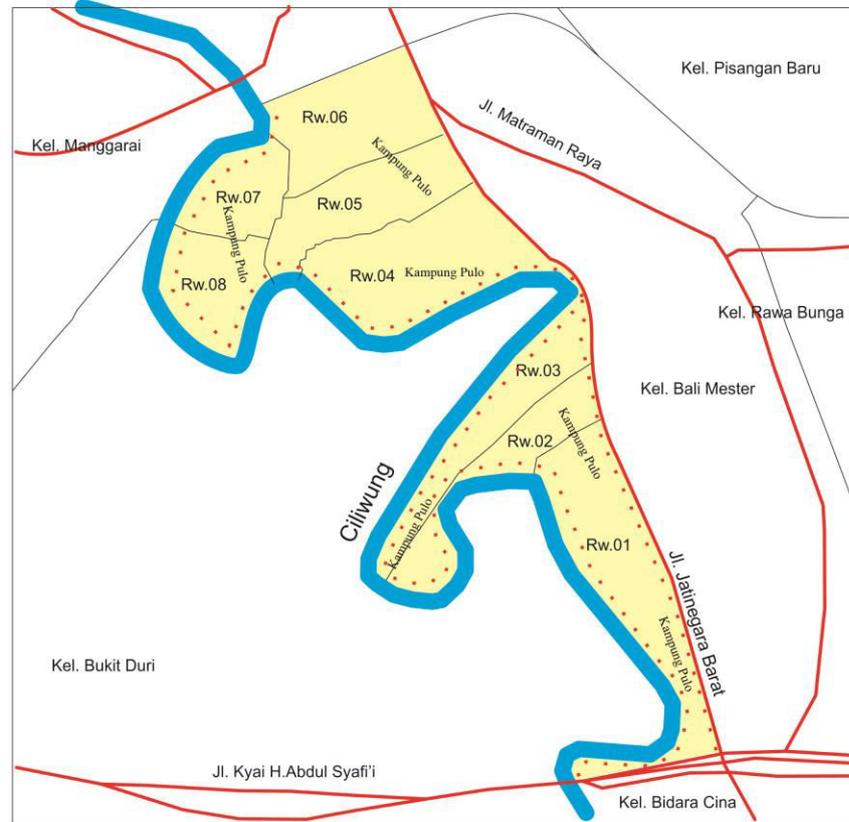
Pulo juga banyak gang-gang kecil dan tidak teratur yang menjadi cabang dari jalur

utama. Berikut merupakan peta pembagian wilayah administratif di Kelurahan

Kampung Melayu :



Administrasi Kelurahan Kampung Melayu

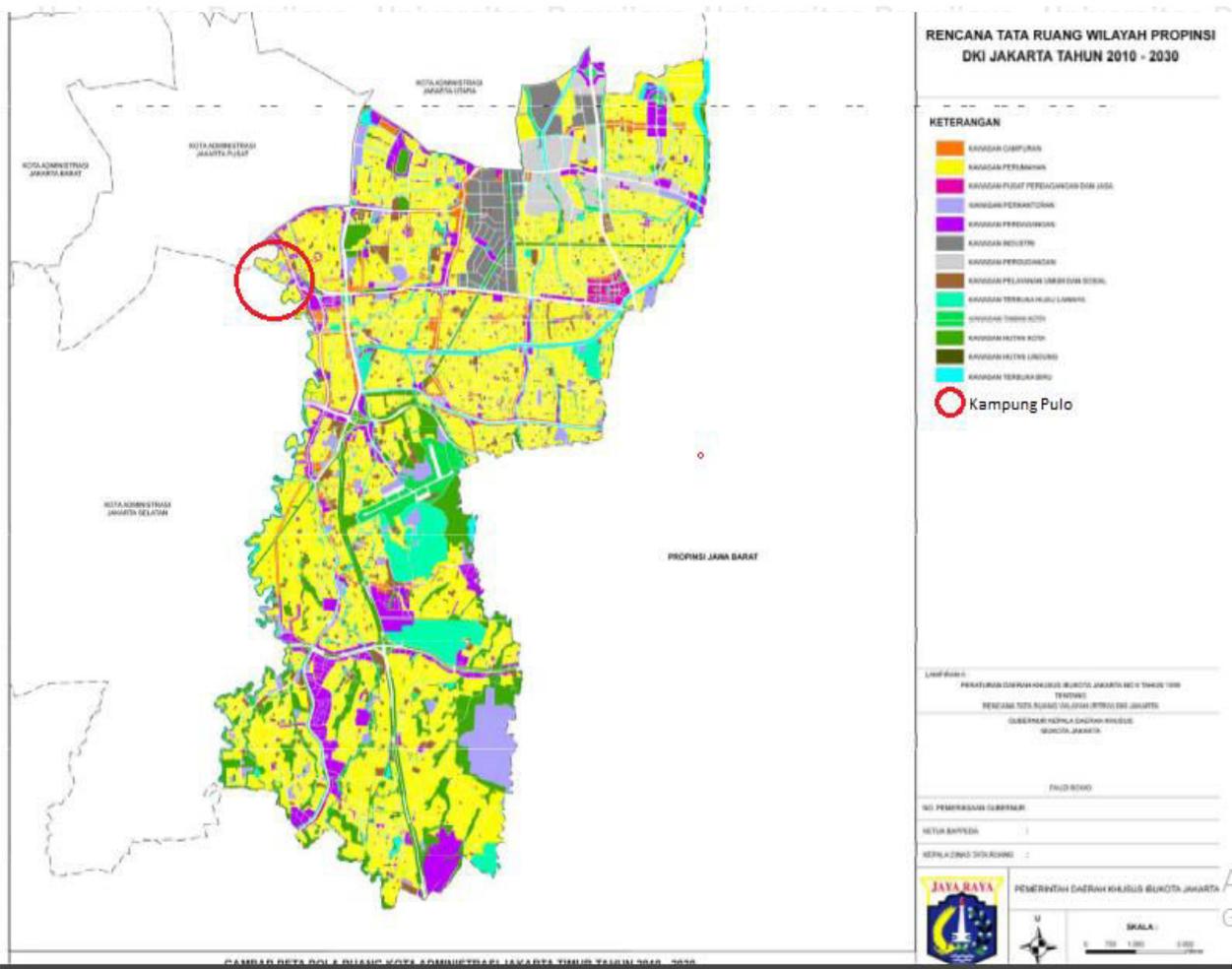


Gambar 1 : Peta pembagian wilayah administratif di Kelurahan Kampung Melayu

Sumber : Pengolahan Data Pribadi, 2017

Dalam peta rencana tata ruang ruang wilayah(RTRW) DKI Jakarta, permukiman Kampung Pulo yang berada dalam lingkaran merah pada Gambar 2 juga termasuk dalam kawasan perumahan atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI dalam rencana tata ruang ruang DKI Jakarta tahun 2010.

sampai dengan tahun 2030 yang akan datang. Dalam peta tersebut, permukiman Kampung Pulo tidak termasuk dalam wilayah yang akan direlokasi atau termasuk kawasan terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI, dimana kawasan terbuka hijau tersebut tidak diperuntukan bagi permukiman. Berikut merupakan peta rencana tata ruang ruang wilayah(RTRW) DKI Jakarta tahun 2010-2030 :



Gambar 2 : Peta Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah(RTRW) DKI Jakarta

Sumber : Pengolahan Data Pribadi, 2017

Luas wilayah Kampung Pulo kurang lebih sekitar 0,40 Km² dari total keseluruhan luas Kelurahan Kampung Melayu yang mencapai 0,48 Km², yang terbagi atas 9 Rukun Warga (RW) dan 112 Rukun Tetangga(RT). Dan terdapat 31 Rukun Tetangga(RT) yang terletak di sepanjang bantaran Kali Ciliwung yang mana wilayah ini merupakan wilayah yang sering dilanda banjir dan merupakan lokasi yang masuk dalam wilayah yang akan direlokasi. Berikut tabel pembagian jumlah RT dan RW di Kelurahan Kampung Melayu :

Tabel 3. Pembagian jumlah RT dan RW

No	RW	Jumlah RT	Jumlah RT di Bantaran Kali
1.	01	2	0
2.	02	8	0
3.	03	10	7
4.	04	14	3
5.	05	11	3
6.	06	12	2
7.	07	18	9
8.	08	16	7
9.	09	21	0
Jumlah		112	31

Sumber : Data Pengolahan Data Pribadi, 2017

Dengan kondisi geografis tersebut, membuat Kelurahan Kampung Melayu dinyatakan sebagai salah satu Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan banjir yang relatif parah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, 2007). Permukiman yang padat dan gang yang sempit membuat banjir menjadi mudah meninggi, terutama di titik-titik yang tidak terdapat tanah lapang. Akibatnya, banyak penduduk yang terpaksa mengungsi di lantai dua rumahnya atau ke tempat-tempat pengungsian di sekitar jalan raya. Berdasarkan data

penduduk Kelurahan Kampung Melayu 2016, untuk masalah kepemilikan tanah di Kampung Pulo, sebagian besar tanah merupakan tanah negara dan sisanya adalah tanah Adat dengan bagian luas 0,32 Km² tanah negara dan 0,8 km² tanah “Adat”. Status kepemilikan tersebut menandakan sebagian besar penduduk hanya menggunakan hak guna bangunan. Berikut adalah keterangan status kepemilikan tanah dan bangunan di Kampung Pulo yang terkena relokasi :

Tabel 4. Keterangan status kepemilikan tanah dan bangunan di Kampung Pulo

Luas Tanah yang terkena Dampak Relokasi Kampung Pulo – Jatinegara	
Luas 25.218,4 M ² dari Luas Keseluruhan 85.751 M ³	
Luas 266	M ² : Hak Guna Bangunan (SHGB) : Hak Milik
Luas 6	M ² (SHM) : Akte Jual Beli Notaris
Luas 255	M ² (AJB)
Luas 4.051	M ² : Surat Perjanjian Jual Beli
Luas 4.891	M ² : Surat Perjanjian Kepemilikan
Luas 134	M ² : Hibah : Lain-
Luas 1.424	M ² lain
Luas 22	M ² : Wasiat
Luas 14.169	M ² : Tanpa Keterangan

Sumber : Pengolahan Data Pribadi, 2017

Kemudian, untuk penggunaan tanah yang ada di Kelurahan Kampung Melayu, sebagian besar digunakan untuk permukiman, sedangkan sisanya untuk daerah komersil seperti pasar dan pertokoan. Dalam persentase, permukiman sebesar 95% dan 5% untuk fasilitas umum dan fungsi ekonomi (Data Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Mengenai status kepemilikan tanah disampaikan pula oleh bapak H yang merupakan Staff Kelurahan Kampung Melayu yang juga

merupakan informan tambahan dalam penelitian ini, Bapak H juga mengatakan bahwa:

“Tanah di Kelurahan Kampung Melayu ini, yang juga termasuk Kampung Pulo di dalamnya, merupakan tanah milik negara secara keseluruhan. Namun, sebagian besar warga Kampung Melayu merasa tanah tersebut miliknya karena mereka sudah tinggal di sana secara turun temurun dan sejak mereka lahir mereka sudah menempati kampung tersebut.” (Wawancara, 10 April 2017)

Keberadaan institusi ekonomi kawasan pusat usaha Jatinegara juga membuat Kampung Pulo menjadi strategis. Warga Kampung Pulo banyak mengantungkan nasib untuk mencari nafkah di kawasan tersebut. Jarak terdekat dari Kampung Pulo ke Pusat Usaha Jatinegara sekitar 100 m atau 5 menit dengan berjalan kaki. Jarak terjauh sekitar 1,5 km atau sekitar 25 menit dengan berjalan kaki. Kawasan Pusat Usaha Jatinegara ini berisikan berbagai jenis perdagangan dalam bentuk eceran maupun grosir, kantor dagang, pabrik, gudang, dan pasar tradisional. Berikut merupakan gambar kawasan pusat usaha Jatinegara yang terletak di seberang Kampung Pulo:



Gambar 3: Kawasan Pusat Usaha Jatinegara

Sumber : Dokumentasi Pribadi, Sabtu 1 April 2017

Selain dekat dengan kawasan pusat usaha Jatinegara, letak Kampung Pulo yang sangat berdekatan dengan Terminal Kampung Melayu juga membuat Kampung Pulo menjadi strategis. Keberadaan Terminal Kampung Melayu juga cukup menunjang transportasi warga Kampung Pulo, transportasi menuju Kampung Pulo juga dapat ditempuh dengan berbagai alat transportasi yang tersedia dengan melalui Jalan Raya Jatinegara Barat, Jalan Matraman Raya, Jalan Raya Jatinegara Timur. Transportasi yang melewati Jalan Raya Jatinegara Barat cukup beragam mulai dari angkot, bus besar, dan jenis lainnya yang beroperasi hingga 24 jam. Keberadaan Terminal Kampung Melayu ini juga yang membuat arus transportasi yang melewati wilayah ini tidak pernah sepi. Berikut merupakan gambar Terminal Kampung Melayu :



Gambar 4 : Terminal Kampung Melayu

Sumber : Dokumentasi Pribadi, Sabtu 1 April 2017

4.3.1 Sejarah Kampung Pulo

Salah satu permukiman Kampung Kota di Jakarta yang terkenal sejak tahun 1930 adalah Kampung Pulo. Sejak tahun 1930, sebelum masa kemerdekaan mayoritas kampung ini dihuni oleh etnis Betawi dan sejak tahun 1970-an banyak warga pendatang dari daerah Bogor, yang berasal dari etnis Tionghoa, juga warga keturunan Arab, Padang, dan Batak menempati wilayah ini (Data Lembaga swadaya masyarakat Ciliwung Merdeka, 2015). Sejarah Kampung Pulo juga tidak terlepas dari keberadaan Kampung Melayu yang merupakan Kelurahan dari wilayah Kampung Pulo. Sejarah Kampung Melayu tidak lepas dari perkembangan sebuah wilayah yang bernama Meester Cornelis yang kini dikenal dengan nama Jatinegara. Pada awalnya tempat ini bernama Meester Cornelis, Pada bulan-bulan pertama pendudukan Jepang melalui Osamu Serei bersamaan dengan diubahnya Batavia menjadi Jakarta, Meester Cornelis diubah jadi Jatinegara. Seperti yang dipaparkan oleh Ananta (2005, hal. 53), bahwa :

“Nama Meester Cornelis adalah nama orang Indonesia dari Banda. Ia datang ke Batavia sebagai tawanan perang Kompeni Belanda. Nama pribadinya adalah Cornelis Senen. Nama depan Meester sebenarnya tak lain dari gelar yang diberikan kepadanya oleh Kompeni. Sama dengan Master dalam bahasa Inggris. Jabatannya sejak di Banda adalah penginjil/guru agama. Gelar Meester diberikan kepadanya karena dalam kawasan Nusantara dikuasai Kompeni Belanda ia satu-satunya yang menguasai bahasa Portugis, Spanyol, dan konon juga Inggris dan Belanda. Dengan bahasa-bahasa yang dikuasainya ia menjadi imam Katholik yang bisa melayani orang-orang "Portugis", yaitu orang-orang Afrika bekas tawanan Kompeni Belanda dan orang-orang Mardijkers, yaitu orang-orang India tawanan Kompeni Belanda yang dilepas sebagai orang “mardika” di Batavia. Karena jasa-jasanya, Belanda mengkaruniainya sebidang tanah di tempat yang kemudian dinamai Meester Cornelis pada 1661. Tidak jelas mengapa nama aslinya, Senen, tidak pernah dicantumkan.”

Wilayah ini mulai masuk ke dalam catatan sejarah Batavia pada pertengahan abad ke-16. Wilayah Jatinegara pada saat itu masih berupa hutan. Untuk memenuhi kebutuhan Batavia, maka diberikanlah izin untuk pembukaan hutan di wilayah tersebut. Wilayah tersebut kemudian dikelola oleh Cornelis Senen yang akhirnya wilayah tersebut menjadi semacam wilayah satelit bagi Batavia. Seiring dengan pembukaan lahan hutan, maka berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut sehingga banyak berdatangan para pekerja dari luar Batavia, bahkan luar Jawa. Dan mayoritas dari mereka berasal dari Semenanjung Melayu.

Pada pertengahan abad ke-16, seiring dengan pembukaan lahan hutan tersebut, kumpulan orang melayu membuat permukiman di wilayah Meester Cornelis yang saat ini dikenal sebagai Kampung Pulo. Wilayah Kampung Melayu dikenal sebagai wilayah permukiman penduduk sejak lama. Wilayah ini di zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai bagian dari wilayah Meester Cornelis atau Jatinegara. Sejak zaman dulu, di wilayah ini sudah dibangun sekolah, pasar,

kantor pos, wilayah militer, dan stasiun kereta api. Wilayah Meester Cornelis cukup berkembang saat itu karena wilayah ini adalah wilayah satelit dari kota Batavia Lama, yang sekarang terletak di wilayah kota tua Jakarta (Pratiwi, 2008).

Yang kemudian sampai dengan saat ini terus berkembang yang ditandai dengan keberadaan institusi ekonomi seperti pasar Jatinegara, institusi pendidikan, serta semakin padatnya permukiman yang berada di Kelurahan Kampung Melayu terutama di wilayah Kampung Pulo.

4.4 Kondisi Ekologis Kampung Pulo

Kampung Pulo terletak di bantaran Kali Ciliwung, yang daerah ini juga dilalui aliran Kali Ciliwung yang relatif lebar dan pada bantarnya merupakan tempat bermukim warga Kampung Pulo yang padat penduduk. Kondisi daya dukung lingkungan bantaran Ciliwung yang sudah tidak memadai untuk tempat bermukim, dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kampung Pulo menyebabkan penyempitan pada luas Kali Ciliwung yang melintasi wilayah Kampung Pulo. Sehingga menyebabkan debit air yang mengalir setiap kali hujan turun tertahan di wilayah Kampung Pulo dan menyebabkan debit air yang mengalir di Kali Ciliwung dari kiriman pintu air Katulampa Bogor tertahan ketika melintasi wilayah Kampung Pulo dan menyebabkan kampung ini selalu banjir.

Banjir di Kampung Pulo tidak pernah terlepas dari pengaruh daerah hulu Kali Ciliwung (Bogor, Puncak, dan sekitarnya), dimana Kampung Pulo merupakan daerah hilir dari aliran Ciliwung. Curah hujan yang besar dan degradasi lingkungan pada daerah hulu, membuat air yang mengalir ke Kampung Pulo (pada bagian hilir) seringkali tidak terbendung. Sehingga menyebabkan

Kampung Pulo sering mendapatkan “banjir kiriman”. Namun, di beberapa wilayah yang lebih tinggi, seperti di wilayah Rukun Warga RW 05 dan RW 06 relatif jarang banjir. Kondisi ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki jarak dari Kali yang relatif jauh dan memiliki beda tinggi yang cukup besar dengan wilayah yang sering banjir yaitu di wilayah RW 02,03 dan 04 dengan perbedaan ketinggian (sekitar 10-15 meter). Selain wilayah tersebut, wilayah lain yang tidak rawan tergenang yaitu terletak pada kelerengan yang lebih curam. Penyebabnya dikarenakan pada saat terjadi hujan, air mengalir lebih cepat ke tempat yang lebih rendah sehingga air tidak menetap lama di wilayah tersebut.

Banjir kiriman menurut warga Kampung Pulo sendiri, merupakan banjir yang berasal dari air kiriman yang mengalir Kali Ciliwung yang bersumber dari daerah hulu yaitu yang berasal dari kota Bogor. Banjir kiriman ini dianggap warga Kampung Pulo sebagai penyebab banjir yang selama ini terjadi di Jakarta, dan terutama sebagai penyebab banjir yang selama ini melanda Kampung Pulo. Banjir tersebut dianggap warga sebagai masalah yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah DKI dan juga Pemerintah Kota Bogor. Warga Kampung Pulo juga beranggapan bahwa, menyelesaikan masalah banjir kiriman tersebut bukan dengan cara merelokasi mereka ke Rusun. Karena mereka menganggap banjir yang selama ini melanda mereka bukan karena tempat tinggal mereka yang berada di bantaran Kali Ciliwung, melainkan karena luapan Kali Ciliwung akibat banjir kiriman dari hulu yang hampir setiap kali saat hujan lebat melanda permukiman mereka.

Permukiman Kampung Pulo juga memiliki kondisi bangunan tempat tinggal yang relatif beragam, mulai dari bentuk bangunan (yaitu permanen dan

tidak permanen), serta tingkat bangunan (terdiri dari 1 lantai hingga 3 lantai).

Umur bangunan tempat tinggal hingga mencapai lebih dari 20 tahun. Sedangkan kondisi jaringan jalan yang melewati Kampung Pulo, tidak beraspal dan sebagian berbahan semen (berbeton) dengan gang-gang kecil dan tidak teratur yang menjadi cabang dari jalur utama.

Mengenai kondisi drainase dan aliran Kali Ciliwung, keduanya tergolong relatif buruk akibat drainase serta rendahnya pemahaman masyarakat (seperti membuang sampah dan limbah langsung ke Kali Ciliwung). Sampah dan limbah rumahan misalnya, langsung dibuang ke drainase sehingga fisik drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih jauh, sampah dari pasar oleh para pedagang juga seringkali langsung dibuang ke Kali Ciliwung.

Jika dilihat dari kondisi fisik serta lingkungannya, Kampung Pulo termasuk dalam kategori permukiman Kampung Kota. Kampung Kota merupakan kawasan permukiman kumuh, suatu lingkungan tempat tinggal yang berkepadatan tinggi, terdiri atas kumpulan rumah dengan konstruksi bangunan temporer atau semi permanen, serta prasarana fisik lingkungan yang kurang memadai. Rumah-rumah ini pada umumnya berkualitas rendah dimana sebagian besar tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, keselamatan dan kebersihan. Kampung Kota juga merupakan tempat tinggal masyarakat kelas bawah, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah yang umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup, baik jumlahnya maupun kualitasnya (Widjaja, 2013). Kampung Pulo termasuk dalam kategori permukiman Kampung Kota, kondisi ini dapat dilihat dari kualitas lingkungan fisik sarana dan prasarana Kampung Pulo yang rendah dan cenderung menurun.

Kemudian ciri lainnya, adalah tingkat frekuensi dan volume kepadatan warga yang tinggi di Kampung Pulo dengan luas wilayah 8.575 hektar yang ditempati oleh 12.828 warga yang terdiri dari 3096 kepala keluarga. Seperti yang dipaparkan oleh Darmajanti&Starlita(2012, hal. 236) mengenai permukiman Kampung Kota, bahwa :

“Kota menjadi daya tarik dan sumber surplus ekonomi sehingga pribumi tertarik ke kota dan mencoba berperan dalam ekonomi kota. Namun keterbatasan sumberdaya pribumi menjadikan mereka sebagai kaum miskin kota atau kelompok berpenghasilan rendah. Dalam hal ini pribumi berdaptasi dan, melalui jaringan sosial yang dimilikinya, mewujudkan permukiman. Permukiman ini tercermin dengan adanya kampung-Kampung Kota yang semakin lama semakin padat, luas, dan ditandai dengan adanya kesamaan suku para penghuninya.”

Seperti yang disampaikan oleh Darmajanti&Starlita di atas, dimana Kampung Kota dari kondisi fisik merupakan permukiman berkepadatan tinggi yang semakin lama semakin padat jumlah warganya dan semakin bertambah luasnya, menandakan bahwa Kampung Pulo merupakan termasuk kategori permukiman Kampung Kota. Dimana Kampung Pulo sendiri, memiliki tingkat frekuensi dan volume kepadatan warga yang tinggi. Serta ditambah fasilitas umum yang ada di Kampung Pulo kondisinya juga tidak memadai, seperti sistem drainase, tempat MCK(Mandi,Cuci,Kakus) yang tidak di miliki masing-masing warga Kampung Pulo di rumah mereka sendiri dan memanfaatkan bantaran kali sebagai tempat mereka untuk melakukan kegiatan MCK setiap harinya.

4.5 Kondisi Sosial dan Kependudukan Kampung Pulo

Kampung Pulo merupakan permukiman yang padat penduduk. Kondisi rumah yang satu dengan yang lain saling berhimpitan, dan antar rumah yang berhadapan hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil atau gang selebar kira-kira

1,5 sampai dengan 2 meter. Permukiman ini dikelilingi oleh aliran Kali Ciliwung sehingga di waktu-waktu tertentu dimana di musim penghujan, hampir pasti wilayah ini akan mengalami banjir. Penduduk di Kampung Pulo umumnya didominasi oleh orang yang tinggal sejak lama, yaitu 3-5 generasi tinggal di daerah tersebut yang kebanyakan masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat.

Hal tersebut menandakan bahwa adanya ikatan sosial yang kuat antar sesama warga Kampung Pulo. Daerah asal penduduk relatif juga cukup beragam, yaitu berasal dari sekitar Jakarta, pulau Jawa, pulau Sumatera, ataupun memang lahir dan besar di Kampung Pulo.

Secara sosial, masyarakat di Kampung Pulo mempunyai hubungan kekerabatan yang erat karena di daerah tersebut terdapat banyak keluarga dan saudara sendiri yang tinggal satu rumah dan saling berdekatan, sehingga mereka sudah tidak canggung atau sungkan untuk berinteraksi dan berhubungan satu sama lain karena sudah tidak asing lagi. Pertumbuhan penduduk membuat kampung ini menjadi semakin padat hunian. Jumlah penduduk keseluruhan Kampung Pulo yaitu 12.828 jiwa dari jumlah total keseluruhan penduduk di Kelurahan Kampung Melayu dari 9 Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Kampung Melayu, yaitu sekitar 32.860 jiwa. Kepadatan penduduk di Kampung Pulo secara keseluruhan >12.000 Jiwa/km², yang tergolong relatif sangat padat. Penduduk Kelurahan Kampung Melayu paling banyak terdapat pada Rukun Warga RW 02, RW 03, dan RW 04 yang merupakan wilayah Kampung Pulo. Wilayah ini merupakan permukiman padat penduduk dan berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Berikut

merupakan permukiman Kampung Pulo yang berbatasan langsung dengan Kali

Ciliwung :



Gambar 5: Permukiman Kampung Pulo Yang Berbatasan Langsung Dengan Kali Ciliwung

Sumber : Dokumentasi Pribadi, Sabtu 1 April 2017

Dari tingkat pendidikan penduduk Kampung Pulo cukup bervariasi, dari yang tidak sekolah, belum sekolah, sampai yang berpendidikan sarjana. Di wilayah Kampung Pulo, banyak warga yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup tinggi sehingga mayoritas dari penduduk bekerja di sektor informal. Dari tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah, mayoritas masyarakat Kampung Pulo termasuk di dalam ekonomi menengah ke bawah yang dimana masyarakatnya juga tergantung pada Pasar Jatinegara dimana mereka bekerja sebagai pedagang, penjaga kios, kuli panggul, tukang parkir, dan lainnya.

Gambaran masyarakat Kampung Pulo secara ekonomi, juga terlihat dari bagaimana wilayah tersebut, penduduk Kampung Pulo sebagian besar merupakan warga kelas menengah ke bawah. Seperti pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu tokoh Kampung Pulo bapak AO dan Staff Kelurahan Kampung Melayu bapak

H, sebagai berikut :

“Untuk masalah ekonomi warga sini mah, yaa bisa dibilang menengah ke bawah lah ya, artinya dengan segala keterbatasan, pekerjaannya nggak tetap gitu maksudnya, warga di Kampung Pulo ini bekerjanya nggak formal karena keterbatasannya yang tidak didukung oleh pendidikan yang relatif tinggi jadi sehingga mereka hidup apa adanya dengan tingkat pendidikan gitu kan apa adanya, jadi banyak mereka bergerak di bidang informal sedangkan jika kita ingin bekerja di tingkat lain kita harus memiliki persyaratan dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi gitu kan.” (Wawancara, 10 April 2017)

Senada dengan babe AO yang merupakan tokoh Kampung Pulo, bapak H yang merupakan Staff Kelurahan Kampung Melayu yang merupakan informan tambahan dalam penelitian ini, juga mengatakan bahwa :

“Sebagian besar penduduk Kampung Pulo ini terutama didominasi perekonomian yang rendah. Dapat dikatakan rendah, karena kita bisa lihat dari data, penghasilan yang rendah dan tidak tetap. Bisa dilihat juga dari bentuk fisik lainnya dari bentuk bangunan tempat tinggal yang sebagian besar tidak memadai, seperti di bantaran Kali rumah ukuran 20m² bisa di tinggali 3 kepala keluarga (KK) bahkan lebih atau turun temurun tinggal bersama menjadi satu.” (Wawancara, 28 Maret 2017)

Mengenai kondisi pendidikan warga Kampung Pulo, seperti yang telah disampaikan oleh bapak H, dapat dilihat dari keterangan Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 ini menjelaskan secara umum atau mayoritas pendidikan yang dimiliki warga Kampung Pulo khususnya di RW 03. Berikut Tabel 5 :

Tabel 5. Jenjang Pendidikan Warga Kampung Pulo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak/Belum Sekolah	513	18,65%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	562	20,43%
3	Tamat SD/Sederajat	833	30,28%
4	SLTP/Sederajat	436	15,85%

5	SLTA/Sederajat	398	14,47%
6	Diploma I/II	7	0,25%
7	Strata I	2	0,07%
	Total	2751	100%

Sumber : Pengolahan Data Pribadi, 2017

Dari keterangan tabel tersebut, tabel tersebut menjelaskan bahwa, dari 100% persentase jumlah keseluruhan warga Kampung Pulo di RW 03, Jenjang pendidikan tamat SD/Sederajat merupakan jenjang pendidikan yang memiliki persentase paling tinggi dibandingkan persentase jenjang pendidikan lainnya.

Jenjang pendidikan tamat SD/Sederajat dengan persentase 30,28%, menunjukkan bahwa secara umum atau mayoritas warga Kampung Pulo di RW 03 memiliki jenjang pendidikan tersebut. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan mayoritas pekerjaan warga Kampung Pulo di RW 03, jenjang pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki warga Kampung Pulo di RW 03, dimana kondisi ekonomi warga Kampung Pulo di RW 03 didominasi dengan perekonomian yang rendah. Kemudian mengenai kondisi ekonomi warga Kampung Pulo di RW 03, seperti yang telah disampaikan oleh bapak H dan Babe AO, dapat dilihat dari keterangan Tabel 6 dibawah ini. Tabel 6 ini menjelaskan secara umum atau mayoritas jenis pekerjaan yang dimiliki warga Kampung Pulo khususnya di RW 03. Berikut Tabel 6 :

Tabel 6. Jenis Pekerjaan Warga Kampung Pulo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Serabutan	2228	80,99%
2	Pedagang	412	14,98%
3	Guru	55	1,99%

4	Karyawan Swasta	56	2,04%
	Total	2751	100%

Sumber : Pengolahan Data Pribadi, 2017

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data mengenai jumlah pendapatan warga Kampung Pulo. Namun, peneliti mendapatkan data dari Kelurahan Kampung Pulo mengenai jenis pekerjaan secara umum atau mayoritas jenis pekerjaan yang dimiliki warga Kampung Pulo di RW 03. Data tersebut telah peneliti paparkan dalam tabel 6 di atas. Dari keterangan tabel tersebut, tabel tersebut menjelaskan bahwa, dari 100% persentase jumlah keseluruhan warga Kampung Pulo di RW 03, Jenis pekerjaan Serabutan merupakan jenis pekerjaan yang memiliki persentase paling tinggi dibandingkan persentase jenis pekerjaan lainnya. Jenis pekerjaan Serabutan dengan persentase 80,99%, menunjukkan bahwa secara umum atau mayoritas warga Kampung Pulo di RW 03 memiliki jenis pekerjaan tersebut. Jika dikaitkan dengan pendapatan dan kondisi ekonomi warga Kampung Pulo di RW 03, pendapatan atau penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka tersebut berada pada nominal pendapatan yang rendah. Sehingga menyebabkan kondisi ekonomi warga Kampung Pulo di RW 03 didominasi dengan perekonomian yang rendah.

Untuk institusi ekonomi, wilayah Kampung Pulo juga berdekatan dengan Pasar Jatinegara, banyak juga toko yang berada dalam wilayah RW 02 dan RW 03 yang berada sepanjang Jalan raya Jatinegara Barat. Toko-toko tersebut menjual berbagai macam kebutuhan seperti keramik, karpet, kebutuhan alat tulis kantor, dan lainnya. Selain insitusi ekonomi, terdapat juga instutisi pendidikan yang berada dekat dengan Kampung Pulo. Seperti Yayasan Bangun Cipta Negeri,

Sekolah-Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak dan Taman Bermain seperti, Yayasan Pendidikan Takhsa Dzikra Mardadilah, Yayasan Az-Zahra Mulia, dan lainnya. Dalam segi fasilitas umum tempat beribadah, Kampung Pulo mempunyai banyak Masjid dan Musholah. Terdapat 3 masjid dan 10 Musholah yang berada dalam wilayah Kampung Pulo, selain dijadikan sebagai tempat ibadah, masjid tersebut juga selalu dijadikan tempat penampungan bagi para pengungsi ketika banjir melanda (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016).

4.6 Profil Informan

Informan yang dipilih merupakan tokoh masyarakat Kampung Pulo, yang telah lama tinggal di Kampung Pulo serta banyak mengetahui tentang kondisi masyarakat serta dinamika penolakan relokasi yang terjadi di Kampung Pulo.

Informan yang dipilih juga merupakan warga Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi serta para perwakilan dari rukun tetangga(RT) dan rukun warga(RW).

1. Informan AO

Informan AO atau yang lebih akrab disapa Babe AO oleh warga Kampung Pulo, merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Pulo. yang merupakan keturunan generasi ke-2 yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Pulo. Babe AO merupakan penduduk asli Kampung Pulo dimana ayahnya juga merupakan keturunan Betawi asli yang juga lahir dan tinggal di Kampung Pulo hingga akhir hayatnya. Umur Babe AO saat ini adalah 72 tahun, Babe AO juga tinggal di Kampung Pulo sejak dia lahir pada tahun 1945. Babe AO mempunyai seorang istri dan memiliki lima orang anak, tiga anak dari lima anak Babe AO belum menikah dan masih

tinggal bersama dengan Babe AO di Kampung Pulo sampai dengan saat ini. Babe AO selama tinggal di Kampung Pulo, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Babe AO hanya mendapatkan penghasilan dari warung sembako yang ia miliki serta dari penghasilan kontrakan yang ia sewakan di Kampung Pulo sampai dengan saat ini. Dalam konteks penolakan terhadap relokasi Kampung Pulo, Babe AO sebagai tokoh masyarakat Kampung Pulo tentu sangat memahami dinamika dan kondisi warga Kampung Pulo dalam melakukan penolakan terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Dalam menolak relokasi, Babe AO sebagai tokoh masyarakat Kampung Pulo memiliki peran yang sangat penting, dalam setiap tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi. Babe AO sebagai tokoh Kampung Pulo, menjadi leader atau pemimpin bagi warga Kampung Pulo dalam menentukan setiap tindakan yang dilakukan dalam menolak program relokasi. Babe AO juga menjadi perwakilan warga dalam musyawarah yang dilakukan antar warga Kampung Pulo bersama perwakilan dari Pemprov DKI yang di wakili oleh Camat Jatinegara. Dalam musyawarah yang dilakukan bersama Camat Jatinegara ini, Babe AO menyampaikan berbagai macam tuntutan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi yang di canangkan Pemprov DKI. Tuntutan yang disampaikan selain dari tuntutan utama yaitu menolak relokasi dan tuntutan terhadap janji Gubernur DKI saat kampanye pada tahun 2013 yang lalu, yaitu janji bahwa tidak akan menggusur Kampung Pulo jika terpilih sebagai Gubernur, tuntutan lainnya yang disampaikan

jika relokasi pada akhirnya dilaksanakan adalah tuntutan seperti biaya penggantian bangunan, peralatan rumah tangga, dan penggantian sarana lingkungan (tanaman milik warga). Selain menjadi perwakilan warga Kampung Pulo, Babe AO sebagai tokoh masyarakat Kampung Pulo juga berperan dalam menjaga kondisi dan solidaritas warga Kampung Pulo.

Peran tersebut Babe AO lakukan agar tidak timbulnya perpecahan dalam warga Kampung Pulo itu sendiri dan juga agar tidak terciptanya konflik antar warga dengan perwakilan Pemprov DKI dalam melakukan penolakan terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat.

2. Informan IS

Seperti Babe AO, informan IS juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Pulo, yang merupakan keturunan generasi ke-2 yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Pulo. Informan IS yang lebih akrab disapa Babe IS oleh warga Kampung Pulo, juga merupakan aparat wilayah yang menjabat sebagai wakil ketua RW 03. Babe IS sejak kecil tinggal di Kampung Pulo, sementara orang tuanya berasal dari suatu daerah di Kabupaten Bogor dan juga tinggal di Kampung Pulo sejak tahun 1960. Umur Babe IS sekarang mencapai usia 67 tahun. Babe IS sekarang tinggal sendiri karena kedua anaknya telah menikah dan istrinya juga telah wafat. Anaknya yang pertama, bertempat tinggal sangat dekat dengan Babe IS yaitu tepat di sebelah rumahnya di Kampung Pulo. Dan anak Babe IS yang kedua telah mengikuti pasangannya untuk bertempat tinggal di rumah mertuanya. Babe IS selama tinggal di Kampung Pulo, juga tidak

memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Babe IS hanya mendapatkan penghasilan dari hasil uang sewa kontrakan yang miliki dan juga dari anaknya yang pertama yang merupakan pedagang di pasar Jatinegara. Dalam konteks penolakan terhadap relokasi Kampung Pulo, Babe IS yang juga merupakan tokoh masyarakat Kampung Pulo juga tentu sangat memahami dinamika dan kondisi warga Kampung Pulo dalam melakukan penolakan terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Dalam menolak relokasi, seperti yang dilakukan oleh Babe AO, Babe IS sebagai tokoh masyarakat Kampung Pulo juga memiliki peran yang sangat penting, dalam setiap tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi. Bersama dengan Babe AO, Babe IS sebagai tokoh Kampung Pulo, juga menjadi leader atau pemimpin bagi warga Kampung Pulo dalam menentukan setiap tindakan yang dilakukan dalam menolak program relokasi. Babe IS juga menjadi perwakilan warga dalam musyawarah yang dilakukan antar warga Kampung Pulo bersama perwakilan dari Pemprov DKI yang di wakili oleh Camat Jatinegara. Dalam musyawarah yang dilakukan bersama Camat Jatinegara ini, Babe IS juga turut menyampaikan berbagai macam tuntutan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi yang di canangkan Pemprov DKI. Kemudian, sebagai tokoh masyarakat Kampung Pulo Babe IS juga ikut berperan dalam menjaga kondisi dan solidaritas warga Kampung Pulo bersama dengan informan AO, agar terciptanya suasana yang kondusif dan tidak terciptanya konflik antar warga dengan perwakilan Pemprov DKI

dalam melakukan penolakan terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat.

3. Informan F

Informan F atau yang lebih akrab disapa Bang F oleh warga Kampung Pulo, merupakan Ketua RT11/03 Kampung Pulo yang telah berumur 43

tahun. Bang F sudah tinggal di Kampung Pulo sejak lahir, dirinya sekarang tinggal bersama istri dan dua anaknya. Bang F menempati rumah

bekas peninggalan kedua orang tuanya yang juga lahir dan tinggal di Kampung Pulo, sebelum pada akhirnya kedua orang tua Bang F wafat.

Bang F merupakan generasi ke-2 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo.

Bang F bekerja sebagai penjual barang antik di pasar Jatinegara, dan untuk

penghasilan tambahan istri Bang F bekerja sebagai pembuat kue untuk

dijual dengan dititipkan kepada penjual lain. Bang F juga mempunyai

usaha menjual barang rongsok atau barang bekas yang bisa di beli atau di

jual kembali. Dalam konteks penolakan terhadap relokasi Kampung Pulo,

Bang F yang merupakan warga Kampung Pulo sekaligus ketua RT11/03

juga melakukan koordinasi dengan warga dan ketua rukun tetangga(RT)

lainnya dalam melakukan aksi penolakan program Pemprov DKI yang

berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat.

Koordinasi ini dilakukan juga untuk menjaga solidaritas warga Kampung

Pulo dan untuk menghindari konflik antar warga dengan perwakilan

Pemprov DKI dalam melakukan aksi penolakan terhadap program

Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun

Jatinegara Barat.

4. Informan Y

Informan Y merupakan warga dari RT12/03, yang sudah berumur 66 tahun dan sudah tinggal di Kampung Pulo sejak lahir. Informan Y yang bisa akrab dengan sapaan Babe Y, tinggal di rumah bekas peninggalan orang tuanya, bersama dengan istri, anak, menantu dan tiga orang cucu.

Babe Y merupakan tamatan sekolah dasar dan tidak memiliki pekerjaan.

Babe Y mendapatkan penghasilan dari uang sewa kontrakan yang ia sewakan setiap bulannya kepada warga Kampung Pulo yang berasal dari

luar Jakarta. Untuk menambah penghasilan keluarganya, Babe Y juga berdagang menjual lauk matang, pecel dan gado-gado di rumahnya. Usaha

ini Babe Y lakukan untuk mencukupi kebutuhannya, karena Babe Y tidak ingin menyusahkan anak dan cucunya. Dalam konteks penolakan terhadap

relokasi Kampung Pulo, Babe Y juga ikut dalam tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo lainnya dalam menolak relokasi.

Tindakan yang babe Y lakukan merupakan tindakan yang sudah disepakati bersama dengan Tokoh Kampung Pulo. Babe Y juga ikut melakukan

koordinasi dengan warga dan ketua rukun tetangga(RT) dalam melakukan aksi penolakan program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga

Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Koordinasi ini dilakukan juga untuk menciptakan suasana yang kondusif, menjaga solidaritas warga

Kampung Pulo dan untuk menghindari konflik antar warga dengan perwakilan Pemprov DKI dalam melakukan aksi penolakan terhadap

program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat.

5. Informan Hasanudin

Informan U merupakan warga dari RT13/03 yang telah berumur 50 tahun.

Informan U yang bisa akrab dengan sapaan Bang U, tinggal di Kampung Pulo sejak lahir dimana orang tua Bang U telah tinggal di Kampung Pulo

sejak tahun 1930 bersama dengan kakek nenek Bang U. Bang U merupakan generasi ke-3 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo, saat ini

Bang U menjabat sebagai ketua RW 03. Bang U bekerja sebagai karyawan di showroom mobil bekas, sementara istri Bang U berdagang gorengan

dan keripik yang ditipkannya di warung-warung di Kampung Pulo ataupun juga anak mereka berkeliling untuk menjualnya pada sore hari setelah

mereka bersekolah. Bang U mempunyai 3 orang anak, ketiga anaknya masih tinggal bersama dengan dirinya di Kampung Pulo. Dalam konteks

penolakan terhadap relokasi Kampung Pulo, Bang U yang merupakan warga Kampung Pulo juga ikut melakukan aksi penolakan terhadap

program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Dalam tindakan penolakan yang dilakukan oleh

warga Kampung Pulo, Bang U memiliki peran lebih dibandingkan dengan warga Kampung Pulo lainnya. Dimana Bang U yang merupakan ketua

RW dari RW 03 memiliki tugas untuk menjaga solidaritas warga Kampung Pulo dan menjaga suasana yang kondusif untuk menghindari

konflik antar warga dengan perwakilan Pemprov DKI dalam melakukan aksi penolakan terhadap program relokasi, sebagaimana yang telah di

sampaikan oleh tokoh masyarakat dan aparaturnya Kampung Pulo. Kemudian peran lainnya yang dilakukan oleh Bang U, adalah sebagai koordinator

dan perwakilan dari warga Kampung Pulo dari kerjasama yang dilakukan dengan LSM Ciliwung Merdeka dalam tindakan menolak relokasi.

6. Informan I

Informan I yang bisa akrab dengan sapaan Bang I oleh warga Kampung Pulo juga merupakan warga dari RW 03 Kampung Pulo. Bang I tinggal di

Kampung Pulo sejak lahir dimana orang tua Bang I telah tinggal dan lahir di Kampung Pulo sejak tahun 1937. Saat ini Bang I sudah berusia 38

tahun, Bang I merupakan anak bungsu dari lima saudara. Bang I merupakan generasi ke-2 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo,

bersama dengan istri dan kedua anaknya Bang I tinggal di rumah peninggalan kedua orang tua nya bersama dengan keempat saudaranya. Di

rumah bekas peninggalan kedua orang tuanya, Bang I juga tinggal bersama dengan kakak, menantu, serta keponakannya. Semenjak lahir dan

menikah Bang I tidak memiliki rumah sendiri, Bang I juga tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Bang I setiap harinya bekerja

serabutan sebagai kuli bangunan dan sebagai kuli panggul di pasar Jatinegara. Penghasilan Bang I juga masih terbantu oleh uang hasil

kontrakan milik orang tuanya yang juga ada di Kampung Pulo. Untuk menambah penghasilannya, istri Bang I juga bekerja sebagai tukang cuci

dan kuli gosok. Dalam konteks penolakan terhadap relokasi Kampung Pulo, sama seperti warga Kampung Pulo yang lainnya, Bang I yang

merupakan warga Kampung Pulo juga ikut melakukan aksi penolakan terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga

Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Aksi atau tindakan penolakan

yang dilakukan juga sama dengan tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo lainnya.

7. Informan H

Informan H adalah informan tambahan dalam penelitian ini yang merupakan Staff Kelurahan Kampung Melayu. Keterangan yang diperoleh peneliti dari bapak H ini dapat membantu menjelaskan bagaimana program relokasi itu sendiri dan menjelaskan bagaimana kondisi warga Kampung Pulo secara umum dari sudut pandang pihak Pemprov DKI.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Aktor, Sumber Daya dan Tujuan Menolak Relokasi

Aktor dalam penelitian ini adalah warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo. Disebut aktor karena merupakan pelaku yang terhadap sumberdaya memiliki kuasa dan kepentingan.

Dikatakan memiliki kuasa karena dalam struktur tindakan sosial aktor atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelaku adalah pelaku yang berkepentingan untuk melakukan tindakan berdasarkan tujuan dan kepentingannya (Coleman J., 2008).

Dalam penelitian ini Aktor yang menolak untuk direlokasi ke Rusun memiliki sumberdaya atas dirinya, sumberdaya ini berupa hubungan kekerabatan, jaringan dan solidaritas antara aktor yang satu dengan yang lainnya yaitu warga Kampung Pulo yang juga ikut menolak direlokasi ke Rusun. Dengan sumberdaya ini, aktor memiliki kuasa untuk mencapai kepentingannya dalam menolak program relokasi.

Sumberdaya tersebut dimanfaatkan aktor untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai aktor.

Untuk mencapai tujuan tersebut, aktor melakukan tindakan efektif yang dibentuk atas kesepakatan para aktor dan atas pemanfaatan sumberdaya yang aktor miliki. Sumberdaya lainnya yang dimiliki aktor dalam penelitian ini, adalah sertifikat tanah dan bangunan yang saat ini mereka tempati di Kampung Pulo yang merupakan akses bagi dirinya untuk tetap menempati rumah yang ia miliki di Kampung Pulo dan menolak untuk direlokasi ke Rusun. Dalam memahami arti relokasi, warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam penolakan relokasi ini juga

banyak yang tidak memahami arti relokasi. Dalam penyampaian mengenai arti relokasi saat wawancara dengan peneliti, sebagian aktor mengatakan bahwa mereka tidak mengerti arti relokasi, dimana yang mereka pahami mengenai relokasi adalah bahwa mereka akan di gusur. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Kampung Pulo Babe AO mengenai arti relokasi bagi dirinya, bahwa :

“Bagaimana kita mau paham relokasi? Saya aja sebagai tokoh disini ngga ada yang namanya saya di undang ke balai kota sono. Ini program ngga dibahas dulu sama kita, tau taunya udah ada aja. Berartikan ini bukan kemauan kita, ini kemauan pemerintah. Apapun alasannya kita tetep nolak relokasi. Karena relokasi bukan yang kita butuhin. Kita ngga pernah di ajak musyawarah, gimana kita mau paham soal relokasi? apalagi warga disini yang rata-rata gak sekolah, mana ngerti begituan. Relokasi Kalo menurut saya pribadi, sangat tidak bijak dan ngga ada gunanya bagi kita warga Kampung Pulo. Pemerintah harus tau, sebelum ada mereka sekarang ini, sebelum Jakarta maju, kita semua udah pada tinggal disini lebih dulu. Terus kita mau di gusur dari kampung kita? Tempat kita lahir? Tidak akan. Kita akan menolak sampai mati, ngga akan ada itu penggusuran lagi.” (Wawancara, 28 Maret 2017)

Pernyataan serupa seperti yang disampaikan oleh tokoh Kampung Pulo Babe AO mengenai arti relokasi bagi dirinya juga disampaikan oleh tokoh Kampung Pulo lainnya, yaitu Babe IS. Babe IS mengatakan bahwa :

“Saya pribadi sebagai tokoh, dan mewakili warga disini, saya ngga butuh yang namanya relokasi. Kita hanya butuh perbaikan, bisa dengan kampung deret, dengan diganti rumah di tempat lain. Relokasi ini apa? Kita ngga pernah diskusi sama pemerintah, tiba-tiba program ni muncul. Kaya kesamber petir, tiba-tiba kita disuruh angkat kaki dari kampung kita. Kita mau dipindah ke tempat yang katanya lebih layak di Rusun, tapi buat kita mah ngga. Ngga ada itu relokasi-relokasi. Ini mah namanya penggusuran bukan relokasi. Orang kita katanya ngga mau diganti. Bagaimana ceritanya?” (Wawancara, 29 Maret 2017)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kedua tokoh Kampung Pulo di atas mengenai arti relokasi, kedua tokoh tersebut mengatakan bahwa menurut mereka

sebagai tokoh Kampung Pulo, relokasi bukanlah kebutuhan mereka. Mereka menganggap bahwa relokasi merupakan program yang bertujuan untuk menggeser mereka dari Kampung Pulo. Pernyataan ini mereka sampaikan dengan alasan karena Pemprov DKI tidak pernah melakukan diskusi dengan masyarakat Kampung Pulo mengenai program ini. Yang kemudian secara tiba-tiba program relokasi ini kemudian muncul, dan mengharuskan warga Kampung Pulo angkat kaki dan pindah ke Rusun Jatinegara Barat yang telah disediakan oleh Pemprov DKI tanpa adanya ganti rugi. Program relokasi yang tidak berpihak kepada warga Kampung Pulo inilah, yang kemudian tokoh Kampung Pulo dan warga Kampung Pulo menganggap bahwa program relokasi ini merupakan program penggusuran yang sengaja dibuat oleh Pemprov DKI.

Dalam menolak relokasi, warga Kampung Pulo sebagai aktor menentukan pilihan untuk menolak direlokasi ke Rusun dan tetap bertahan di Kampung Pulo berdasarkan pertimbangan dimana mereka menganggap bahwa rumah yang saat ini mereka tempati di Kampung Pulo, merupakan permukiman legal dengan bukti kepemilikan dokumen sertifikat tanah dan bangunan rumah yang saat ini mereka tempati. Dengan bukti kepemilikan dokumen sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut, warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi merasa bahwa mereka memiliki hak atas penggunaan tanah dan bangunan di wilayah Kampung Pulo. Keterangan diperoleh peneliti dari salah satu informan yaitu Babe AO, Babe AO merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Pulo, yang merupakan keturunan generasi ke-2 yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Pulo.

Berikut pernyataan Babe AO :

“Kita tetep bertahan di Pulo sebab kita punya itu apa namanya sertifikat tanah, rumah sama PBB juga kita punya, Itu kan semua Pajak bumi dan bangunan (PBB) saya lunas-lunasin bayar 2 bulan tuh eh’ 2 tahun, tahun 2014 lunasin. Ini rumah kita, tanah kita, kita juga punya surat-suratnya, Pemerintah mau ngapain. Kita punya Hak disini, gak bisa asal main gusur aja. Makanya kenapa kita nolak, karena kita punya surat-surat. Kita ya bertahan kampung kita, ngapain kita dipindah ke Rusun.”(Wawancara, 28 Maret 2017)

Dari pernyataan tersebut tergambar bahwa Babe AO sebagai warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi, menganggap bahwa sertifikat tanah, rumah serta Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mereka miliki merupakan bukti yang menunjukkan kepemilikan atas penggunaan tanah dan rumah miliknya di Kampung Pulo. Sehingga Babe AO memilih untuk bertahan di Kampung Pulo agar bisa mendapatkan hak kuasa atas tempat tinggal yang mereka miliki dari ancaman relokasi yang ingin dilakukan Pemprov DKI. Hal tersebut juga mengingatkan apa yang dikatakan Coleman mengenai pilihan rasional yang dibangun dengan kesadaran untuk kepentingan memenuhi tujuan tertentu. Babe AO memilih sebuah pilihan yaitu menolak untuk direlokasi ke Rusun karena dirinya menganggap bahwa dengan kepemilikan surat tadi maka dia bisa bertahan di Kampung Pulo dan terbebas dari ancaman relokasi yang ingin dilakukan Pemprov DKI. Kemudian tujuan Babe AO menolak untuk direlokasi adalah karena atas dasar ekonomi, berikut pernyataan Babe AO mengenai tujuan dari menolak untuk direlokasi :

“Ngga penting deh relokasi, saya pingin diganti. Saya sebagai tokoh warga pulo juga mewakili warga pulo yang nolak direlokasi, kita semua pengen ganti rugi sesuai perjanjian dulu di Kecamatan. Kalau diganti uang kan berapa aja bisa beli di kampung, kalau di Rusun kan ngga enak gitu. Saya nolak direlokasi supaya diganti aja gitu, Berapa diganti, saya keluar dari sini, saya pindah di kampung, ke kampung bini saya Depok. Pokoknya saya mau diganti, ganti saya bisa keluar

dari sini gitu. Ngomong doang ngga diganti. Sekarang mana? Semua orang pada benci. Kalau dulu si Kumis (Fauzi Bowo) ngga lengser, ngga digusur Pulo. Dia sudah janji sama orang Pulo, saya jadi Gubernur saya ngga akan gusur Kampung Pulo.”(Wawancara, 28 Maret 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Babe AO juga tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan beberapa informan lain yang juga menolak direlokasi ke Rusun. Mereka sebagai warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi ke Rusun menganggap bahwa relokasi merupakan kepentingan Pemprov DKI semata. Dan menganggap Pemprov DKI yang berupaya untuk membenahi Kampung Pulo dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat, dan merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun sebagai sebuah bentuk penindasan Pemerintah terhadap warga Kampung Pulo.

Dalam konteks tersebut, seperti yang disampaikan oleh Hans Dieter Evers (1982) sebagai “massa apung kota”. Warga Kampung Pulo juga merupakan termasuk kelompok massa apung. Dimana jika dilihat dari tingkatan ekonomi penduduk Kampung Pulo terutama didominasi pendidikan dan perekonomian yang rendah dengan penghasilan yang rendah dan tidak tetap serta sangat beragam. Dalam politik warga Kampung Pulo juga dipergunakan oleh kelompok elit politik sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu, seperti dalam Pilkada DKI Jakarta. Dimana dalam Pilkada DKI Jakarta warga Kampung Pulo seringkali dibawa ke arah tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkada DKI dengan berbagai macam kontrak politik yang akan diterima oleh warga Kampung Pulo, yang salah satunya terkait dengan program relokasi.

Seperti yang telah disampaikan oleh Babe AO di atas, bahwa ketika Pilkada DKI tahun 2012 yang lalu mereka dijanjikan oleh pemerintah DKI yang sebelumnya

menjabat yaitu Fauzi Bowo, dimana mereka dijanjikan tidak akan direlokasi jika ia terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi juga meyakini bahwa Pemprov DKI sebagai Pemerintah tidak akan bisa merelokasi mereka dari Kampung Pulo, karena jika relokasi berhasil dilaksanakan maka hal tersebut melanggar Hak Asasi mereka dan mereka juga memiliki bukti kepemilikan surat tanah dan bangunan di wilayah Kampung Pulo yang mereka tempati. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa telah membayar kewajiban mereka kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas tagihan pajak atas tanah dan bangunan yang mereka tempati di wilayah Kampung Pulo, dengan membayar Pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari pernyataan-pernyataan tersebut, hal yang lebih penting adalah dimana warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi memiliki tujuan tertentu sehingga menggerakkan mereka untuk tetap bertahan di Kampung Pulo. Tujuan aktor sendiri juga menjadi dasar bagaimana warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi memilih untuk bertahan di Kampung Pulo, dalam pilihan rasional Coleman dijelaskan bahwa pilihan rasional merupakan bentuk tindakan aktor yang merupakan kepentingan untuk mencapai tujuan. Salah satu informan yaitu Babe IS, yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Pulo, yang merupakan keturunan generasi ke-2 yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Pulo. Yang saat ini juga merupakan aparat wilayah yang menjabat sebagai wakil ketua RW 03, menyatakan bahwa :

“Kenapa relokasi gak pernah selesai? Kenapa warga pulo milih bertahan disini dari pada di Rusun? Karena ya Pemerintah ngga mau ganti, dia bilang kita liar. Kalau liar, kenapa dibiarkan? Kan udah puluhan tahun. terus kalau liar kenapa kita bisa punya sertifikat? Kenapa kita bayar PBB? Itu aja tagihan PBB numpuk noh. Berarti

Pemerintah ngakuin kita, buktinya aja kita di tagih PBB. Saya aja umur saya udah 67 tahun, kenapa dibiarkan? Berarti yang salah siapa? Nah. Sekarang kita udah bangun, keluarin biaya banyak, kok ngga diganti. Seharusnya diganti. Masalah rumah susun sih ya boleh dikasih boleh ngga, kalau udah ada penggantian ngga perlu pakai rumah susun gitu. Kalau misalkan ngga diganti, dikasih rumah susun, susun sewa. Ya kalau orang yang kerja masih muda mungkin enak, tapi kalau seperti saya gini udah ngga kerja, pensiun ngga. Ya kalau swasta kan ngga pensiun.” (Wawancara, 29 Maret 2017)

Pernyataan tersebut juga di perjelas dengan tujuan Babe IS menolak untuk direlokasi, berikut pernyataan Babe IS :

“Semua saya mendukung kok pembangunan. Siapapun Gubernurnya, mau Ahok, mau apa, saya itu ngga anti, ngga. Sampai saat ini, wah saya benci Ahok, ngga. Tapi peraturannya Pak Ahok ganti dong, gitu aja, ngga sulit. Ya sebetulnya sih kalau diganti rugi saya mah enak-enak aja udah. Karena ngga diganti aja jadi masyarakat itu nolok direlokasi bukannya anti sama Pak Ahok sebetulnya ngga. Saya nolok direlokasi karena mempertahankan hak rumah tadi, Nah. Misalkan tanah, oke Pemerintah punya, tapi pembangunannya kita punya, hitung-hitungan aja dong gitu.” (Wawancara, 29 Maret 2017)

Dari pernyataan tersebut, Babe IS sudah jelas menunjukkan bahwa tujuannya memilih bertahan di Kampung Pulo karena ia juga merasa memiliki bukti kepemilikan surat tanah dan bangunan di wilayah Kampung Pulo yang saat ini ia tempati. Adanya tagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai wujud pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan di Kampung Pulo yang telah ia tempati, yang juga secara tidak langsung menunjukkan pengakuan dari Pemerintah atas penggunaan hak atas tanah dan bangunan mereka di wilayah Kampung Pulo. Selain itu, persoalan dasar ekonomi penggantian yang tidak jelas dari Pemprov DKI juga merupakan alasan Babe IS untuk menolak direlokasi ke Rusun dan tetap memilih bertahan di Kampung Pulo. Karena latar belakang tersebut, Babe IS memilih untuk menolak direlokasi ke Rusun dan memilih untuk

tetap bertahan di Kampung Pulo dengan tujuan agar nantinya jika relokasi tetap dijalankan maka Babe IS akan mendapatkan ganti rugi dari Pemprov DKI.

Adapun keterangan dari aktor lainnya Babe Y yang ikut menolak direlokasi ke Rusun dan memilih tetap bertahan di Kampung Pulo, Babe Y menjelaskan bagaimana pemahamannya mengenai relokasi, Babe Y menjelaskan bahwa :

“Kalau soal relokasi itu saya ngga begitu paham sih. Karena apa ee ini kan permainan orang gede ya ngomong begitu. Kalau mau jelasnya kita kan banyak orang Pulo itu banyak yang sekolahnya rendah. Jadi kalau ngomong-ngomong begitu hanya orang yang pintar-pintar aja yang bisa. Orang Pulo banyak yang ngga bisa. Kalau dia mau ngomong jelasnya untuk memindahkan orang aja begitu. Tapi ukuran luasnya itu ngga sesuai. Dulu dia bilang 25 meter dari Askali, kenyataan sekarang 35 meter.” (Wawancara, 1 April 2017)

Dari keterangan Babe Y, menjelaskan bahwa Babe Y tidak begitu memahami arti relokasi itu sendiri. Yang disebabkan oleh latar belakang Babe Y, yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan karena kurangnya sosialisasi akan program relokasi yang dilakukan Pemprov DKI kepada dirinya dan warga Kampung Pulo lainnya. Seperti pernyataan Babe Y berikut, bahwa :

“Saya ngga ngerti relokasi itu apaan, yang saya tau saya mau dipindahin aja. Dulu mah dibilangnya juga cuma 25 meter dari Askali. Berarti saya kagak kena kan, saya udah 35 meter ada dari Askali, karena saya kena di belakang. Kita mana tahu relokasi orang kita juga kaga sekolah, kita juga gak pernah dikasih tau kalo ada ini program. Cuma orang Kecamatan aja, orang BPN ngasih tau ini rumah mau diganti katanya. Itu dia pada dateng foto-foto, ngukur rumah saya, nanya surat-surat segala macam lah.” (Wawancara, 1 April 2017)

Selain menjelaskan pemahamannya mengenai relokasi, Babe Y juga menjelaskan alasan mengapa ia menolak direlokasi ke Rusun dan memilih tetap bertahan di Kampung Pulo, Babe Y menjelaskan bahwa :

“Masalahnya kalau dipindahin ke Rusun kita ngga punya rumah. Kita ini kontrak terus sama Pemerintah. Kalau di Kampung Pulo kan punya rumah sendiri. Kita hanya mikirin bayar listrik, bayar rumah ngga, bayar air kagak. Hanya listrik yang kita bayar. Kan ngga seberapa, ngga terlalu berat. Kalau di Rusun berat, rumah bayar, air bayar, listrik bayar. Kerja kagak saya,, ngandelin anak doang. Ya alasannya kita ngga mau pindah dari Kampung Pulo, begitu aja poinnya. Karena kalau kita pindah dipindahin ke Rusun ini, ya tadi udah saya bilang bayar rumah, bayar air. Kalau listrik kita ngga pikirin ya, dari sono juga bayar listrik. Air sama rumah yang dipikirin bayar. Semuanya satu kampung nolak . Kita ini semua manusia, jangan main pindahin aja kaya binatang. Dimana rasa sosial Pemerintah kepada kita?.”
(Wawancara, 1 April 2017)

Dari alasan yang dijelaskan oleh Babe Y, faktor sosial dan faktor ekonomi menjadi alasan utama Babe Y untuk menolak direlokasi ke Rusun dan memilih bertahan di Kampung Pulo. Penggantian rumah menjadi unit Rusun dan menambahnya biaya kehidupan yang akan ditanggung oleh Babe Y jika akan direlokasi, dianggap sangat membebankan pengeluaran Babe Y setiap bulannya. Babe Y yang terbiasa hidup di Kampung Pulo, tanpa dikenakan tagihan apapun setiap bulannya kecuali tagihan listrik, maka tagihan tersebut akan bertambah jika ia direlokasi ke Rusun. Mulai dari tagihan sewa Rusun, tagihan listrik, dan tagihan air yang wajib ia lunasi setiap bulannya. Ditambah lagi dengan kehidupan sosial yang akan berubah jika pindah ke Rusun, dimana Babe Y harus bersosialisasi kembali dan menyesuaikan dengan lingkungan Rusun. Kedua faktor inilah yang menjadi alasan Babe Y untuk menolak direlokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo. Dari pilihan yang diambil oleh Babe Y sebagai aktor dalam menolak relokasi, juga terdapat tujuan yang ingin dicapai Babe Y dari pilihannya yang memilih bertahan di Kampung Pulo, tujuan tersebut dijelaskan Babe Y dalam pernyataan berikut :

“Pokoknya saya ngga mau pindah dari Kampung Pulo karena kalau udah keluar dari situ ya ngga, berarti kita udah ngga punya rumah, kita mau nyari rumah kemana? Sedangkan harga rumah di luar sudah mahal. Ini apalagi kagak diganti sama sekali. Udah jelas nolak sama sekali buat saya. Kalau dia mau gusur kita dipindahin harus ada rumahnya ada tanahnya, itu baru rumah namanya. Kalau Rusun begini bukan rumah, kandang ayam. Bukan rumah ini. Ya kan pindah ke kandang ayam, kayak burung, ya kan. Makanya gue bilang ngga bisa diwarisin, masa gue warisin rumah susun. Ngga ada kita warisin rumah susun.” (Wawancara, 1 April 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Babe Y mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pilihannya yang memilih bertahan di Kampung Pulo adalah mendapatkan penggantian rumah dan tanah jika ia direlokasi, bukan mendapatkan penggantian unit Rusun seperti yang di janjikan Pemprov DKI. Kemudian tujuan Babe Y ini juga dipertegas dengan pernyataan Babe Y, yang menyatakan bahwa :

“Harapan ke depan maunya enak kita, bisa diganti itu rumah, biar kita mau pergi ke mana juga kalau udah diganti ngga jadi masalah. Ngga dikasih rumah susun juga ngga jadi masalah karena sudah diganti. Ganti dulu, terserah kita mau ke mana kek. Yang penting sudah diganti, kita udah megang duit. Kalau ngga diganti sama sekali? Di sini mata pencaharian susah lagi. Kalau gak diganti juga, saya tetep bertahan di pulo sesuai kesepakatan sama temen-temen yang lain.” (Wawancara, 1 April 2017)

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Babe Y menolak untuk direlokasi dan bertahan di Kampung Pulo adalah agar Babe Y mendapatkan uang ganti rugi dari Pemprov yang kemudian dari uang ganti rugi tersebut dapat dibelikan lagi rumah di lokasi lain yang dapat menggantikan tempat tinggalnya di Kampung Pulo jika ia direlokasi. Alasan Babe Y bertahan di Kampung Pulo seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti alasan karena faktor ekonomi yang menjadi faktor utama alasan ia menolak untuk direlokasi

juga semakin memperkuat tujuan yang ingin dicapainya dari pilihan untuk bertahan di Kampung Pulo. Tujuan yang dimiliki atau ingin dicapai warga Kampung Pulo yang menolak untuk direlokasi secara individu hampir sama namun juga ada yang berbeda, bila aktor di atas menyatakan keterangan menolak untuk direlokasi dan memilih untuk tetap bertahan di Kampung Pulo karena atas dasar kepemilikan surat tanah dan bangunan, maka berbeda pula dengan keterangan Bang F berikut ini :

“Saya ini menolak direlokasi karena kalau menurut saya sih sebenarnya kita ini nggak butuh relokasi. Yang kita butuh bukan relokasi, mereka ini kita-kita ini sudah setuju lo sama program Pemda, akan ada normalisasi Kali Ciliwung. Program Pemda kan itu, menormalisasi Kali Ciliwung. Ya sekarang kalau kita bicara lagi, kita bicara segi kemanusiaan, di mana letak kemanusiaan? Sedangkan kita sebagai warga kita sudah mendukung program Pemerintah, silakan pak kalau memang harus digusur. Tapi tolong dong perhatikan nasib kita sebagai manusia. Jangankan manusia, hewan pun marah dipindahkan dari habitatnya, apalagi kita sebagai manusia. Dasar saya nolak kesatu, pertama tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Di mana letak kemanusiaan?.” (Wawancara, 2 April 2017)

Berdasarkan keterangan Bang F, alasan Bang F sebagai warga Kampung Pulo menolak program relokasi ke Rusun adalah karena atas rasa kemanusiaan, dimana

Bang F menganggap bahwa dengan merelokasi mereka ke Rusun sama saja dengan mengusir hewan dari habitatnya. Alasan lainnya yang dikemukakan oleh

Bang F dalam menolak relokasi adalah :

“Pertama tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Di mana letak kemanusiaan. kedua masalah sosial, ya satu masalah sosialnya. Itu yang kita itu. Kalau kita kembali lagi kembali kepada hukum negara, kita ini negara berdaulat, ideologi kita apa sebenarnya? Ideologi kita pancasila. Kita menganut undang-undang dasar 45 sebagai dasar hukum kita ya kan. Kenapa kok selalu bilang kita ini orang pancasila tapi mana? Kita kembali lagi. Sedangkan di pancasila jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana rasa sosial, yang

mana rasa sosial seorang Ahok maksudnya Pemerintah provinsi? Yang boleh dikatakan mungkin ya gini, jadi kayak alat kekuasaan mungkin ya. Jadi alat kekuasaan, semua pinggir-pinggiran Kali dengan dalih merelokasi dan normalisasi, menormalisasi Kali. Itu yang jadi selalu jadi eee' acuan dia. Dan dia memakai Pergub 190. Itu yang selalu dibuat senjata. Itu yang dipakai payung hukumnya Pergub loh selama ini sama dia, Pergub 190 bukan Perda.” (Wawancara, 2 April 2017)

Selain karena atas rasa kemanusiaan, alasan lainnya yang dikemukakan oleh Bang F dalam menolak relokasi adalah ketidakpastian tentang Peraturan Perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan Gubernur yang mengatur kebijakan relokasi Kampung Pulo ke Rusun, Bang F menganggap bahwa Pergub 160 yang mengatur kebijakan relokasi Kampung Pulo ke Rusun ini hanya menguntungkan kepentingan Pemprov DKI dan menjadi alat Pemprov DKI dalam merelokasi mereka ke Rusun Jatinegara Barat. Mengenai rasa kemanusiaan, Bang F juga mengatakan bahwa :

“Terus jadi mungkin maksudnya di sini misalkan pindah itu ngga gampang. Jadi artinya kan kalau kita pindah kan artinya kita pindah secara sosial, Kita pindah secara sosial dan mulai dengan kehidupan yang baru, dengan wajah baru, dengan segala yang baru. Yang susah itu apa? Beradaptasi dengan lingkungan itu paling susah. Wah di Pulo itu kumuh, banjir, kalau menurut dia. Tapi di Pulo kita banjir, kita tidak pernah pusing bangun pagi dengan bayar yang namanya sewa Rusun kaya yang sebelumnya udah pindah kesana. Dulu mereka tidak pernah memikirkan yang namanya bayar sewa rumah. Orang rumah rumah mereka. Paling yang dipikirin listrik doang, air dari dalam tanah. Tapi sekarang mereka harus memikirkan Rusun, biaya Rusun, biaya listrik, listrik voucher, air bayar.” (Wawancara, 2 April 2017)

Alasan dan tujuan yang dikemukakan oleh seorang aktor dengan sumberdaya yang sama bisa saja berbeda, sumberdaya yang sama dengan aktor lainnya yang menolak untuk direlokasi berupa kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan rumah di Kampung Pulo, tidak berarti alasan dan tujuan setiap aktor dalam

menolak direlokasi sama, seperti yang dikemukakan oleh Bang F. Bang F merupakan Ketua RT11/03 yang telah berumur 43 tahun. Bang F sudah tinggal di Kampung Pulo sejak lahir, dirinya menempati rumah bekas peninggalan kedua orang tuanya yang juga lahir dan tinggal di Kampung Pulo, sebelum pada akhirnya kedua orangtuanya wafat. Bang F merupakan generasi ke-2 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo. Dalam wawancara Bang F menyatakan pandangannya mengenai program relokasi, Bang F juga menyatakan alasan dan tujuan dari pilihannya menolak direlokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo. Bang F menyatakan, bahwa :

“Sebenarnya relokasi itu tidak tepat buat warga yang memiliki legal formal. Saya ini punya surat-surat rumah sama tanah loh, PBB juga ada. Yang ada kalau buat warga legal formal itu bukan relokasi, itu pengalihan hak. yang disebut legal formal, ini kampung yang ada warganya, ada surat PBB nya, ada listrik masuk, ada telepon. Yang saya mau tanyakan yang bagaimana yang mau direlokasi? Kalau menurut undang-undang warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung itu tidak tepat dikatakan relokasi. Adanya pengalihan hak. Sebab pengalihan hak jelas-jelas undang-undangnya. Baik secara hukum ee undang-undang apa undang-undang 45 pun disebut pengalihan hak. Pengalihan hak beda dengan relokasi. Cuma Pemprov selalu mengatakan kita mau direlokasi. Makanya bertahan di kampung kita ini, berapa kali kita pernah kampanye waktu debat dibahas masalah relokasi.” (Wawancara, 2 April 2017)

Sedangkan tujuan Bang F sendiri sebagai aktor dalam menolak program relokasi ke Rusun adalah :

“Nah, alasan kita masih bertahan disini, kalau saya pribadi kesatu karena faktor ekonomi, kedua kehidupan sosial atau Pemerintah memperhatikan kehidupan sosial kita di sini. Jangan kata dia mengecek, turun ke lapangan aja ngga pernah. Pas mau pengurusan apa pernah disurvei ke sini? Mungkin saya sebagai perwakilan dari masyarakat ya, saya cuma menyatakan warga di sini tetap dengan tuntutan kita ini, kita butuh ganti rugi. Bukan relokasi, bukan Rusun yang kita butuhin.” (Wawancara, 2 April 2017)

Dari pernyataan di atas, tujuan Bang F sebagai aktor dalam menolak program relokasi ke Rusun adalah karena atas dasar ekonomi. Tujuan yang mendasari Bang F menolak direlokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo adalah karena atas dasar pertimbangan ekonomi yaitu dengan tujuan mendapatkan penggantian rugi berupa uang atas tanah dan bangunan yang ia miliki dan tempati di wilayah Kampung Pulo. Penggantian rugi yang diinginkan oleh Bang F ini, bukan penggantian unit Rusun sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemprov DKI sebelumnya kepada warga Kampung Pulo saat negoisasi mengenai perijinan ganti rugi. Berikut pernyataan Bang F :

“Harapan saya dan mereka warga yang juga nolak ada ganti rugi berupa uang. Pernah ada pertemuan antara pihak warga, DPRD dengan Pemprov, kita itu bakal diganti 25% dari harga NJOP. 25% dari harga NJOP warga Kampung Pulo dari RW 1 sampai RW 3 setuju. Tapi kenyataannya kita kembali lagi, gimana 25% bener ngga? Tapi kenyataannya ini? 0%. Padahal kalau berdasarkan ketok palu 25% itu tidak akan ada gesekan sampai saat ini pasti bakalan pada mau direlokasi.” (Wawancara, 2 April 2017)

Tentunya pilihan untuk bertahan di Kampung Pulo dan tujuan yang ingin dicapai oleh Bang F itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang ada disekitarnya.

Salah satu faktornya adalah bahwa ia tidak memiliki lagi rumah dan harta warisan selain rumah yang ia tempati dan kontrakan peninggalan kedua orang tuanya sebagai mata pencahariannya saat ini di Kampung Pulo, sehingga menjadi alasan

Bang F untuk bertahan di Kampung Pulo dengan tujuan yang telah disampaikan. Satu informan lainnya yang juga merupakan aktor dalam menolak relokasi ke Rusun dan memilih bertahan di Kampung Pulo adalah Bang U, Bang U merupakan warga dari RT13/03 yang telah berumur 50 tahun. Bang U tinggal di Kampung Pulo sejak lahir dimana orang tuanya telah tinggal di

Kampung Pulo sejak tahun 1930 bersama dengan kakek dan nenek Bang U. Bang U merupakan generasi ke-3 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo, saat ini dia menjabat sebagai ketua RW 03. Dalam menjelaskan alasan dan tujuan dari pilihannya menolak untuk direlokasi, Bang U menjelaskan bagaimana ia merasa dibohongi dan dimanfaatkan sebagai aparatur Kampung Pulo oleh Pemprov DKI demi melancarkan kepentingannya yaitu merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun, berikut pernyataan Bang U :

“Pertama saya merasa kecewa dengan Pemprov, saya ngerasa di manfaatin sama Pemprov. Saya ngerasa dibohongi sebagai perwakilan masyarakat disini.” (Wawancara, 5 April 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bang U ini akan rasa kekecewaannya terhadap Pemprov DKI yang merasa dibohongi dan dimanfaatkan sebagai aparatur Kampung Pulo, dengan alasan bahwa :

“Dulu sebelum ada program relokasi ini, saya bersama RT dan RW yang lainnya yang ada di Kampung Pulo di panggil ke Kecamatan untuk rapat, waktu itu juga kan rapat-rapat itu nyampai setahun, ngebahas soal relokasi. Ngebahas itu juga, apa itu namanya “ganti rugi”, sampe pada akhirnya diukur-ukur rumah. Saya sebagai wakil masyarakat otomatis saya juga mensosialisasikan program ini kepada warga Kampung Pulo. Kalau menurut saya kalau program Pemerintah kan relokasi ngga jadi masalah. Waktu itu juga kan rapat-rapat itu nyampai setahun, sampai diukur-ukur rumah. Ngga jadi masalah, ngikutin. Bahkan warga dari harga NJOP sampai 25% harga dari NJOP silakan kalau Pemerintah mau pakai. Intinya warga minta dibayar. Ya udah menyanggupi, udah BPN udah menyatakan sah ini tanah. Nyata-nyata mau seminggu lagi rapat di Kecamatan waktu itu dimentahin. Saya malah yang di kejar-kejar sama warga, ini gimana nih masalah ganti rugi? Kalau begini saya dong yang babak belur, saya malah bentrok sama warga. Jangan manfaatin saya sebagai perwakilan warga harusnya Pemprov sadar.” (Wawancara, 5 April 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bang U akan rasa kekecewaannya, juga menjadi alasan mengapa Bang U memilih menolak direlokasi dan tetap bertahan di Kampung Pulo, Bang U menyatakan bahwa :

“Kalau alasan, awalnya sih saya ngga nolak karena kan mau diganti. Habis mendengar ngga diganti ya nolak saya sama warga, relokasi boleh cuma ya jangan nyusahin rakyat. Jangan sampai rakyat dibikin sengsara. Kayaksemacam saya ini. Ya pinginnya sih ya digantilah. Semacam Gubernur ee Fauzi Bowo, Kampung Melayu. Bahkan yang ngga ada suratnya pun diganti, misalkan orang ni beli 20 juta, beli kontrakan, beli rumah sepetak, diganti itu bisa mencapai 30-35. Sutiyo, jaman Gubernur Sutiyo di Cipinang diganti. Ini Gubernur Ahok ini sampai ngga diganti, kita jadi dibenturin sama aparat. Saya aja jadi ke bentur sama warga sini gara-gara dia. Dia daripada ngeganti rakyat mendingan bayar aparat, rakyat dibenturin sama aparat. Nyata-nyata kok kita dibenturin. Sampai tentara nurunin 2.500 tentara pasukan. Besoknya lagi ditambah lagi sampai 6 ribu aparat coba, bayangin. Rakyat dibenturin sama aparat. .” (Wawancara, 5 April 2017)

Alasan yang dinyatakan oleh Bang U mengapa ia lebih memilih menolak direlokasi dan tetap bertahan di Kampung Pulo, selain karena rasa kekecewaannya terhadap Pemprov juga karena tidak adanya ganti rugi yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemprov DKI. Dalam alasan yang dinyatakan oleh Bang U, ia juga turut membandingkan kebijakan Gubernur DKI yang saat ini menjabat dengan Gubernur DKI periode sebelumnya yang menjabat. Dimana Gubernur periode sebelumnya yang menjabat, dalam program relokasi turut menyertakan ganti rugi kepada warga yang rumahnya direlokasi. Perbandingan yang disampaikan oleh Bang U ini juga menjadi pertimbangan Bang U dalam pilihannya yang memilih menolak untuk direlokasi dan tetap bertahan di Kampung Pulo. Alasan yang disampaikan Bang U juga menjelaskan tujuan yang ingin dicapainya sebagai aktor dalam menolak relokasi, dimana tujuan yang ingin

dicapai Bang U sebagai aktor juga mengarah kepada tujuan ekonomi yaitu mendapatkan ganti rugi. Tujuan tersebut juga dinyatakan oleh Bang U dalam wawancara yang menyatakan, bahwa :

“Nolaknya kita intinya ya ngga diganti ya kita mempertahankan hak kita dong. Itu pun bukan mulai Pemerintah bangun rumah. Alasan kan Pemerintah itu tanah negara. Waktu awal-awalnya sih ngga ngomong-ngomong tanah negara. Karena kan sudah mau diganti 25% dari NJOP. Ya warga silakan, yang penting diganti. Gantilah, nego-nego sampai 25% dari NJOP. Warga udah ngikutin program Pemerintah. Kita bertahan disini, nolak dikarenakan kita membela hak, hak saya. Ngebangun rumah itu kan pakai duit, ngebela hak saya. Satu, begitu. Kedua, ya masalah ekonomi juga mata pencaharian kita di Kampung Pulo. Di sono kalo kita nganggur kita jadi stres. Misalkan kalau kita dagang lagi punya duit ngebangun lagi rumah, dihabisin lagi sama Pemerintah. Bagaimana? Sampai ke situ. Kalau diganti jelas kita akan pindah, kalo ngga jangan harap kita mau angkat ni kaki dari sini.” (Wawancara, 5 April 2017)

Tujuan yang dinyatakan oleh Bang U dari pilihannya yang menolak direlokasi, tidak begitu berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai aktor lain. Faktor ekonomi atau ganti rugi menjadi tujuan utama aktor dalam menolak direlokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo. Latar belakang kehidupan seorang pelaku/aktor juga dapat menentukan bagaimana tujuan yang akan dibuatnya dimasa mendatang. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu Bang I. Bang I merupakan warga dari RW 03. Bang I tinggal di Kampung Pulo sejak lahir dimana orang tua Bang I telah tinggal dan lahir di Kampung Pulo sejak tahun 1937. Bang I merupakan generasi ke-2 yang lahir dan tinggal di Kampung Pulo, bersama dengan istri dan kedua anaknya tinggal di rumah peninggalan kedua orang tua nya bersama dengan keempat saudaranya. Alasan Bang I memilih bertahan dan menolak untuk direlokasi dari

Kampung Pulo adalah karena Bang I menganggap bahwa relokasi merupakan sesuatu yang menyakitkan. Berikut merupakan pernyataan Bang I mengenai alasannya menolak untuk direlokasi :

“Saya menolak relokasi karena apa? Karena menurut pribadi sendiri ya, relokasi itu menyakitkan. Menyakitkan, mensengsarakan orang tua saya dan menderitakan orang-orang yang kecil yang di bawah. Selama pemimpinan dari Suharto itu belum ada pembicaraan-pembicaraan untuk pembongkaran Kali Ciliwung. Dari jamannya Gubernur awal pertama, dari Suryadi sampai ke Bang Yos, sampai ke Foke, belum ada yang berani. Cuma hanya Ahok doang yang berani, sama seperti Jokowi. Jokowi itu janjinya manis sekali. Dia untuk mencari perhatian warga, dia blusukan secara ril, dia masuk ke gorong-gorong, bekerja dengan baik, tapi dibalik pekerjaan itu salah sebenarnya. Dengan arti salahnya apa? Buat kepentingan tim-timnya sendiri. Janji dia kan waktu mau direlokasi itu Kampung Pulo akan diganti, tapi nihil. Kalau orang Betawi bilang itu nihil, omong kosong. Bicara sama orang warga Kampung Pulo jangankan kebun, kandang ayampun akan diganti. Jangankan kebun, kalau kebun tu disebut pepohonan banyak, kandang burung pun diganti, kandang ayam pun diganti. Ternyata nihil. Pas setelah dia naik jabatan kepresidenan, itu ngga ada pembicaraan-pembicaraan lagi Jokowi. Bahkan yang sepenggantinya ini si Ahok ini, dibilang Kampung Pulo ini kampung ilegal, statusnya tanah negara.” (Wawancara, 3 April 2017)

Kemudian alasan Bang I menolak untuk direlokasi adalah karena dirinya tidak setuju dengan konsep kebijakan relokasi ke Rusun, dirinya menganggap bahwa konsep kebijakan relokasi yang memindahkan warga Kampung Pulo ke Rusun dengan menghancurkan bangunan permukiman di wilayah Kampung Pulo tidak sesuai dengan kebutuhan warga Kampung Pulo, berikut adalah pernyataan dari

Bang I :

“Saya kalau memang untuk penataan Kali Ciliwung, itu jangan dari tengah, dari hulunya dulu. Itu yang mengakibatkan banjir dari hulu. Kalau dari hulunya ngga dibenahi, sama juga banjir-banjir juga masih. Alam itu kagak bisa diciptakan dengan Ahok, alam itu yang berkuasa Allah. Adanya musibah, adanya bencana, itu Allah yang takdirin.

kebijakan Jokowi yang tadinya bilang mau dibuat kampung deret kesepakatan warga Kampung Pulo, cara baiknya gimana, nanti saya akan buat kampung deret. Ternyata bukan dibuat kampung deret, rumah kami sendiri yang mau dideret sama beko. Di sini orang Kampung Pulo mau dipindahin tanpa modal, tanpa dikasih biaya, bahkan usahanya pun susah di sini.” (Wawancara, 3 April 2017)

Kemudian dari pernyataan di atas, ditambah lagi dengan pernyataan Bang I yang menyatakan alasan lainnya mengapa ia menolak untuk direlokasi dan dipindahkan ke Rusun. Alasan yang disampaikan Bang I ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, yaitu mengenai alasan sosial mengapa Bang I menolak untuk direlokasi dan dipindahkan ke Rusun, berikut pernyataan Bang I :

“Saya nolak relokasi karena saya dan mungkin warga Kampung Pulo kalau diganti ngga bakal tinggal di situ. Saya sendiri secara pribadi ngga ada mimpi tinggal di gedung semewah Rusun, ngga ada mimpi. Lebih nyaman di pulo, keakrabannya, sosialisasinya paling nyaman di kampung sendiri.” (Wawancara, 3 April 2017)

Kemudian karena fasilitas Rusun yang belum memadai untuk usia lanjut juga menjadi alasan Bang I menolak untuk direlokasi ke Rusun, alasan ini ia kemukakan karena atas dasar pertimbangan latar belakang kondisi orang tua atau faktor keluarga Bang I yang sudah lanjut usia, berikut pernyataan Bang I :

“Kalau di Rusun kita tinggal di atas, katanya lift nya sering mati, jam nyalanya juga gak nentu. Apalagi yang namanya orang tua begini, ngga usaha, ngga apa ya kan. Jadi pingin turun bergaul turun dulu ke bawah. Setelah turun ke bawah ngobrol begini-begitu mikirin lagi tempat tinggal yang lama. Di Rusun bukannya tempat tinggal orang sehat, orang sakit semua. Hidup di Rusun sama juga naik taksi. Tahu naik taksi? Argo berjalan. Buka pintu, argo berjalan. Tiap bulannya mikirin. Tapi kalau hidup di Kampung Pulo yang dulu-dulu itu bagaikan bajaj. Dengan arti bagaikan bajaj apa? Sekali bayar naik udah beres.” (Wawancara, 3 April 2017)

Pernyataan di atas yang menjelaskan alasan Bang I menolak untuk direlokasi ke Rusun, selain karena fasilitas Rusun yang kurang memadai, alasan yang dikemukakan oleh Bang I juga tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan faktor ekonomi keluarga. Alasan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bang I mengenai tujuannya atas pilihan menolak untuk direlokasi ke Rusun dan tetap bertahan di Kampung Pulo. Tujuan Bang I yang pada awalnya bertahan di Kampung Pulo dan menolak untuk direlokasi ke Rusun karena hanya ingin mempertahankan rumah dan kontrakannya yang menjadi mata pencahariannya, kemudian bertambah lagi tujuan mengapa ia menolak untuk direlokasi ke Rusun dan tetap bertahan di Kampung Pulo. Berikut pernyataan Bang I :

“Tujuan saya nolak awalnya, karena saya gak mau kehilangan mata pencaharian saya. Saya tiap bulan disini dapet uang hasil kontrakan mas, lumayan bisa ngehidupin keluarga saya, itu aja tujuan saya pada awalnya. Tapi karena saya lihat ibu saya udah tua begini, anak-anak saya, tinggal numpuk di rumah, tujuan saya bertahan di pulo ini agar saya dapet Pembayaran, penggantian. Saya mau beli rumah di pinggiran Jakarta aja dari ntu uang ganti rugi. Terus cara penggusurannya pun juga ngga tepat. Dengan arti ngga tepat ya kok terlalu banyak di Kampung Pulo yang diambil. Kampung Pulo ini bukannya kampung kumuh. Kalau Pemprov DKI bisa menata, itu lebih cantik, lebih bagus. Ada larangan-larangan untuk buang sampah ke Kali. Ternyata ngga ada itu yang namanya perbaikan-perbaikan. Saya pernah pesan sama wartawan waktu pas lagi Jokowi masih jadi Gubernur saya ditanya sama wartawan untuk relokasi nolak ngga. Oh saya mah setuju-setuju saja tapi dengan catatan penggantian dan secara ril dan secara baik jajak pendapat dulu sama warga, maunya warga apa, maunya kayak apa.” (Wawancara, 3 April 2017)

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan seorang pelaku/aktor juga dapat menentukan bagaimana tujuan yang akan dibuatnya dimasa mendatang. Bang I merupakan salah satu aktor yang melakukan hal tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Bang I dari pilihannya menolak untuk

direlokasi ke Rusun dan tetap bertahan di Kampung Pulo, sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai aktor lainnya dalam menolak untuk direlokasi ke Rusun. Aktor lainnya yang juga memilih bertahan di Kampung Pulo dan menolak untuk direlokasi ke Rusun, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pilihan tersebut adalah mendapatkan penggantian rugi berupa uang atas tanah dan bangunan yang ia miliki dan tempati di wilayah Kampung Pulo.

Tujuan yang disampaikan oleh aktor-aktor ini berdasarkan atas pertimbangan faktor ekonomi. Kebanyakan aktor yang menolak relokasi ke Rusun yang merupakan informan dalam penelitian ini, saat wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Rata-rata mereka aktor ini bekerja di sektor informal dan serabutan. Rata-rata mereka juga mendapatkan penghasilan dari hasil uang sewa kontrakan yang mereka sewakan kepada warga Kampung Pulo yang merupakan pendatang dari luar daerah atau dapat dikatakan disewakan bukan kepada warga Kampung Pulo asli. Jika mereka direlokasi otomatis pendapatan mereka yang berasal dari kontrakan yang mereka sewakan setiap bulannya akan berhenti. Mereka juga mengalami kerugian besar karena rumah dan kontrakan yang mereka miliki tidak akan diganti dengan uang oleh Pemprov, melainkan hanya diganti dengan satu unit Rusun.

Faktor ekonomi lainnya yang akan mereka tanggung saat direlokasi adalah biaya sewa, listrik, air bulanan di Rusun yang harus mereka lunasi setiap bulannya. Belum lagi biaya lain yang tidak terduga, seperti biaya perbaikan unit Rusun dan biaya-biaya lainnya. Alasan-alasan menolak direlokasi dan tujuan yang ingin dicapai informan-informan sebelumnya dari pilihan bertahan di Kampung Pulo

juga berdasarkan atas berbagai macam pertimbangan, yang juga dipengaruhi oleh sumberdaya yang aktor miliki. Sumberdaya yang dimiliki aktor yang menolak untuk direlokasi bukan hanya berbentuk sertifikat tanah, rumah dan PBB. Sumberdaya lainnya yang dimiliki aktor seperti hubungan kekerabatan, jaringan dan solidaritas antara aktor yang satu dengan yang lainnya yang juga ikut menolak direlokasi ke Rusun juga menjadi pertimbangan aktor dalam pilihannya bertahan di Kampung Pulo dan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari pilihan menolak untuk direlokasi ke Rusun.

Aktor akan memilih pilihan berdasarkan tujuannya yang dilakukan secara sadar demi kelangsungan kepentingannya. Disinilah aktor berinteraksi dengan aktor lain sebagai salah satu strategi untuk bertahan di Kampung Pulo. Aktor berinteraksi dengan aktor lain sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingannya (Ritzer G. , 2011). Aktor juga perlu untuk menyandarkan kepentingannya terhadap aktor lain karena dengan hal itu aktor yang menolak untuk direlokasi dapat mengambil keputusan agar dapat memilih sebuah pilihan yang tepat untuk menunjang kepentingannya, dimana dari hampir semua pilihan yang dilakukan oleh aktor dalam penelitian ini saling melibatkan aktor lain.

5.1.1 Modal Sosial

Dalam melakukan penolakan terhadap program relokasi, warga Kampung Pulo sebagai aktor sudah membangun modal sosial dengan warga Kampung Pulo lainnya yang juga menolak relokasi. Modal sosial tersebut terlihat dari adanya rasa saling percaya satu sama lain beserta dengan keberadaan norma-norma yang telah ditaati oleh mereka. Norma-norma tersebut dijadikan aktor sebagai aturan atau mekanisme dalam melakukan tindakan penolakan. Modal sosial dibangun

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau aktor. Modal sosial sangat penting bagi aktor yang dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Modal sosial pada dasarnya merupakan hubungan sosial yang terjalin pada warga masyarakat dalam dasarnya kehidupan sehari-hari, ketika masyarakat berinteraksi dalam waktu yang cukup lama disitulah terbentuk pula modal sosial berupa jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, dan juga nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Coleman J. , 2008).

Sumber daya berupa hubungan kekerabatan dan solidaritas antara aktor dalam mencapai tujuan aktor juga merupakan bentuk modal sosial. Dalam penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo, modal sosial ini ditunjukkan dalam bentuk tindakan efektif yang mereka lakukan bersama-sama. Tindakan efektif ini dapat terbentuk karena adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing aktor dalam pilihan menolak direlokasi dan bertahan di Kampung Pulo. Dengan adanya tindakan efektif ini, kepentingan aktor akan lebih mudah untuk dilakukan ataupun dicapai. Aktor juga memanfaatkan jaringan dan solidaritas yang mereka miliki sebagai sumber daya. Dimana dengan sumberdaya tersebut aktor dapat lebih mudah mencapai tujuan dari tindakan penolakan yang ia lakukan dalam menolak program relokasi. Pemanfaatan sumber daya dalam konteks solidaritas antara aktor juga merupakan bentuk modal sosial yang terbentuk dari relasi kepercayaan antara aktor. Dimana dengan relasi kepercayaan antara aktor, kemudian aktor memberikan wewenang kepada aktor lain untuk merealisasikan kepentingannya. Pemberian wewenang kepada aktor lain juga termasuk dalam modal sosial. Dalam penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi Pemprov DKI, warga Kampung Pulo memberikan

wewenang kepada Tokoh Kampung Pulo untuk mengambil keputusan dalam memilih tindakan bersama yang dilakukan dalam menolak relokasi. Dari pemberian wewenang tersebut, kemudian menjadikan Tokoh Kampung Pulo sebagai aktor Eksekutif dan warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff. Dikatakan sebagai aktor Eksekutif, adalah karena Tokoh Kampung Pulo memiliki posisi yang berbeda dengan warga Kampung Pulo, dimana mereka sebagai Tokoh Kampung Pulo lebih dihormati dan disegani oleh warga Kampung Pulo. Tokoh Kampung Pulo disebut sebagai aktor Eksekutif, juga karena tokoh Kampung Pulo sebagai aktor memiliki peran dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam memilih tindakan yang dilakukan dalam menolak relokasi.

Dalam pengambilan keputusan, Tokoh Kampung Pulo sebagai pembuat keputusan (*decision making*) dari tindakan yang akan dilakukan oleh warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi, mengambil keputusan berdasarkan tujuan dan kepentingan yang sama dengan warga Kampung Pulo. Dari keputusan yang dibuat oleh Tokoh Kampung Pulo sebagai aktor Eksekutif, Keputusan tersebut akan sangat mempengaruhi tindakan yang diambil warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff dalam menolak program relokasi. Keputusan aktor Eksekutif dan Tindakan aktor Staff, akan saling terkait satu sama lainnya, karena aktor Eksekutif dan aktor Staff, juga memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dari tindakan mereka dalam menolak relokasi.

Dalam menjalankan tindakan yang sudah diputuskan oleh tokoh Kampung Pulo sebagai aktor Eksekutif, warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff melakukan tindakan penolakan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh aktor Eksekutif. Warga Kampung Pulo disebut sebagai aktor Staff, karena warga

Kampung Pulo memiliki posisi yang berbeda dengan tokoh Kampung Pulo. Perbedaan posisi tersebut, juga mempengaruhi seorang aktor dalam mengambil sebuah keputusan. Tokoh Kampung Pulo, sebagai aktor Eksekutif yang dihormati dan disegani oleh warga Kampung Pulo, memiliki kelebihan dari posisinya sebagai Tokoh dibandingkan dengan warga biasa. Dimana Tokoh Kampung Pulo dapat menentukan dan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi. Sedangkan warga Kampung Pulo sendiri sebagai warga biasa, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan dan mempengaruhi tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi.

Warga Kampung Pulo hanya dapat melakukan tindakan penolakan seperti yang sudah diputuskan dan disepakati bersama dengan Tokoh Kampung Pulo, sehingga menjadikan warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff. Yaitu sebagai aktor yang menjalankan keputusan yang sudah diputuskan oleh aktor Eksekutif. Kemudian dalam perannya, tokoh Kampung Pulo sebagai aktor eksekutif juga memiliki peran yang berbeda dengan warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff. Saat bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI, yaitu Camat Jatinegara, tokoh Kampung Pulo sebagai aktor Eksekutif berperan sebagai perwakilan dari warga dalam melakukan penolakan dan menuntut hak mereka dari adanya program relokasi ini. Sedangkan warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff, hanya bersuara dari belakang dan mengawal tokoh Kampung Pulo saat bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI atau Camat Jatinegara. Saat bertemu dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, untuk melakukan musyawarah dengan DPRD dan Pemprov DKI, warga Kampung Pulo sebagai aktor Staff juga melakukan hal yang sama.

Yaitu hanya bersuara dari belakang dan mengawal tokoh Kampung Pulo sebagai aktor Eksekutif dalam pertemuan tersebut.

Modal sosial lainnya yang digunakan aktor dalam tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI, adalah dengan memanfaatkan relasi jaringan aktor dengan aktor korporat, yaitu pihak LSM Ciliwung Merdeka. Modal sosial tersebut dimanfaatkan oleh aktor dalam relasi mencapai kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam tindakan kerjasama ini juga terdapat sebuah kepercayaan yang saling terbangun antara aktor warga Kampung Pulo dan LSM sebagai aktor korporat. Dimana relasi kepercayaan tersebut juga merupakan suatu bentuk modal sosial yang dimiliki oleh warga Kampung Pulo dalam relasi bersama aktor korporat. Coleman (2011) menyebut relasi kepercayaan yang terbangun antara aktor warga Kampung Pulo dan LSM sebagai aktor korporat sebagai relasi kepercayaan simetris. Yang berarti bahwa relasi kepercayaan dimana setiap pelaku menjadi trutor sekaligus trustee.

5.2 Tindakan dan Perilaku Kolektif Aktor

Dalam mencapai tujuan dari tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI, warga Kampung Pulo melakukan tindakan efektif dalam mencapai tujuan dari tindakan penolakan. Tindakan efektif yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuannya, pertama adalah dengan tindakan bertahan di Kampung Pulo dan tidak mau dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat. Tindakan ini aktor lakukan agar mereka tidak direlokasi dari Kampung Pulo sebelum uang ganti rugi mereka diganti oleh pihak Pemprov DKI. Tindakan

bertahan ini juga mereka lakukan agar unit Rusun yang saat ini telah disiapkan oleh Pemprov DKI tidak terisi, dengan harapan unit Rusun tersebut di isi terlebih dahulu oleh warga lainnya yang sebelumnya sudah direlokasi. Tindakan ini dianggap efektif oleh aktor karena dengan cara bertahan di Kampung Pulo maka pihak Pemprov tidak akan merelokasi mereka dari Kampung Pulo sampai dengan saat ini, pernyataan ini berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yaitu

Babe AO yang menyatakan, bahwa :

“Tindakan kita dalam menolak relokasi ini, ya pertama kita nolak direlokasi. caranya gimana? Dengan tindakan bertahan disini di pulo. Kita bertahan disini dari dulu, dari awal adanya program ini, sampe yang wilayah rw 02 dulu digusur sampe sekarang juga kita kaga digusur. Karena apa? Karena kita bertahan disini, kita tetep dengan kesepakatan kita. Kita jangan goyah, sebelum ada ganti rugi pokonya kita kaga bakal pergi dari sini.”(Wawancara, 28 Maret 2017)

Kemudian pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan aktor lainnya yaitu

Babe IS, Babe IS menyatakan :

“Nah sekarang dengan kita bertahan disini, kebukti kan mereka kaga ada yang berani gusur kita dari sini. Karena apa? karena kita punya surat. Udah skak mat mereka (Pemprov DKI). Kita emang orang bodoh, tapi yang namanya kebenaran pasti bakal terungkap. Kita berani nentang Pemerintah karena menurut kita cara kita benar, kita gak salah. Ini tanah kita, rumah kita, saya yakin saya gak akan digusur. Saya juga gak akan mau digusur sebelum ganti rugi dikasih dulu.” (Wawancara, 29 Maret 2017)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Babe Y :

“Kita pokoknya bareng-bareng mempertahankan kampung. Caranya gimana? Kita ambil tindakan sesuai kesepakatan kita sama warga lain yang juga nolak direlokasi. kita bertahan dulu disini di kampung kita sendiri, di rumah kita sendiri. Kita ngga akan mau direlokasi sampe benar-bener ada ganti rugi yang jelas. Bukan kaya dulu yang tiba-tiba diganti sama unit Rusun bukan diganti uang. Kita bertahan disini bukannya kita diem bukan, kita bertahan disini biar kita gak

direlokasi, biar kita juga dapet ganti rugi. Kalo gak diganti rugi kita mau tinggal dimana? Di Rusun? Saya gak pernah mimpi tinggal di Rusun. Saya lebih nyaman di pulo walaupun disini selalu kebanjiran.“
(Wawancara, 1 April 2017)

Ketiga aktor di atas menjelaskan bagaimana tindakan yang mereka ambil sebagai aktor dalam menolak relokasi ke Rusun, tindakan yang sama juga dilakukan oleh aktor lainnya yang ikut menolak direlokasi ke Rusun, yang merupakan informan dalam penelitian ini. Aktor tersebut adalah Bang F, Bang U, dan Bang I. Dalam wawancara bersama peneliti, Bang F menjelaskan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuannya sebagai aktor dalam menolak relokasi ke Rusun adalah dengan cara bertahan di Kampung Pulo. Bang F menjelaskan :

“Pertama kita nolak dengan cara tetep bertahan disini. Kita ambil sikap, ambil tindakan. Kita kenapa menolak? Karena kita mau dari Pulo dipindahin ke Rusun, kagak kita menolak. Silakan Pemerintah menjalankan program ya silakan, kita terima, kita ngga menolak program, program Pemerintah kita ngga menolak kok. Cuma yang kita ngga suka ini dengan caranya. dilakukan represif terhadap rakyat, dipindahkan mereka ke Rusun dengan yang tadinya mereka punya rumah jadi ngontrak. Ada yang sampai dari pertamanya hidup duduk-duduk di Kampung Pulo tiap bulan nerima duit kontrakan, sampai di Rusun bayar. Tadinya dia hidup dari uang apa? Uang kontrakan. Dia punya rumah, punya kontrakan. Setiap bulan dia tinggal nerima kontrakan, ada yang 400, ada yang 500 perbulan. Duduk aja nganggur dia bisa dapat gaji. Di Rusun terbalik. Dia duduk di sini, nganggur, malah bayar. Sampe sekarang kita gak dipindahin juga, kita gak masalah kebanjiran disini. Mungkin kalau orang-orang orang Kampung Pulo bilang banjir sudah menjadi ciri khas Kampung Pulo gitu. Ya ini sih maaf, mungkin kalau sebagian banyak orang Pulo, lebih baik gue kebanjiran daripada pindah ke Rusun.“ (Wawancara, 2 April 2017)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bang F dalam wawancara juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bang U, Bang U menjelaskan :

“Tindakan? Kalau tindakan yang saya lakukan ya yang sesuai sama kesepakatan sama temen-temen disini yang juga nolak direlokasi. Tindakan kita yang jelas dengan kita bertahan disini, kita jaga kampung kita, rumah kita dari itu Pemerintah yang mau ambil rumah kita secara paksa. Kita tetep bertahan disini di pulo. Kita tetep dengan pendirian kita. Walaupun katanya disini kita kebanjiranlah, kita kena penyakit. Gak ada itu semua, kita disini baik-baik aja kita sehat-sehat aja, mau gimana pun kita gak akan mau direlokasi.” (Wawancara, 5 April 2017)

Aktor yang lainnya Bang I, dalam wawancara juga menjelaskan hal yang serupa.

Bang I menjelaskan :

“Saya ini mas ngga banyak tuntutan orangnya, saya ngga mau ngelawan Pemerintah sebenarnya. Tapi karena Pemerintah menzalimi saya, orang tua saya dan keluarga saya, maka saya ngelawan. Saya nolak direlokasi. Saya ini yakin tindakan yang saya ambil sama temen-temen ini ngga salah, saya 100 persen yakin. Tindakan yang saya ambil ya sama kaya yang temen-temen bilang, tindakan pertama kita adalah caranya bertahan disini di kampung kita. Yang namanya kampung tempat kita lahir, tempat kita di gedein, tempat kita nyari makan juga, ya kita tetep bertahan disini mas. Itu tindakan kita.” (Wawancara, 3 April 2017)

Dari penjelasan aktor-aktor di atas, tindakan pertama yang dipilih oleh aktor dalam menolak relokasi Kampung Pulo, dinilai para aktor cukup efektif dalam menghadang upaya Pemprov DKI yang ingin merelokasi mereka dari Kampung Pulo ke Rusun. Tindakan efektif yang dilakukan para aktor ini merupakan bentuk tindakan yang dibangun atas kesadaran dan kesepakatan para aktor dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai para aktor dari pilihan menolak direlokasi ke Rusun. Tindakan yang dilakukan oleh para aktor dengan cara bertahan di Kampung Pulo, merupakan bentuk kesepakatan dari hubungan kekerabatan dan solidaritas yang ditunjukkan oleh para aktor. Solidaritas yang dimiliki oleh para

aktor sebagai sumber daya atau modal sosial ini juga dimanfaatkan oleh para aktor dalam mencapai tujuan dari pilihan aktor.

Kemudian tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh aktor dalam mencapai tujuan, adalah dengan cara melakukan aksi protes kepada kantor Kecamatan sebagai perwakilan dari Pemprov DKI. Aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi. Aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi, karena warga menganggap bahwa pihak Kecamatan juga harus ikut bertanggung jawab atas tidak adanya ganti rugi dalam program relokasi. Dimana warga mengatakan bahwa pada perjanjian awal saat rapat antara camat Jatinegara dengan warga Kampung Pulo yang menyatakan bahwa akan ada ganti rugi dari program relokasi ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Babe AO sebagai tokoh warga Kampung Pulo, bahwa :

“Tindakan selanjutnya, kita, saya bersama warga pulo ini protes ke Kecamatan. Kita protes kenapa tadinya ada uang ganti rugi sekarang tiba-tiba kaga ada? Ini ada apa? Kita udah mau ngikutin program Pemerintah sekarang kenapa kita malah di bohongin. Saya sampaikan ke Camatnya Pak Sofyan, saya bilang “saya sebagai perwakilan warga, saya sangat keberatan dengan program ini. Saya bersama warga tidak akan pergi dari kampung saya Kampung Pulo sebelum ada ganti rugi”, garis besarnya itu saya sampein ke camatnya. Itu 2 tahun yang lalu saya sampein, sampe sekarang kita juga kaga direlokasi karena mereka gak bisa ngasih uang ganti rugi. Berarti protes kita juga ampuh kan.”
(Wawancara, 28 Maret 2017.)

Dalam wawancara dengan aktor lainnya yaitu Babe IS, Babe IS juga menjelaskan bagaimana perilaku kolektif yang ia lakukan dengan aktor lainnya saat melakukan aksi protes ke kantor Kecamatan Jatinegara. Babe IS menjelaskan, bahwa :

“Sama kaya yang tadi di bilang sama Babe Onin tadi, tindakan kita selanjutnya sebagai warga yang menolak direlokasi ya kita protes ke kantor Kecamatan. Ini gimana nih kok melenceng dari perjanjian awal? Kasarnya gitulah kita protes kesana. Kan tadinya kita katanya mau dikasih ganti rugi 25 persen dari NJOP, kok tiba-tiba berubah jadi kaga diganti. Makanya kita semua protes kesono, kita kawal Babe Onin sebagai tokoh warga dan saya juga sebagai perwakilan warga Kampung Pulo yang menolak dan mempertahankan kampung kita.”
(Wawancara, 29 Maret 2017)

Penjelasan yang dijelaskan oleh Babe IS juga tidak begitu berbeda dengan penjelasan yang disampaikan Babe Y, Babe Y yang juga merupakan aktor yang menolak program relokasi. Babe Y menjelaskan :

“Ya kita semua samalah, tindakan kita ini berdasarkan kesepakatan udah pokoknya. Kita semua ini bukan temen bukan tetangga, ibaratnya kita semua ini saudara disini. Saya ya tetep nolak relokasi, saya juga ikut protes ke kantor camat. Saya protes karena waktu itu juga rumah saya udah di ukur mas, udah di foto-foto, sampe orang BPN masuk ke rumah saya. Katanya mau diganti, mana?. Pokoknya tindakan kita ini sama ngga ada bedanya semua disini yang nolak.”
(Wawancara, 1 April 2017)

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Bang F, Bang F menjelaskan bahwa :

“Tindakan kita selanjutnya kita protes ke pak Sofyan, ke pak camatnya langsung. kita keberatan, hujan intruksi itu rapat. Tapi kembali lagi, mereka (camat) bilang ngga tau pokoknya ini semua tidak ada ganti rugi 0%, semua harapkan bubar. Buat apa dia ada ukur-mengukur, sampai didatengin orang BPN? Orang BPN didampingi oleh pihak Kelurahan ya kan. Pihak Kelurahan minta bantuan orang BPN karena mereka tahu bakal dibayar. Tapi kenyataannya tidak, sampai PBB yang punya tunggaan waktu itu disuruh lunasin. sebelum ada relokasi itu rumah kita diukur, seolah-olah kayak orang mau dibayar tu rumah. Difoto, tapi setelah ada pengukuran, difoto, sampai diadakan pertemuan di Kecamatan ternyata ending dari semua rapat itu tidak ada ganti rugi, 0 persen, ya ngga.”(Wawancara, 2 April 2017)

Tindakan melakukan protes ke kantor Kecamatan Jatinegara seperti penjelasan yang disampaikan oleh keempat aktor di atas, juga disampaikan oleh Bang U dan

Bang I. Bang U sebagai aktor juga menjelaskan :

“Waktu kita bertindak protes ke kantor Kecamatan Jatinegara itu bener-bener emosi saya waktu itu, sampe gebrak meja saya. Saya emosi, karena itu tadi saya bilang saya merasa dimanfaatkan sama Pemprov sama camat. Rumah kita juga mau diancurin, kita mau dipindahin se enaknja aja ngga diganti lagi. Udah pokonya kalo saya omongin nanti saya malah emosi kalo di inget lagi. Yang penting sekarang kita kaga di gusur itu aja. Tapi kita ngga tau ke depannya bagaimana, makanya kita terus jaga persatuan kita ini warga pulo semuanya yang nolak relokasi.” (Wawancara, 5 April 2017)

Dari tindakan yang disampaikan oleh seluruh aktor di atas, tindakan yang dilakukan para aktor dengan tindakan melakukan protes ke kantor Kecamatan merupakan bentuk tindakan efektif yang dilakukan aktor demi mencapai tujuan.

Selain untuk menolak adanya program relokasi, tindakan protes yang dilakukan aktor ini juga dilakukan agar pihak Pemprov memberikan mau memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut, harus sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama warga Kampung Pulo jika program relokasi dilaksanakan.

5.2.1 Norma

Dalam teori pilihan rasional yang berlandaskan pada tindakan individu yang rasional, posisi norma seperti pedoman tindakan. Sebagaimana yang disampaikan Coleman (2011) bahwa norma-norma menentukan tindakan-tindakan mana yang dianggap tepat atau tidak tepat, pantas atau tidak pantas oleh sekelompok orang.

Dari situ terlihat bahwa norma memberikan makna tentang tindakan, serta disertai oleh sanksi yang menaruh konsekuensi terhadap setiap tindakan pelaku. Dari tindakan efektif yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam menolak relokasi, kemudian muncul norma yang mengatur mekanisme tindakan

penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo sebagai aktor. Norma tersebut muncul sejak pertama kali warga Kampung Pulo sepakat melakukan tindakan bersama dalam menolak program relokasi dan dipertahankan hingga saat ini. Norma tersebut dapat terlihat dari tindakan kolektif yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam menolak program relokasi, dimana warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan kolektif yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan dari penolakan. Seperti yang disampaikan oleh

Bang I :

“Saya kalo bertindak sesuai sama yang dibilang Babe Onin, karena dia buat saya juga orang tua saya. Dia ibarat orang yang dituakan disini, tokoh warga lah istilahnya. Kita semua bertindak sesuai aturan main, sesuai kesepakatan sama temen-temen yang laen. Kita gak ada disini bertindak sesuai mau nya sendiri, apalagi membelot itu namanya penghianatan bakal dimusuhi sama orang-orang disini. Saya ikut ngawal waktu protes ke Kecamatan. Saya juga ikut protes, karena saya menuntut hak saya. Saya ngga mau kalau saya direlokasi saya gak dapet apa-apa, ya allah jangan sampe dah. Mau tinggal dimana saya mas? Makanya apapun yang dilakuin sama warga untuk nolak relokasi saya ikut yang penting saya dapet ganti rugi. Saya juga mau mempertahankan tanah saya.” (Wawancara, 3 April 2017)

Tindakan protes yang dilakukan oleh aktor juga merupakan bentuk kesepakatan yang mereka bentuk dari musyawarah yang selama ini rutin dilaksanakan oleh aktor yang menolak program relokasi. Dan tindakan protes yang dilakukan aktor ini, juga dapat dikatakan cukup efektif karena sampai dengan saat ini mereka belum juga direlokasi dari Kampung Pulo. Seperti yang dikatakan oleh Bang F, bahwa :

“Alhamdulillah kita setiap malem jumat yasinan ngga pernah putus, setelah yasinan itulah biasanya kita semua pada bahas masalah relokasi. Kita semua musyawarah, cari jalan keluarnya bagaimana seupaya kita dapet nuntut hak kita, suapaya kita juga gak main di gusur aja. Dengan begini kita semua semakin kompak, kita tetep

pegang aturan dan kesepakatan kita dalam menolak relokasi ini, semakin teguh pendirian kita menolak relokasi. Dan Alhamdulillah juga sampe saat ini kita ngga di gusur-gusur.“ (Wawancara, 2 April 2017)

Dalam menolak program relokasi dan dalam mencapai tujuannya, aktor melakukan berbagai macam tindakan efektif yang telah menjadi aturan dan kesepakatan bersama. Tindakan yang dilakukan oleh aktor selain dengan tindakan bertahan di Kampung Pulo dan tindakan protes ke kantor Kecamatan, tindakan lainnya yang menjadi kesepakatan aktor demi mencapai tujuannya dari pilihan menolak program relokasi adalah dengan cara melakukan aksi demo. Aksi demo ini aktor lakukan sebagai bentuk penolakan aktor terhadap program Pemprov DKI yang berupaya merelokasi warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Aksi demo tersebut dilakukan dengan orasi dan membentangkan spanduk penolakan relokasi di jembatan jalan raya Jatinegara Barat atau tepatnya di depan pasar Jatinegara. Demo yang dilakukan oleh aktor ini merupakan kelanjutan dari tindakan aktor sebelumnya, dimana aktor yang menolak program relokasi sebelumnya melakukan tindakan menolak program relokasi dengan aksi protes yang dilakukan di kantor Kecamatan Jatinegara. Aksi demo yang dilakukan oleh aktor ini juga sebagai simbol perlawanan warga Kampung Pulo terhadap tindakan represif Pemprov DKI yang juga menurunkan aparat keamanan dalam aksi demo yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo. Seperti yang pernyataan yang disampaikan oleh Bang I saat wawancara dengan peneliti, Bang I menyampaikan bahwa :

“Aksi kita, tindakan kita setelah aksi protes waktu itu, kita gelar aksi demo di jembatan, di pulo atas. Berapa kali kita demo ya, ada 3 kali kalo gak salah. Saya sama temen-temen ini, sama warga pulo semua kita demo disana. Kita teriak, kita menolak direlokasi, kita tagih perjanjian awal kita mau diganti rugi katanya. Kita juga bawa

spanduk, sampe waktu itu kita di liput sama media, apa itu ya metro apa tv one apa setv saya lupa. Saya juga di wawancara, saya bilang sama tv saya ini bukan warga nolak yang melawan Pemerintah. Saya nolak direlokasi karena saya nuntut hak saya dulu baru saya mau pindah, saya tagih janji mereka itu pada para penguasa yang mau gusur saya. Sampe apa coba? Sampe kita mau dibentrok sama abri sama satpol pp padahal kita ini bukan bandit, bukan penjahat, kita nuntut hak kita.“ (Wawancara, 3 April 2017)

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh tokoh Kampung Pulo, Babe AO

dan Babe IS. Babe AO menyatakan, bahwa :

“Kenapa ada aksi demo? Karena setelah aksi protes dulu ke kantor camat, kita sepakat tindakan kita berikutnya kita gelar demo. Aksi demo ini sebagai aksi terbuka lah, biar warga Jakarta juga tau kalo kita bukan ngga mau direlokasi, kita mau direlokasi tapi diganti dulu rumah kita, kampung kita diganti dulu. Jangan dibuat seola-olah kita melawan Pemerintah, itu di tv kan begitu dibuat nya. Aksi demo juga kita lakukan sebagai bentuk protes kita terhadap Pemerintah DKI, Gubernur, kita mempertahankan kampung kita ini. Di aksi demo itu saya ngga ikut terjun langsung, karena saya udah kaga kuat lagi. Saya mendukung dari belakang, saya beri dorongan kepada koordinator kepada semua warga pulo saya beri mereka dorongan. Jangan mundur, jangan anarkis, jangan menyerang aparat itu. Sampe yang terakhir akhirnya pecah juga, perang sama aparat waktu itu. Karena waktu itu kita diserang duluan pake gas air mata.“

(Wawancara, 28 Maret 2017)

kemudian disusul dengan pernyataan Babe IS, yang menyatakan :

“Saya waktu demo itu gak ikut, sama kaya si onin udah gak kuat fisik saya. Tapi saya tetep dukung semua temen-temen yang berangkat, kita doain mereka semua dari rumah. Kalo ditanya tindakan, ya ini tindakan kita udah. Semua tindakan kita sama, kita gak asal main tindakan sendiri. Semua udah kita atur, kita udah sepakatinlah. Kemarin demo yang terakhir itu ricuh karena tindakan aparat yang main hakim sendiri. Inget kita cuma nolak relokasi, cuma menuntut hak kita.“ (Wawancara, 29 Maret 2017)

Aksi demo yang dilakukan para aktor sebagai bentuk tindakan dalam menolak program relokasi, juga merupakan bentuk tindakan yang telah disepakati

bersama oleh para aktor sebagaimana tindakan yang sebelumnya disepakatai oleh para aktor, tindakan aksi demo yang dilakukan aktor ini juga merupakan tindakan efektif yang dilakukan oleh aktor dalam mencapai tujuan. Tindakan demo yang dilakukan aktor ini, kemudian juga mendapatkan respon dari dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) DKI Jakarta. Komisi B DPRD DKI Jakarta kemudian mengundang perwakilan warga dari Kampung Pulo untuk berdialog bersama membahas masalah relokasi dan tuntutan warga Kampung Pulo. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bang U, bahwa :

“Aksi demo kita yang terakhir itu, yang sampe kita dibentrok sama aparat. Itu bener-bener deh ahok, maksudnya apa kita dibenturin sama aparat begitu? Tindakan kita ini tidak menyalahi aturan, kita sampein unek-unek kita, tuntutan kita. Kita gak anarkis, saya waktu itu inget betul kita disiram pake gas air mata, waduh bener-bener. Kita ya ngelawan, kita serang pake petasan itu, hujan batu waktu itu. Setelah aksi demo itu ngga lama tahun kemarin kita langsung di panggil komisi B DPRD, saya juga waktu itu berangkat kesana ke kantor dpr. Disana kita ngebahas masalah ganti rugi, bareng DPRD bareng Pemprov juga, kita sampein semua tuntutan dan meminta hak kita sebagai warga Kampung Pulo.” (Wawancara, 5 April 2017)

Aksi demo yang dilakukan oleh aktor, yang berakhir ricuh dan pemanggilan oleh komisi B DPRD DKI Jakarta, juga membuat aktor yang ikut aksi demo menolak program relokasi ditahan di Polsek Jatinegara. Seperti yang disampaikan Bang F :

“Tindakan aksi demo kita ini, dari mulai yang pertama dan kedua itu damai-damai aja, ama-aman aja. Nah yang ketiga ini yang terakhir kemarin, gak karu-karuan udah gak bisa saling kontrol. Sampe adik saya itu si ayef di tangkep sama polisi nginep sehari di Polsek, eh dua hari. Kemarin ada 20 orang di tangkep gara-gara dianggep ngelawan aparat, kita ngga ngelawan gimana?kita disiram gas air mata. Kita demo kita di usik, di bilang ganggu ketertiban. Terus kalo bukan kita yang perjuangin hak kita siapa lagi? Yang pertahanin kampung kita siapa lagi?. Tapi ini semua ada hikmahnya, alhamdulillah setelah kejadian itu, tindakan kita dapet respon dari DPRD, setelah kita

dipanggil kesana kita datengin mereka. Kita musyawarah deh disana.”
(Wawancara, 2 April 2017)

Kemudian setelah musyawarah dengan DPRD, yang juga tidak menemukan kesepakatan yang jelas antara warga Kampung Pulo dengan Pemprov DKI, aktor yang menolak program relokasi ini mengambil tindakan lainnya sebagaimana yang telah menjadi aturan dan disepakati sebelumnya oleh para aktor. Tindakan yang dilakukan oleh aktor ini, dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh aktor. Jaringan yang dimiliki aktor, dimanfaatkan aktor untuk mencapai kepentingan atau tujuan aktor. Seperti yang dikatakan oleh Coleman, dimana aktor yang menolak program relokasi dan memilih bertahan di Kampung Pulo memanfaatkan sumberdaya atau modal sosial yang mereka miliki sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pilihan menolak direlokasi. Modal sosial ini ditunjukkan dalam bentuk tindakan efektif yang mereka lakukan bersama-sama dan memanfaatkan jaringan yang mereka miliki sebagai alat dari tujuan yang ingin aktor capai. Pemanfaatan jaringan ini, dilakukan dalam bentuk tindakan aktor yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5.2.2 Aktor Korporat

Dalam melakukan tindakan kolektif, aktor tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas sebagaimana yang telah menjadi norma dan disepakati oleh aktor. Coleman menyatakan, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan. Namun dalam mencapai tujuan pribadi dan kolektivitasnya, ketika aktor memiliki keterbatasan sumber daya, aktor tidak hanya cukup untuk melakukan tindakan efektif bersama dengan aktor lainnya. Aktor juga membutuhkan bantuan dari aktor yang lain yang disebut sebagai aktor korporat. Kerjasama yang

dilakukan oleh aktor dengan LSM ini juga merupakan bentuk kerjasama aktor dengan aktor korporat. Aktor korporat LSM disini muncul sebagai upaya dari kelompok sosial untuk mendorong warga Kampung Pulo sebagai aktor secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dari penolakan terhadap program relokasi.

Kerjasama yang dilakukan oleh aktor dengan aktor korporat LSM ini juga dibentuk atas kesepakatan para aktor, tindakan ini dilakukan aktor karena aktor berupaya mencari alternatif lainnya untuk menolak program relokasi dan menuntut ganti rugi jika program relokasi dilaksanakan. Tindakan kerjasama dengan LSM ini sebetulnya telah dilakukan oleh aktor sejak tahun 2015 yang lalu, yang kemudian kembali dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dan tindakan ini juga dilakukan aktor demi melindungi mereka dari ancaman relokasi secara represif yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Pemprov DKI. hal tersebut seperti pernyataan yang disampaikan oleh Babe AO, tokoh Kampung Pulo yang mengatakan :

“Jadi setelah kita dari DPRD, kan belum jelas itu gimana kelanjutannya. DPRD juga ngga bisa ambil kebijakan sendiri katanya. Kemudian dateng bantuan dari temen-temen LSM ini, ada ni LSM. Alhamdulillah makin banyak yang ngedukung kita, kita bersyukur bisa dibantuin, kerjasama lah sama mereka. Sebelumnya kita juga udah pernah kerjasama sebelum sebagian wilayah pulo kena gusur yang kemaren. Kita sama-sama kumpul sama LSM di karang taruna kita bicarain masalah kita, langkah-langkah kita kedepannya bagaimana. Seteleah sekian kali kita rapat, kita tetepin langkah kita selanjutnya kita gugat Pemprov ke Pengadilan.”(Wawancara, 28 Maret 2017)

Kerjasama yang dilakukan aktor dengan LSM ini, dilakukan dengan LSM Ciliwung Merdeka. LSM Ciliwung Merdeka ini merupakan LSM yang pertama

berinisiatif membantu warga Kampung Pulo untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan mereka terhadap program relokasi. Seperti yang dikatakan oleh Bang F :

“Kerjasama kita sama LSM ini, apa itu namanya Ciliwung Merdeka dapat terbentuk karena apa? Karena mereka berinisiatif untuk membantu kita menuntut hak-hak kita ini. Kita ya otomatis ngga nolak, karena ke DPRD juga udah mentok, apa lagi mau ke Pemprov? Di tendanglah kita. Hahaha. Kita kerjasama sama mereka juga agar kita ini aman, aman dalam arti kita jadi semakin tidak takut untuk digusur sewaktu-waktu sama Pemerintah. Mereka juga membantu kita untuk menuntut hak kita ke Pemprov, nanti mau dibawa ke Pengadilan biar kita bisa memenangkan gugatan.”(Wawancara, 2 April 2017)

Kerjasama sama antara aktor dan LSM ini juga telah berjalan dengan dilakukan rapat sebanyak dua kali, yang terakhir dilaksanakan pada bulan januari yang lalu.

Seperti pernyataan lanjutan dari Bang F :

“Sejak awal kerjasama kita sama itu LSM, tahun 2016 kemarin sampe sekarang kita udah rapat dua kali. Iya dua kali rapat kita, terakhir bulan januari abis tahun baru disitu kita bahas langkah-langkah kita selanjutnya agar tuntutan kita bisa dimenangkan di Pengadilan. Abis rapat itu kita semua warga yang menolak direlokasi, disuruh ngumpulin fotokopi ktp, kk, sama PBB. Itu saya kurang paham buat apa, kita juga buat kesepakatan tertulis sama mereka bahwa kita akan tetep menuntut hak kita dan ngga akan berubah sampe kapanpun ke Pengadilan.” (Wawancara, 2 April 2017)

Kerjasama yang dilakukan oleh LSM ini juga dianggap oleh Bang I, sangat membantu mereka dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada

Pemprov DKI Jakarta. Bang I menuturkan, bahwa :

“Kerjasama kita sama LSM ini, juga sangat membantu kita. Kita jadi makin kuat karena kita di dampingi mereka. Sekarang orang Kelurahan sama orang Kecamatan mau datang ke kita, minta kita untuk segera pindah ke Rusun juga ngga berani. Mereka mau ngancam gusur kita juga ngga berani, karena kita sekarang udah di dampingi sama LSM loh ngga tanggung-tanggung. Apalagi sekarang ini, alhamdulillah sih katanya perwakilan LSM kemarin ini katanya sekarang lagi proses ke Pengadilan. Kita disuruh nunggu sampe

pemilu besok ini selesai. Itu yang lebih tau intinya pak udin, karena dia lebih masuk ke dalam LSM.“ (Wawancara, 3 April 2017)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Babe Y :

“Tindakan kita ini dengan kerjasama sama LSM, itu sangat berpengaruh bagi saya sebagai warga yang menolak. Sangat membantulah. Karena saya melihat ada harapan dari kerjasama dan bantuan LSM ini. Ini kan kemarin kita rapat, kita ngumpulin berkas-berkas itu, sama bikin perjanjian yang di tandatangi oleh Bang Udin sebagai perwakilan warga dia itu. Kita udah bikin perjanjian sama LSM, kita siap bawa masalah ini ke Pengadilan. Biar kita juga ngga was-was dari ancaman relokasi, biar kita dapet ganti rugi kalo kita direlokasi. Percuma kalo selama ini kita menolak dipindah, kita bertahan disini tapi kalo pada akhirnya ngga diganti kan buat apa?.” (Wawancara, 1 April 2017)

Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Babe IS sebagai tokoh Kampung

Pulo mengenai kerjasama dengan LSM, ia mengatakan bahwa tindakan kerjasama yang dilakukan dengan LSM :

“Tindakan kerjasama ini, ibaratnya alternatif terbaik bagi kita agar kita dapet ganti rugi. Kan gitu bahasanya, kan sudah saya jelasin waktu wawancara awal, kita ini bukannya melawan Pemerintah, kita kan awalnya mau direlokasi. tapi kenapa tiba-tiba berubah, kita jadi gak dapet ganti rugi. Semua saya mendukung kok pembangunan. Siapapun Gubernurnya, mau Ahok, mau nanti guberbur baru. Cuma hak kita, hak warga Kampung Pulo tolong diberikan. Kita mau rumah kita yang kena gusur ini diganti dengan rumah, karena kita yang membangun ini rumah bukan Pemerintah. Sekarang ada LSM alhamdulillah kita semakin tenang, semakin yakin kita bakal menang di Pengadilan. Saya serahin urusan ini sama udin, karena udin ini paling ngertilah soal kaya begini, fisik saya udah ngga kuat kalo mesti adu mulut. Jadi saya serahin ke udin, warga juga semua dukung udin. Ini LSM dua-dua nya emang bener niat mau bantu kita, karena mereka tahu kita ini bener kita nuntut hak kita.“ (Wawancara, 29 Maret 2017)

Tindakan kerjasama antara aktor dengan LSM Ciliwung Merdeka seperti yang telah disampaikan oleh aktor-aktor sebelumnya di atas secara lebih jelas atau rinci akan dijelaskan oleh Bang U. Bang U yang juga merupakan RW 03, menjelaskan

bagaimana kerjasama yang di bangun antara warga Kampung Pulo dan kedua LSM tersebut. Dalam penjelasan ini Bang U juga menjelaskan bagaimana perkembangan kerjasama yang telah sudah menjadi kesepakatan antara warga dengan kedua LSM tersebut. Berikut penjelasan Bang U mengenai kerjasama antara warga Kampung Pulo sebagai aktor dengan LSM Ciliwung Merdeka, dalam menolak program relokasi yang dicanangkan Pemprov DKI :

“Kenapa kok kita bisa kerjasama sama Ciliwung Merdeka? Ini semua karena kesepakatan kita warga pulo yang memang butuh pihak ketiga ibaratnya untuk membantu kita mencapai tujuan kita, menuntut ganti rugi dan hak kita sebelum kita direlokasi. Awal kerjasama ini, ini ngga lama dari yang waktu itu kita ke DPRD. Waktu itu saya ngehubungim temen saya yang di Ciliwung Merdeka si Sandy ketuanya langsung, besoknya saya langsung datengin Ciliwung Merdeka ke Duri sana. Saya kan ngga bisa mutusin, nah malemnya saya koordinasi rapatlah sama tokoh sama temen-temen disini, sama warga disini. Akhirnya ya kita sepakat kalau kita mau kerjasama lagi sama mereka. Ya orang kita mau di bantu, masa kita nolak?. Setelah itu kita mengadakan pertemuan di karang taruna sama itu LSM, kita bahas disana permasalahan relokasi ini. Dari pertemuan itu, kita sepakat untuk bekerjasama, ya menerima bantuan merekalah kita intinya begitu.”
(Wawancara, 5 April 2017)

Dari pertemuan pertama yang dijelaskan oleh Bang U tentang kesepakatan antara warga Kampung Pulo dengan LSM Ciliwung Merdeka, kesepakatan yang terbentuk antara warga Kampung Pulo dengan LSM Ciliwung Merdeka sebagai aktor korporat juga merupakan bentuk norma yang telah disepakati antara aktor warga Kampung Pulo dengan Aktor Korporat. Norma tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kedua belah pihak dan telah ditanda tangani oleh kedua pihak dengan berisi kesepakatan yang mengatur tindakan kedua belah pihak dalam melakukan penolakan. Kemudian pertemuan tersebut berlanjut hingga

diadakannya rapat pertama yang membahas langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil warga bersama dengan LSM tersebut, berikut pernyataan Bang U :

“Setelah pertemuan pertama yang kesepakatan tadi, dua minggu kemudian bulan oktober kita sama-sama rapat di karang taruna. Disana kita musyawarah, kita bicarakan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Nah akhirnya disitu, kita putusin bahwa langkah kita selanjutnya adalah menggugat ke Pengadilan. Disitu juga saya mendatangi perjanjian dengan itu LSM saya tanda tanganin perjanjiannya, mewakili warga semua ini yang menolak relokasi.” (Wawancara, 5 April 2017)

Setelah rapat pertama yang menghasilkan keputusan untuk menggugat Pemprov ke Pengadilan, kemudian rapat tersebut juga menghasilkan perjanjian antara pihak warga dan LSM, yang perjanjian tersebut berisi :

“Isi perjanjian itu secara garis besarnya, bahwa kita sebagai warga Kampung Pulo sepakat untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada LSM Ciliwung Merdeka, sebagai perwakilan kita diranah hukum untuk menggugat pihak Pemprov ke Pengadilan agar mau memberikan hak dan tuntutan kami sebelum program relokasi dilaksanakan. Kita juga menuntut Pemprov DKI yang membatalkan perjanjian ganti rugi lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 itu. Yang undang-undang soal agraria. Di perjanjian itu juga berisi poin-poin tuntutan yang kita sampaikan. Secara garis besar itu perjanjiannya.” (Wawancara, 5 April 2017)

Kemudian Bang U juga menjelaskan bagaimana kelanjutan dari rapat pertama tersebut :

“Nah setelah kita buat kesepakatan dan perjanjian itu, kemudian kita semua diminta untuk mengumpulkan Fotokopi KTP, KK dan PBB. Itu kita kumpulin buat mendata warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi. Dan terutama untuk melengkapi berkas-berkas yang akan dibuat untuk menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan.” (Wawancara, 5 April 2017)

Kemudian setelah rapat pertama, rapat antara warga Kampung Pulo dengan LSM Ciliwung Merdeka yang kedua juga dilaksanakan warga pada awal tahun ini

tepatnya pada bulan Januari. Selama jeda antara rapat pertama dengan rapat yang kedua, warga dan perwakilan LSM juga tetap menjalin komunikasi lewat Bang U selaku perwakilan dan koordinator warga dengan pihak LSM. Bang U dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan :

“Kemudian setelah rapat pertama dan semua berkas dilengkapi, kita mengadakan rapat yang kedua tahun baru kemaren bulan januari. Sebelum rapat kedua kita adakan, kita evaluasi dulu ini dari rapat pertama apa aja yang kurang, data-data yang dikumpulkan sudah lengkap atau belum? Kemudian berkas apalagi yang harus kita lengkapi?. Itu semua saya komunikasi terus sama pihak LSM, nah kemarin itu memang soal data kita agak terlambat ngasih, karena warga juga terlambat ngumpulannya. Warga telat ngumpul juga bukan ngga beralasan, warga trauma sama yang namanya ngumpulin berkas-berkas. Dulu kita juga kan disuruh ngumpulin berkas-berkas sama Kecamatan tapi buktinya nihil. Tapi ini karena udah kesepakatan kita, maka ya kita tetep komitmen, semua warga akhirnya ngumpulin berkas walaupun telat-telat juga.” (Wawancara, 5 April 2017)

Dari hasil evaluasi rapat pertama dan komunikasi yang dilakukan oleh Bang U dengan pihak LSM, selain mengevaluasi masalah data, evaluasi tersebut juga menghasilkan :

“Evaluasi masalah data beres, kita terus komunikasi sampe akhirnyaakhir terakhir kita mesti nunggu dulu berkas-berkas yang lain untuk tuntutan ke Pengadilan masih harus dilengkapi katanya.” (Wawancara, 5 April 2017)

Setelah evaluasi rapat pertama selesai dilakukan, rapat antara warga dan LSM kembali dilaksanakan pada bulan Januari yang lalu, rapat tersebut agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai progres mengenai tuntutan warga Kampung Pulo yang sedang di layangkan ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN). Seperti yang disampaikan Bang U :

“Nah setelah evaluasi kita kelar, kemudian kita gelar rapat kedua sama juga di karang taruna juga. Disana kita ngebahas masalah

keberlanjutan kesepakatan kita, soal tuntutan ke Pengadilan. Saat rapat kedua ini juga banyak intruksi dari warga, karena warga udah mulai gelisah nih. Katanya abis pemilu kita mau digusur, rumah mau dibongkar paksa. Sedangkan kita lagi berusaha untuk mempertahankan kampung kita dan menuntut hak kita. Tapi alhamdulillah suasana rapat waktu itu juga aman, karena sudah ada penjelasan dari pihak LSM bahwa setelah pemilu kemungkinan gugatan kita diterima kita akan dipanggil oleh Pengadilan, katanya gitu. Makanya warga jadi bisa tenang. Tapi sampe sekarang ini, kan mau putaran ke dua kan nih, ini belum juga ada kepastian kapan gugatan kita diterima. Tapi ya mudah-mudahan, insyaallah kita berharap diterima.“ (Wawancara, 5 April 2017)

Kemudian Bang U juga menjelaskan bagaimana tahapan dan proses gugatan yang dilayangkan warga yang dibantu oleh LSM dapat dilayangkan ke Pengadilan.

Berikut penjelasan Bang U :

“Ini kenapa gugatan kita bisa sampe di Pengadilan, karena kita bertindak sesuai hukum dan norma, makanya kita berani menggugat. Kita juga dapet bantuan dari LSM buktinya, kita bisa gugat ke Pengadilan juga karena berkat kerjasama kita sama dengan LSM ini. Gugatan kita bisa naik ke Pengadilan, karena pertama kita punya komitmen, kesepakatan kita dari awal jelas. Kita menolak direlokasi dan kita menuntut hak ganti rugi jika kita direlokasi. tindakan yang kita ambil selama ini juga gak melanggar hukum. Kedua kita bisa menggugat karena fakta yang kita terjadi dan yang ada dalam tuntutan itu jelas. Kemarin setelah rapat pertama kita ngumpul data kita untuk berkas ke Pengadilan, selesai. Terus kita sama LSM ini mengajukan gugatan kita ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN). Isi tuntutan tersebut, isinya satu kita menggugat kebijakan Pemprov yang semena-mena mau gusur kita, kedua kita nuntut hak ganti rugi kalo rumah kita digusur, ketiga kita menolak relokasi karena tindak sesuai dengan perjanjian awal. Setelah kita mengajukan tuntutan kita, kan diterima tuh, kita bayar biaya perkaranya ke Pengadilan. Semua biaya itu yang ngurus pihak LSM. Nah setelah pendaftaran ini selesai, kita sekarang tinggal nunggu panggilan Pengadilan.“ (Wawancara, 5 April 2017)

Kemudian perkembangan terakhir dari proses gugatan tersebut juga disampaikan oleh Bang U, dalam wawancara bersama peneliti :

“Ini kan udah bulan maret, kita daftar dari desember bersihnya. Hasil dari koordinasi terakhir saya sama LSM, ini gugatan kita lagi di periksa perkaranya. Kita tinggal nunggu sampe abis pemilu katanya april, kita nunggu panggilan dari Pengadilan itu perkembangan terakhirnya.” (Wawancara, 5 April 2017)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bang U, mengenai kerjasama yang dilakukan antara warga Kampung Pulo sebagai aktor yang menolak relokasi dengan LSM Ciliwung Merdeka, kerjasama yang dilakukan oleh warga dengan LSM ini juga merupakan salah satu bentuk tindakan efektif aktor dalam mencapai tujuan dari pilihan menolak program relokasi. Dalam tindakan kerjasama ini terdapat norma atau aturan yang dibentuk atas kesepakatan aktor. Seperti yang sudah dijelaskan para aktor di atas, tindakan ini mereka ambil dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah agar tuntutan mereka kepada Pemprov DKI lewat bantuan hukum yang disediakan oleh LSM Ciliwung Merdeka ini dapat dipenuhi. Dan agar mereka dapat terlindung dari ancaman relokasi secara paksa yang kapanpun dapat dilakukan oleh Pemprov DKI.

Tindakan kerjasama yang aktor lakukan dengan LSM ini, merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya berupa jaringan yang dimiliki oleh aktor. Pemanfaatan jaringan oleh aktor ini juga merupakan alat aktor dalam mencapai tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai aktor. Dari wawancara peneliti dengan para aktor, dan dari penjelasan yang aktor jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan efektif yang dilakukan oleh aktor dengan bekerjasama dengan LSM Ciliwung Merdeka sebagai aktor korporat dalam menggugat pihak Pemprov DKI, merupakan bentuk tindakan efektif yang dilakukan aktor demi mencapai tujuannya dari pilihan menolak direlokasi dan bertahan di Kampung Pulo. Tindakan ini aktor lakukan agar tujuan ekonomi atau

tuntutan mendapatkan ganti rugi dari Pemprov DKI dapat terpenuhi sebelum mereka direlokasi.

Dari keseluruhan penjelasan dari tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, terdapat lima tindakan efektif yang telah menjadi kesepakatan dan dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi. Tindakan efektif menolak program relokasi yang pertama adalah dengan cara bertahan di Kampung Pulo. Tindakan efektif kedua yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan melakukan aksi protes langsung ke kantor Kecamatan. Kemudian tindakan efektif ketiga yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan melakukan demo di jalan Jatinegara Barat. Tindakan efektif keempat yang dilakukan oleh aktor dalam menolak program relokasi, adalah dengan bekerjasama dengan aktor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai aktor korporat. Dan tindakan efektif terakhir yang dilakukan aktor adalah dengan menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur sebagai hasil dari bentuk kerjasama aktor dengan aktor korporat.

Dari keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh aktor, tindakan efektif tersebut merupakan bentuk tindakan aktor dalam mencapai tujuan dan kepentingan aktor dari pilihan menolak program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Tindakan efektif yang dilakukan oleh aktor tersebut juga merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya dan modal sosial yang dimiliki aktor sebagai alat dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh aktor. Tindakan efektif yang dilakukan aktor juga merupakan tindakan yang

terbentuk atas kesepakatan yang telah disepakati aktor dengan adanya norma atau aturan dalam tindakan bersama yang mereka lakukan.

5.3 Proposisi Akhir Penelitian

Proposisi yang telah ditetapkan diawal penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial.

Dan tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan solidaritas antar warga Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi. Proposisi tersebut dirancang oleh peneliti berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diawal penelitian. Sehingga setelah dilakukan beberapa perbandingan dengan temuan-temuan diawal kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga didapatkan proposisi akhir yang sesuai dengan hasil penelitian mengenai tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI. Proposisi akhir dari penelitian ini memperkuat proposisi awal yang telah dirumuskan oleh peneliti. Proposisi akhir dari penelitian ini yaitu :

1. Proposisi awal adalah tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial. Dan tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan

solidaritas antar warga Kampung Pulo yang ikut dalam menolak program relokasi. Proposisi akhir dari penelitian ini yaitu Tindakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam menolak program relokasi, adalah karena atas dasar tujuan ekonomi, sosial dan hukum. Tujuan ekonomi yaitu menuntut penggantian rugi berupa uang atas tanah dan bangunan yang ia miliki dan tempati di wilayah Kampung Pulo. Tujuan sosial yaitu, keinginan aktor untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak setelah direlokasi dari Kampung Pulo.

2. Tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi, dengan menggunakan jaringan dan solidaritas yang mereka miliki. Tindakan penolakan tersebut dibuktikan dengan terbentuknya kelima tindakan efektif dalam mencapai tujuan dari penolakan program relokasi. Kelima tindakan efektif tersebut adalah, dengan tindakan bertahan di Kampung Pulo, tindakan protes ke kantor Kecamatan, tindakan aksi demo, tindakan bekerjasama dengan LSM sebagai aktor korporat, dan menuntut ke PTUN Jakarta Timur. Kelima tindakan efektif tersebut dapat terbentuk karena atas dasar kesepakatan para aktor dan atas pemanfaatan jaringan dan solidaritas yang aktor miliki dalam mencapai tujuan dari menolak program relokasi yang dicanangkan Pemprov DKI.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian tentang tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI ini memiliki beberapa temuan sesuai dengan hasil analisis data.

Dalam penolakan ini, warga Kampung Pulo sebagai aktor yang menolak direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat memiliki berbagai macam alasan atas penolakan yang mereka lakukan. Alasan atas penolakan yang disampaikan warga Kampung Pulo terutama dikarenakan faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor hukum yang menjadi alasan utama warga dalam menolak relokasi. Faktor ekonomi tersebut adalah, tidak adanya ganti rugi dari Pemprov DKI, hilangnya mata pencaharian, dan bertambahnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika direlokasi ke Rusun. Faktor sosial yang menjadi alasan warga Kampung Pulo menolak direlokasi ke Rusun adalah, kesulitan yang harus di hadapi warga ketika mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan baru mereka di Rusun. Sedangkan faktor hukum yang menjadi pertimbangan warga dalam menolak relokasi, adalah warga merasa bahwa tempat tinggal yang mereka miliki merupakan tanah yang sah secara hukum milik mereka karena atas dasar kepemilikan surat dan bukti pembayaran pajak PBB.

Lebih lanjut, Dalam penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo, warga Kampung Pulo sebagai aktor melakukan tindakan efektif untuk mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun

Jatinegara Barat. Tindakan efektif tersebut dapat terbentuk atas pemanfaatan sumberdaya berupa jaringan dan solidaritas yang dimiliki warga Kampung Pulo sebagai aktor. Dan juga dapat terbentuk atas kesepakatan bersama para aktor dalam menentukan tindakan efektif dalam mencapai tujuan dari tindakan penolakan terhadap program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Tindakan efektif yang dilakukan oleh para aktor dilakukan dengan cara : Bertahan di Kampung Pulo, aksi protes ke kantor Kecamatan, aksi demo, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciliwung Merdeka sebagai aktor korporat, serta menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Tindakan efektif yang dilakukan oleh aktor ini merupakan bentuk dari tindakan aktor dalam mencapai tujuan dan kepentingan aktor dari pilihan menolak program relokasi ke Rusun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Dimana tujuan yang ingin dicapai oleh aktor dari penolakan terhadap program relokasi ini adalah, tujuan ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi yang ingin didapatkan aktor dalam penolakan ini adalah, adanya ganti rugi berupa uang atas tanah dan bangunan yang ia miliki dan tempati di wilayah Kampung Pulo yang terkena relokasi. Sedangkan tujuan sosial yang ingin didapatkan aktor dalam penolakan ini adalah, keinginan aktor untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak setelah direlokasi dari Kampung Pulo.

6.2 Saran

Dengan hasil yang di dapat dari kesimpulan dan analisis pembahasan, peneliti menuliskan beberapa saran-saran kepada pihak-pihak yang dirasa terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Saran bagi Pemprov DKI :

Kebijakan relokasi Kampung Pulo yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI sebenarnya bertujuan baik, namun kebijakan relokasi Kampung Pulo bukanlah *problem solver* yang tepat dalam mengatasi permasalahan di Kampung Pulo dan dalam mengatasi permasalahan banjir yang selama ini khususnya terjadi di Kelurahan Kampung Melayu. Dalam perealisasi kebijakan tersebut Pemprov DKI kurang melakukan pendekatan terhadap warga Kampung Pulo. Hendaknya Pemprov DKI merumuskan kebijakan relokasi dengan menempatkan warga Kampung Pulo sebagai subjek atas perubahan. Dengan melibatkan warga Kampung Pulo dalam penyusunan kebijakan relokasi, sehingga keinginan warga Kampung Pulo bisa tercover dalam kebijakan tersebut. Dan agar warga Kampung Pulo tidak merasa bahwa kebijakan relokasi itu semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan Pemprov DKI. Pemprov DKI juga seharusnya dapat belajar dari relokasi Kampung Pulo yang sebelumnya telah dilakukan. Terutama mengenai dampak ekonomi dan sosial yang harus ditanggung warga Kampung Pulo dari adanya program relokasi ini.

2. Saran bagi akademis :

Pada permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, memang menitikberatkan pada tindakan penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan Pemprov DKI. Akan tetapi peneliti menganggap masih banyak celah-celah pembahasan yang terbatas dan belum dikaji lebih dalam. Sehingga saran peneliti bagi

pihak tokoh akademis adalah dapat melakukan penelitian lanjutan.
Tentunya penelitian lanjutan ini adalah memfokuskan pada celah-celah permasalahan pada penelitian ini yang belum dikaji lebih dalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Agung, R. M. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
- Agus, S. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ananta Toer, P. (2005). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Coleman, J. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Coleman, J. S. (2011). *Dasar - Dasar Teori Sosial Foundations Of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Evers, Hans D. (1986). *Sosiologi Perkotaan : Urbanisasi dan sengketa tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Faisal, S. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- George Ritzer, & Douglas J Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modern Cetakan Ke 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husaini, U. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Remaja Rosdakaya.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J. L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ritzer, G. &. (2008). *Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai dengan perkembangan mutakhir Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Silalahi, G. A. (Metodologi Penelitian dan Studi Kasus). 2003. Sidoarjo: Citra Media.

Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Suparlan, P. (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suprayogo, I. T. (2001). *Metodologi penelitian sosial - agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Usman, H. &. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara .

Widjaja, P. (2013). *Kampung Kota Bandung*. Bandung: Graha Ilmu.

Wirutomo, P. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

Wiryomartono, B. (1999). *Urbanitas dan seni bina kota*. Bandung: ITB.

Yin, R. K. (2008). *Studi kasus : desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yin, R. K. (2015). *Studi kasus : desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi :

Amalia, Adhi Murti C. 2012. *Konflik Waduk Sepat*. Surabaya.

Attamimi. 2014. *Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya)*. Surabaya.

Pratiwi, Nyi M. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tetap Tinggal di Daerah Rentan Bencana (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu)*. Depok.

Sumber Dokumen :

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, 2007)

(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014)

(Data Lembaga swadaya masyarakat Ciliwung Merdeka, 2015)

(Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016)

Publikasi Elektronik :

Yasin, Habibi. 2015. Sekilas Sejarah Kampung Pulo. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/15/08/22/ntfzog354-sekilas-sejarah-kampung-pulo-1>. Pada 2 Oktober 2016

Amalia, Adhi Murti C. 2012. *Konflik Waduk Sepat*. Surabaya. Diakses dari : <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-07%20KONFLIK%20WADUK%20SEPAT%20Adhi%20Murti.pdf> Pada 6

Oktober 2016

Attamimi. 2014. *Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap*

Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya). Diakses dari
[:http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts07a321b90cfull.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts07a321b90cfull.pdf). Pada 6
Oktober 2016

Pratiwi, Nyi M. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tetap
Tinggal di Daerah Rentan Bencana (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kampung Pulo,
Kelurahan Kampung Melayu). Diakses dari :
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302964-S1969-Osmar%20Shalih.pdf>. Pada 10
Juni 2017

Sony. 2015. Normalisasi Juga Akan Kembalikan Flora dan Fauna Kali Ciliwung.
Diakses dari : <http://www.pu.go.id/berita/10685/Normalisasi-Juga-Akan-Kembalikan-Flora-dan-Fauna-Kali-Ciliwung-.> Pada 28 Agustus 2017



LAMPIRAN

Lampiran 1. Guide Interview

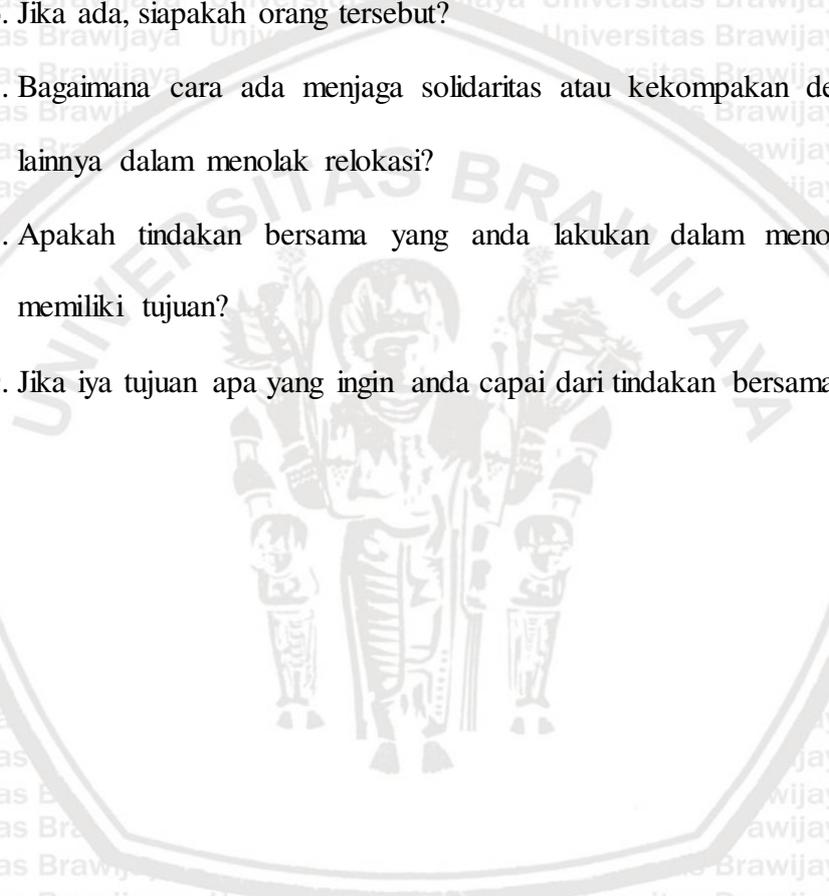
• Relokasi

1. Bagaimana relokasi itu menurut anda?
2. Seberapa pentingkah relokasi untuk anda?
3. Sejak kapan anda menolak untuk direlokasi?
4. Mengapa anda memutuskan untuk menolak direlokasi?
5. Bagaimana proses anda melakukan penolakan?
6. Bagaimana dampaknya jika anda tidak mendapat program relokasi?

• Pilihan Rasional : Aktor, Sumberdaya, Kepentingan, Kesadaran, Penguasaan

1. Apa penyebab anda menolak untuk direlokasi?
2. Apa tujuan anda menolak untuk direlokasi?
3. Apa yang mendasari anda sehingga menolak untuk direlokasi?
4. Apa alasan anda memilih bertahan di Kampung Pulo?
5. Apakah dengan menolak direlokasi anda diuntungkan?
6. Jika iya, apa keuntungan yang anda dapatkan?
7. Apakah dengan direlokasi anda mengalami kerugian?
8. Jika iya, apa kerugian yang anda alami?
9. Dengan cara apa anda menolak untuk direlokasi?
10. Kenapa anda memilih cara atau tindakan tersebut?
11. Apakah tindakan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga yang menolak direlokasi?

12. Bagaimana cara anda memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan warga lainnya dalam menolak relokasi?
13. Tindakan bersama apa yang anda lakukan untuk menolak relokasi?
14. Apakah tindakan tersebut juga merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga yang menolak direlokasi?
15. Adakah warga yang mengkoordinir tindakan tersebut?
16. Jika ada, siapakah orang tersebut?
17. Bagaimana cara anda menjaga solidaritas atau kekompakan dengan warga lainnya dalam menolak relokasi?
18. Apakah tindakan bersama yang anda lakukan dalam menolak relokasi memiliki tujuan?
19. Jika iya tujuan apa yang ingin anda capai dari tindakan bersama tersebut?



Surat Permohonan Data dan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia
 Telp. +62341 575755, 551611 Psw. 250; Fax. +62341 570038
 E-mail: fisip@ub.ac.id http://www.fisip.ub.ac.id

Nomor : *643* /UN10.11/AK/2017
 Perihal : Permohonan Data dan Ijin Penelitian

24 FEB 2017

Yth. Kepala Kelurahan Kampung Pulo Kecamatan Kampung Melayu
 Jakarta Timur
 di Tempat

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka diperlukan data-data guna keperluan penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Taufik Alhakim
 NIM : 135120107111033
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Peminatan : sosiologi pembangunan
 Judul Skripsi : Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program Relokasi Pemprov DKI
 Lokasi Penelitian : Jakarta Timur
 Lama Penelitian : Bulan Februari - Juli 2017

Untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan penelitian di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Ketua Jurusan Sosiologi,



Siti Kholifah, M.Si, Ph.D
 NIP. 19770611 200912 2 001



Lampiran 2. Reduksi Data Penelitian/ Koding

Relokasi & Aktor

No	Nama	Koding
1	AO	<p>Bagaimana kita mau paham relokasi? Saya aja sebagai tokoh disini ngga ada yang namanya saya di undang ke balai kota sono. Ini program ngga dibahas dulu sama kita, tau taunya udah ada aja. Berartikan ini bukan kemauan kita, ini kemauan pemerintah. Apapun alasannya kita tetep nolak relokasi. Karena relokasi bukan yang kita butuhin. Kita ngga pernah di ajak musyawarah, gimana kita mau paham soal relokasi? apalagi warga disini yang rata-rata gak sekolah, mana ngerti begituan.</p> <p>Relokasi Kalo menurut saya pribadi, sangat tidak bijak dan ngga ada gunanya bagi kita warga Kampung Pulo. Pemerintah harus tau, sebelum ada mereka sekarang ini, sebelum Jakarta maju, kita semua udah pada tinggal disini lebih dulu. Terus kita mau di gusur dari kampung kita? Tempat kita lahir? Tidak akan. Kita akan menolak sampai mati, ngga akan ada itu penggusuran lagi.</p>
2.	IS	<p>Saya ngga ngerti relokasi itu apaan, yang saya tau saya mau dipindahin aja. Dulu mah dibilangnya juga cuma 25 meter dari Askali. Berarti saya kagak kena kan, saya udah 35 meter ada dari Askali, karena saya kena di belakang. Kita mana tahu relokasi orang kita juga kaga sekolah, kita juga gak pernah dikasih tau kalo ada ini program. Cuma orang Kecamatan aja, orang Bpn ngasih tau ini rumah mau diganti katanya. Itu dia pada dateng foto-foto, ngukur rumah saya, nanya surat-surat segala macem lah.</p> <p>Saya pribadi sebagai tokoh, dan mewakili warga disini, saya ngga butuh yang namanya relokasi. Kita hanya butuh perbaikan, bisa dengan kampung deret, dengan diganti rumah di tempat lain. Relokasi ini apa? Kita ngga pernah diskusi sama pemerintah, tiba-tiba program ni muncul. Kaya kesamber petir, tiba-tiba kita disuruh angkat kaki dari kampung kita. Kita mau dipindah ke tempat yang katanya lebih layak di Rusun, tapi buat kita mah ngga. Ngga ada itu relokasi-relokasi. Ini mah namanya penggusuran bukan relokasi. Orang kita katanya ngga mau diganti. Bagaimana ceritanya?</p> <p>Semua saya mendukung kok pembangunan. Siapapun Gubernurnya, mau Ahok, mau apa, saya itu ngga anti, ngga. Sampai saat ini, wah saya benci Ahok, ngga. Tapi peraturannya Pak Ahok ganti dong, gitu aja, ngga sulit.</p>

<p>3.</p>	<p>F</p>	<p>Sebenarnya relokasi itu tidak tepat buat warga yang memiliki legal formal. Saya ini punya surat-surat rumah sama tanah loh, PBB juga ada. Yang ada kalau buat warga legal formal itu bukan relokasi, itu pengalihan hak. yang disebut legal formal, ini kampung yang ada warganya, ada surat PBB nya, ada listrik masuk, ada telepon. Yang saya mau tanyakan yang bagaimana yang mau direlokasi? Kalau menurut undang-undang warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung itu tidak tepat dikatakan relokasi. Adanya pengalihan hak. Sebab pengalihan hak jelas-jelas undang-undangnya. Baik secara hukum ee undang-undang apa undang-undang 45 pun disebut pengalihan hak. Pengalihan hak beda dengan relokasi. Cuma Pemprov selalu mengatakan kita mau direlokasi. Makanya bertahan di kampung kita ini, berapa kali kita pernah kampanye waktu debat dibahas masalah relokasi.</p>
<p>Terus jadi mungkin maksudnya di sini misalkan pindah itu ngga gampang. Jadi artinya kan kalau kita pindah kan artinya kita pindah secara sosial, Kita pindah secara sosial dan mulai dengan kehidupan yang baru, dengan wajah baru, dengan segala yang baru. Yang susah itu apa? Beradaptasi dengan lingkungan itu paling susah. Wah di Pulo itu kumuh, banjir, kalau menurut dia. Tapi di Pulo kita banjir, kita tidak pernah pusing bangun pagi dengan bayar yang namanya sewa Rusun kaya yang sebelumnya udah pindah kesana. Dulu mereka tidak pernah memikirkan yang namanya bayar sewa rumah. Orang rumah rumah mereka. Paling yang dipikirin listrik doang, air dari dalam tanah. Tapi sekarang mereka harus memikirkan Rusun, biaya Rusun, biaya listrik, listrik voucher, air bayar.</p>		
<p>Pertama tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Di mana letak kemanusiaan. kedua masalah sosial, ya satu masalah sosialnya. Itu yang kita itu. Kalau kita kembali lagi kembali kepada hukum negara, kita ini negara berdaulat, ideologi kita apa sebenarnya? Ideologi kita pancasila. Kita menganut undang-undang dasar 45 sebagai dasar hukum kita ya kan. Kenapa kok selalu bilang kita ini orang pancasila tapi mana? Kita kembali lagi. Sedangkan di pancasila jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana rasa sosial, yang mana rasa sosial seorang Ahok maksudnya Pemerintah provinsi? Yang boleh dikatakan mungkin ya gini, jadi kayak alat kekuasaan mungkin ya. Jadi alat kekuasaan, semua pinggir-pinggiran Kali dengan dalih merelokasi dan normalisasi, menormalisasi Kali. Itu yang jadi selalu jadi eee' acuan dia. Dan dia memakai Pergub 190. Itu yang selalu dibuat senjata. Itu yang dipakai payung hukumnya Pergub loh selama ini sama dia, Pergub 190 bukan Perda.</p>		



		<p>Sebenarnya relokasi itu tidak tepat buat warga yang memiliki legal formal. Saya ini punya surat-surat rumah sama tanah loh, PBB juga ada. Yang ada kalau buat warga legal formal itu bukan relokasi, itu pengalihan hak. yang disebut legal formal, ini kampung yang ada warganya, ada surat PBB nya, ada listrik masuk, ada telepon. Yang saya mau tanyakan yang bagaimana yang mau direlokasi? Kalau menurut undang-undang warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung itu tidak tepat dikatakan relokasi. Adanya pengalihan hak. Sebab pengalihan hak jelas-jelas undang-undangnya. Baik secara hukum ee undang-undang apa undang-undang 45 pun disebut pengalihan hak. Pengalihan hak beda dengan relokasi. Cuma Pemprov selalu mengatakan kita mau direlokasi. Makanya bertahan di kampung kita ini, berapa kali kita pernah kampanye waktu debat dibahas masalah relokasi.”</p>
<p>4.</p>	<p>Y</p>	<p>Kalau soal relokasi itu saya ngga begitu paham sih. Karena apa ee ini kan permainan orang gede ya ngomong begitu. Kalau mau jelasnya kita kan banyak orang Pulo itu banyak yang sekolahnya rendah. Jadi kalau ngomong-ngomong begitu hanya orang yang pintar-pintar aja yang bisa. Orang Pulo banyak yang ngga bisa. Kalau dia mau ngomong jelasnya untuk memindahkan orang aja begitu. Tapi ukuran luasnya itu ngga sesuai. Dulu dia bilang 25 meter dari Askali, kenyataan sekarang 35 meter.</p> <p>Saya ngga ngerti relokasi itu apaan, yang saya tau saya mau digusur aja. Dulu mah dibilangnya juga cuma 25 meter dari Askali. Berarti saya kagak kena kan, saya udah 35 meter ada dari Askali, karena saya kena di belakang. Kita mana tahu relokasi orang kita juga kaga sekolah, kita juga gak pernah dikasih tau kalo ada ini program. Cuma orang Kecamatan aja, orang Bpn ngasih tau ini rumah mau diganti katanya. Itu dia pada dateng foto-foto, ngukur rumah saya, nanya surat-surat segala macem lah.</p>
<p>5.</p>	<p>U</p>	<p>Relokasi memang tujuannya baik, tapi nasib kita bagaimana? Jangan hanya memikirkan pembangunan jakarta, pembangunan biar gak banjir lah, inilah. Kita bagaimana? Harusnya sebelum ada ini program kita diajak musyawarah dulu.</p> <p>Kalau menurut saya kalau program Pemerintah kan relokasi ngga jadi masalah. Waktu itu juga kan rapat-rapat itu nyampai setahun, sampai diukur-ukur rumah. Ngga jadi masalah, ngikutin. Bahkan warga dari harga NJOP sampai 25% harga dari NJOP silakan kalau Pemerintah mau pakai. Intinya warga minta dibayar. Ya udah menyanggupi, udah BPN udah menyatakan sah ini tanah. Nyata-nyata mau seminggu lagi rapat di Kecamatan waktu itu dimentahin. Saya malah yang di kejar-kejar sama warga, ini gimana nih masalah ganti rugi? Kalau begini saya dong yang babak belur, saya malah bentrok sama warga. Jangan manfaatin saya sebagai perwakilan warga harusnya Pemprov</p>

		sadar.
6.	I	<p>Saya kalau memang untuk penataan Kali Ciliwung, itu jangan dari tengah, dari hulunya dulu. Itu yang mengakibatkan banjir dari hulu. Kalau dari hulunya ngga dibenahi, sama juga banjir-banjir juga masih. Alam itu kagak bisa diciptakan dengan Ahok, alam itu yang berkuasa Allah. Adanya musibah, adanya bencana, itu Allah yang takdirin. kebijakan Jokowi yang tadinya bilang mau dibuat kampung deret kesepakatan warga Kampung Pulo, cara baiknya gimana, nanti saya akan buat kampung deret. Ternyata bukan dibuat kampung deret, rumah kami sendiri yang mau dideret sama beko. Di sini orang Kampung Pulo mau dipindahin tanpa modal, tanpa dikasih biaya, bahkan usahanya pun susah di sini.”</p> <p>Saya menolak relokasi karena apa? Karena menurut pribadi sendiri ya, relokasi itu menyakitkan. Menyakitkan, mensengsarakan orang tua saya dan menderitakan orang-orang yang kecil yang di bawah. Selama kepemimpinan dari Suharto itu belum ada pembicaraan-pembicaraan untuk pembongkaran Kali Ciliwung. Dari jamannya Gubernur awal pertama, dari Suryadi sampai ke Bang Yos, sampai ke Foke, belum ada yang berani. Cuma hanya Ahok doang yang berani, sama seperti Jokowi. Jokowi itu janjinya manis sekali. Dia untuk mencari perhatian warga, dia blusukan secara ril, dia masuk ke gorong-gorong, bekerja dengan baik, tapi dibalik pekerjaan itu salah sebenarnya. Dengan arti salahnya apa? Buat kepentingan tim-timnya sendiri. Janji dia kan waktu mau direlokasi itu Kampung Pulo akan diganti, tapi nihil. Kalau orang Betawi bilang itu nihil, omong kosong. Bicara sama orang warga Kampung Pulo jangankan kebun, kandang ayampun akan diganti. Jangankan kebun, kalau kebun tu disebut pepohonan banyak, kandang burung pun diganti, kandang ayampun diganti. Ternyata nihil. Pas setelah dia naik jabatan kepresidenan, itu ngga ada pembicaraan-pembicaraan lagi Jokowi. Bahkan yang sepenggantinya ini si Ahok ini, dibidang Kampung Pulo ini kampung ilegal, statusnya tanah negara.</p>

Alasan dan Tujuan Aktor

No	Nama	Koding
1	AO	<p>Kita tetep bertahan di Pulo sebab kita punya itu apa namanya serfikat tanah, rumah sama PBB juga kita punya, Itu kan semua Pajak bumi dan bangunan (PBB) saya lunas-lunasin bayar 2 bulan tu eh' 2 tahun, tahun 2014 lunasin. Ini rumah kita, tanah kita, kita juga punya surat-suratnya, Pemerintah mau ngapain. Kita punya Hak disini, gak bisa asal main gusur aja. Makanya kenapa kita nolak, karena kita punya surat-surat. Kita ya bertahan kampung kita, ngapain kita dipindah ke Rusun.</p> <p>Ngga penting deh relokasi, saya pingin diganti. Saya sebagai tokoh warga pulo juga mewakili warga pulo yang nolak direlokasi, kita semua pengen ganti rugi sesuai perjanjian dulu di Kecamatan. Kalau diganti uang kan berapa aja bisa beli di kampung, kalau di Rusun kan ngga enak gitu. Saya nolak direlokasi supaya diganti aja gitu, Berapa diganti, saya keluar dari sini, saya pindah di kampung, ke kampung bini saya Depok. Pokoknya saya mau diganti, ganti saya bisa keluar dari sini gitu. Ngomong doang ngga diganti. Sekarang mana? Semua orang pada benci. Kalau dulu si Kumis (Fauzi Bowo) ngga lengser, ngga digusur Pulo. Dia sudah janji sama orang Pulo, saya jadi Gubernur saya ngga akan gusur Kampung Pulo</p>
2	IS	<p>Ya sebetulnya sih kalau diganti rugi saya mah enak-enak aja udah. Karena ngga diganti aja jadi masyarakat itu nolak direlokasi bukannya anti sama Pak Ahok sebetulnya ngga. Saya nolak direlokasi karena mempertahankan hak rumah tadi, Nah. Misalkan tanah, oke Pemerintah punya, tapi pembangunannya kita punya, hitung-hitungan aja dong gitu.</p>



		<p>Kenapa relokasi gak pernah selesai? Kenapa warga pulo milih bertahan disini dari pada di Rusun? Karena ya Pemerintah ngga mau ganti, dia bilang kita liar. Kalau liar, kenapa dibiarkan? Kan udah puluhan tahun, terus kalau liar kenapa kita bisa punya sertifikat? Kenapa kita bayar PBB? Itu aja tagihan PBB numpuk noh. Berarti Pemerintahgakuin kita, buktinya aja kita di tagih PBB. Saya aja umur saya udah 67 tahun, kenapa dibiarkan? Berarti yang salah siapa? Nah. Sekarang kita udah bangun, keluarin biaya banyak, kok ngga diganti. Seharusnya diganti. Masalah rumah susun sih ya boleh dikasih boleh ngga, kalau udah ada penggantian ngga perlu pakai rumah susun gitu. Kalau misalkan ngga diganti, dikasih rumah susun, susun sewa. Ya kalau orang yang kerja masih muda mungkin enak, tapi kalau seperti saya gini udah ngga kerja, pensiunngga. Ya kalau swasta kan ngga pensiun.</p>
3	F	<p>Nah, alasan kita masih bertahan disini, kalau saya pribadi kesatu karena faktor ekonomi, kedua kehidupan sosial atau Pemerintah memperhatikan kehidupan sosial kita di sini. Jangan kata dia mengecek, turun ke lapangan aja ngga pernah. Pas mau pengurusan apa pernah disurvei ke sini? Mungkin saya sebagai perwakilan dari masyarakat ya, saya cuma menyatakan warga di sini tetap dengan tuntutannya kita ini, kita butuh ganti rugi. Bukan relokasi, bukan Rusun yang kita butuhin.</p> <p>Harapan saya dan mereka warga yang juga nolak ada ganti rugi berupa uang. Pernah ada pertemuan antara pihak warga, DPRD dengan Pemprov, kita itu bakal diganti 25% dari harga NJOP. 25% dari harga NJOP warga Kampung Pulo dari RT RW 1 sampai RW 3 setuju. Tapi kenyataannya kita kembali lagi, gimana 25% bener ngga? Tapi kenyataannya ini? 0%. Padahal kalau berdasarkan ketok palu 25% itu tidak akan ada gesekan sampai saat ini pasti bakalan pada mau direlokasi.</p>
4	Y	<p>Ya alasannya kita ngga mau pindah dari Kampung Pulo, begitu aja poinnya. Karena kalau kita pindah dipindahin ke Rusun ini, ya tadi udah saya bilang bayar rumah, bayar air. Kalau listrik kita ngga pikirin ya, dari sono juga bayar listrik. Air sama rumah yang dipikirin bayar. semuanya sesatu kampung nolak. Kita ini semua manusia, jangan main pindahin aja kaya binatang. Dimana rasa sosial Pemerintah kepada kita?.</p> <p>Pokoknya saya ngga mau pindah dari Kampung Pulo karena kalau udah keluar dari situ ya ngga, berarti kita udah ngga punya rumah, kita mau nyari rumah kemana? Sedangkan harga rumah di luar sudah mahal. Ini apalagi kagak diganti sama sekali. Udah jelas nolak sama sekali buat saya. Kalau dia mau gusur kita dipindahin harus ada rumahnya ada tanahnya, itu baru rumah namanya. Kalau Rusun begini bukan rumah, kandang ayam. Bukan rumah ini. Ya kan pindah ke kandang ayam, kayak burung, ya kan. Makanya gue bilang ngga bisa</p>



		<p>diwarisin, masa gue warisin rumah susun. Ngga ada kita warisin rumah susun.</p> <p>Harapan ke depan maunya enak kita, bisa diganti itu rumah, biar kita mau pergi ke mana juga kalau udah diganti ngga jadi masalah. Ngga dikasih rumah susun juga ngga jadi masalah karena sudah diganti. Ganti dulu, terserah kita mau ke mana kek. Yang penting sudah diganti, kita udah megang duit. Kalau ngga diganti sama sekali? Di sini mata pencaharian susah lagi. Kalau gak diganti juga, saya tetep bertahan di pulo sesuai kesepakatan sama temen-temen yang lain.</p>
<p>5</p>	<p>U</p>	<p>Kalau alasan, awalnya sih saya ngga nolak karena kan mau diganti. Habis mendengar ngga diganti ya nolak saya sama warga, relokasi boleh cuma ya jangan nyusahin rakyat. Jangan sampai rakyat dibikin sengsara. Kayaksemacam saya ini. Ya pinginnya sih ya digantilah. Semacam Gubernur ee Fauzi Bowo, Kampung Melayu. Bahkan yang ngga ada suratnya pun diganti, misalkan orang ni beli 20 juta, beli kontrakan, beli rumah sepetak, diganti itu bisa mencapai 30-35. Sutiyo, jaman Gubernur Sutiyo di Cipinang diganti. Ini Gubernur Ahok ini sampai ngga diganti, kita jadi dibenturin sama aparat. Saya aja jadi ke bentur sama warga sini gara-gara dia. Dia daripada ngeganti rakyat mendingan bayar aparat, rakyat dibenturin sama aparat. Nyata-nyata kok kita dibenturin. Sampai tentara nurunin 2.500 tentara pasukan. Besoknya lagi ditambah lagi sampai 6 ribu aparat coba, bayangin. Rakyat dibenturin sama aparat.</p> <p>Nolaknya kita intinya ya ngga diganti ya kita mempertahankan hak kita dong. Itu pun bukan mulai Pemerintah bangun rumah. Alasan kan Pemerintah itu tanah negara. Waktu awal-awalnya sih ngga ngomong-ngomong tanah negara. Karena kan sudah mau diganti 25% dari NJOP. Ya warga silakan, yang penting diganti. Gantilah, nego-nego sampai 25% dari NJOP. Warga udah ngikutin program Pemerintah. Kita bertahan disini, nolak dikarenakan kita membela hak, hak saya. Ngebangun rumah itu kan pakai duit, ngebela hak saya. Satu, begitu. Kedua, ya masalah ekonomi juga mata pencaharian kita di Kampung Pulo. Di sono kalo kita nganggur kita jadi stres. Misalkan kalau kita dagang lagi punya duit ngebangun lagi rumah, dihabisin lagi sama Pemerintah. Bagaimana? Sampai ke situ. Kalau diganti jelas kita akan pindah, kalo ngga jangan harap kita mau angkat ni kaki dari sini.</p>



6	I	<p>Saya menolak relokasi karena saya dan mungkin warga Kampung Pulo kalau diganti ngga bakalan tinggal di situ. Saya sendiri secara pribadi ngga ada mimpi tinggal di gedung semewah Rusun, ngga ada mimpi. Lebih nyaman di pulo, keakrabannya, sosialisasinya paling nyaman di kampung sendiri.</p>
		<p>Kalau di Rusun kita tinggal di atas, katanya lift nya sering mati, jam nyalanya juga gak nentu. Apalagi yang namanya orang tua begini, ngga usaha, ngga apa ya kan. Jadi pingin turun bergaul turun dulu ke bawah. Setelah turun ke bawah ngobrol begini-begitu mikirin lagi tempat tinggal yang lama. Di Rusun bukannya tempat tinggal orang sehat, orang sakit semua. Hidup di Rusun sama juga naik taksi. Tahu naik taksi? Argo berjalan. Buka pintu, argo berjalan. Tiap bulannya mikirin. Tapi kalau hidup di Kampung Pulo yang dulu-dulu itu bagaikan bajaj. Dengan arti bagaikan bajaj apa? Sekali bayar naik udah beres.</p>
		<p>Tujuan saya menolak awalnya, karena saya gak mau kehilangan mata pencaharian saya. Saya tiap bulan disini dapet uang hasil kontrakan mas, lumayan bisa ngehidupin keluarga saya, itu aja tujuan saya pada awalnya. Tapi karena saya lihat ibu saya udah tua begini, anak-anak saya, tinggal numpuk di rumah, tujuan saya bertahan di pulo ini agar saya dapet Pembayaran, penggantian. Saya mau beli rumah di pinggiran Jakarta aja dari ntu uang ganti rugi. Terus cara penggusurannya pun juga ngga tepat. Dengan arti ngga tepat ya kok terlalu banyak di Kampung Pulo yang diambil. Kampung Pulo ini bukannya kampung kumuh. Kalau Pemprov DKI bisa menata, itu lebih cantik, lebih bagus. Ada larangan-larangan untuk buang sampah ke Kali. Ternyata ngga ada itu yang namanya perbaikan-perbaikan. Saya pernah pesan sama wartawan waktu pas lagi Jokowi masih jadi Gubernur saya ditanya sama wartawan untuk relokasi menolak ngga. Oh saya mah setuju-setuju saja tapi dengan catatan penggantian dan secara ril dan secara baik jajak pendapat dulu sama warga, maunya warga apa, maunya kayak apa.</p>

Sumber Daya

No	Nama	Koding
1	AO	Semua tindakan kita ini adalah kesepakatan bersama. Kita jaga solidaritas kita, kekompakan kita agar kita tidak terpecah belah. Kita jaga solidaritas kita biar tujuan kita ini kecapai. Kita gerakin semua lapisan masyarakat, LSM, semua kita gerakin. Apa yang bisa kita pakai dan kita manfaatin buat menolak relokasi, semua cara kita pakai.
2	IS	Kita disini bertindak sesuai dengan kesepakatan bersama yang kita buat. Kan kita punya koordinator setiap RW dan RT. Kita mulai dari bawah dulu, baru kita ini yang di atas kita tetep jaga

		persatuan kita. Kita dapet bantuan dari luar alhamdulillah. Kita bisa ke pengadilan juga karena kerjasama kita, karena warga Kampung Pulo yang banyak mau bantu, banyak kenalan di luar. Kita banyak saudara diluar, makin mudah jalan kita buat nolak relokasi, buat dapet ganti rugi.
3	F	Kalo saya sendiri, tugas saya sebagai RT ya menjaga solidaritas dan kekompakan warga dalam nolak relokasi. saya komunikasi terus sama warga di RT saya, agar kita tetep kompak dan tujuan kita tercapai. Kita juga manfaatin kenalan kita diluar yang bisa bantu kita dalam menolak relokasi ini. Salah satu contoh besarnya ya kita kerjasama sama Ciliwung Merdeka Ini.
4	Y	Kalo saya mah ngikut aja. Temen- temen yang lain setuju kita juga setuju. Kan ada babe AO sama IS, mereka kondisiin kita semua ini. Nanti gimana tindakan kita selanjutnya, kan kita disini semua saudara, kita sama-sama pengen di gusur dari kampung kita. Kalo soal manfaatin, Tindakan saya sama temen-temen sesuai kesepakatan. Kita jaga kekompakan biar kita ini ngga gampang di pecah-pecah. Biar semua bisa lancar urusan kita ini.
5	U	Kita kan disini banyak temen,banyak saudar di pulo ini, hampir semua orang sekampung saling pada kenal lah. Ya kita minta dukungan sama temen sama saudara kita semua di pulo ini. Kita satu tekad menolak relokasi. Kita juga semua kaya keluarga, jadi apa yang bisa kita lakuin buat nolak relokasi ya kita lakuin. Buktinya tindakan kita selama ini sama, karena ada babe AO, ada Babe IS, ada pak U. Kita semua ini jadi kompak, ngga ada yang namanya mau membelot. Kita saling menghargai, saling percaya kita. Sampe kita di bantu sama LSM karena apa? Karena kita punya banyak channel lah istilahnya mereka percaya sama kita, kita ngga salah. Itu kan juga manfaat buat kita, bener ngga bang? Kita punya kenalan sana sini kita minta bantuan, gitu.
6	I	Kita kan ngga punya apa-apa, yang kita punya cuma bukti surat surat rumah kita ini. Itu yang bisa kita pake buat ngelawan pemprov ke pengadilan nanti. Tapi disini kita punya kekuatan yang ngeyakinin kita kalau kita ngga akan digusur. Kita punya solidaritas disini warga pulo semuanya pada kompak nolak relokasi. Kalo ngomongin masalah tindakan juga sama, kita juga kompak ngga ada yang beda. Sekarang kita juga udah ada LSM kita manfaatin juga bantuan LSM ini. Supaya kita menang di pengadilan, kita juga ngga ke gusur.



Tindakan Aktor

No	Nama	Koding
1	AO	<p>Tindakan kita dalam menolak relokasi ini, ya pertama kita nolak direlokasi. caranya gimana? Dengan tindakan bertahan disini di pulo. Kita bertahan disini dari dulu, dari awal adanya program ini, sampe yang wilayah rw 02 dulu digusur sampe sekarang juga kita kaga digusur. Karena apa? Karena kita bertahan disini, kita tetep dengan kesepakatan kita. Kita jangan goyah, sebelum ada ganti rugi pokonya kita kaga bakal pergi dari sini.</p> <p>Tindakan selanjutnya, kita, saya bersama warga pulo ini protes ke Kecamatan. Kita protes kenapa tadinya ada uang ganti rugi sekarang tiba-tiba kaga ada? Ini ada apa? Kita udah mau ngikutin program Pemerintah sekarang kenapa kita malah di bohongin. Saya sampaikan ke Camatnya Pak Sofyan, saya bilang “saya sebagai perwakilan warga, saya sangat keberatan dengan program ini. Saya bersama warga tidak akan pergi dari kampung saya Kampung Pulo sebelum ada ganti rugi”, garis besarnya itu saya sampein ke camatnya. Itu 2 tahun yang lalu saya sampein, sampe sekarang kita juga kaga direlokasi karena mereka gak bisa ngasih uang ganti rugi. Berarti protes kita juga ampuh kan.</p> <p>Kenapa ada aksi demo? Karena setelah aksi protes dulu ke kantor camat, kita sepakat tindakan kita berikutnya kita gelar demo. Aksi demo ini sebagai aksi terbuka lah, biar warga Jakarta juga tau kalo kita bukan ngga mau direlokasi, kita mau direlokasi tapi diganti dulu rumah kita, kampung kita diganti dulu. Jangan dibuat seola-olah kita melawan Pemerintah, itu di tv kan begitu dibuat nya. Aksi demo juga kita lakukan sebagai bentuk protes kita terhadap Pemerintah DKI, Gubernur, kita mempertahankan kampung kita ini. Di aksi demo itu saya ngga ikut terjun langsung, karena saya udah kaga kuat lagi. Saya mendukung dari belakang, saya beri dorongan kepada koordinator kepada semua warga pulo saya beri mereka dorongan. Jangan mundur, jangan anarkis, jangan menyerang aparat itu. Sampe yang terakhir akhirnya pecah juga, perang sama aparat waktu itu. Karena waktu itu kita diserang duluan pake gas air mata.</p>



		<p>Jadi setelah kita dari DPRD, kan belum jelas itu gimana kelanjutannya. DPRD juga ngga bisa ambil kebijakan sendiri katanya. Kemudian dateng bantuan dari temen-temen LSM ini, ada ni LSM. Alhamdulillah makin banyak yang ngedukung kita, kita bersyukur bisa dibantuin, kerjasama lah sama mereka. Sebelumnya kita juga udah pernah kerjasama sebelum sebagian wilayah pulo kena gusur yang kemaren. Kita sama-sama kumpul sama LSM di karang taruna kita bicarain masalah kita, langkah-langkah kita kedepannya bagaimana. Seteleah sekian kali kita rapat, kita tetepin langkah kita selanjutnya kita gugat Pemprov ke Pengadilan.</p>
<p>2</p>	<p>IS</p>	<p>Nah sekarang dengan kita bertahan disini, bukti kan mereka kaga ada yang berani gusur kita dari sini. Karena apa? karena kita punya surat. Udah skak mat mereka (Pemprov DKI). Kita emang orang bodoh, tapi yang namanya kebenaran pasti bakal terungkap. Kita berani nentang Pemerintah karena menurut kita cara kita bener, kita gak salah. Ini tanah kita, rumah kita, saya yakin saya gak akan digusur. Saya juga gak akan mau digusur sebelum ganti rugi dikasih dulu.</p> <p>Sama kaya yang tadi di bilang sama Babe Onin tadi, tindakan kita selanjutnya sebagai warga yang menolak direlokasi ya kita protes ke kantor Kecamatan. Ini gimana nih kok melenceng dari perjanjian awal? Kasarnya gitulah kita protes kesana. Kan tadinya kita katanya mau dikasih ganti rugi 25 persen dari NJOP, kok tiba-tiba berubah jadi kaga diganti. Makanya kita semua protes kesono, kita kawal Babe Onin sebagai tokoh warga dan saya juga sebagai perwakilan warga Kampung Pulo yang menolak dan mempertahankan kampung kita.</p> <p>Saya waktu demo itu gak ikut, sama kaya si onin udah gak kuat fisik saya. Tapi saya tetep dukung semua temen-temen yang berangkat, kita doain mereka semua dari rumah. Kalo ditanya tindakan, ya ini tindakan kita udah. Semua tindakan kita sama, kita gak asal main tindakan sendiri. Semua udah kita atur, kita udah sepakatinlah. Kemarin demo yang terakhir itu ricuh karena tindakan aparat yang main hakim sendiri. Inget kita cuma nolok relokasi, cuma menuntut hak kita.</p>



		<p>Tindakan kerjasama ini, ibaratnya alternatif terbaik bagi kita agar kita dapet ganti rugi. Kan gitu bahasanya, kan sudah saya jelasin waktu wawancara awal, kita ini bukannya melawan Pemerintah, kita kan awalnya mau direlokasi. tapi kenapa tiba-tiba berubah, kita jadi gak dapet ganti rugi. Semua saya mendukung kok pembangunan. Siapapun Gubernurnya, mau Ahok, mau nanti guberbur baru. Cuma hak kita, hak warga Kampung Pulo tolong diberikan. Kita mau rumah kita yang kena gusur ini diganti dengan rumah, karena kita yang membangun ini rumah bukan Pemerintah. Sekarang ada LSM alhamdulillah kita semakin tenang, semakin yakin kita bakal menang di Pengadilan. Saya serahin urusan ini sama udin, karena udin ini paling ngertilah soal kaya begini, fisik saya udah ngga kuat kalo mesti adu mulut. Jadi saya serahin ke udin, warga juga semua dukung udin. Ini LSM dua-duanya emang bener niat mau bantu kita, karena mereka tahu kita ini bener kita nuntut hak kita.</p>
<p>3</p>	<p>F</p>	<p>Pertama kita nolak dengan cara tetep bertahan disini. Kita ambil sikap, ambil tindakan. Kita kenapa menolak? Karena kita mau dari Pulo dipindahin ke Rusun, kagak kita menolak. Silakan Pemerintah menjalankan program ya silakan, kita terima, kita ngga menolak program, program Pemerintah kita ngga menolak kok. Cuma yang kita ngga suka ini dengan caranya. dilakukan represif terhadap rakyat, dipindahkan mereka ke Rusun dengan yang tadinya mereka punya rumah jadi ngontrak. Ada yang sampai dari pertamanya hidup duduk-duduk di Kampung Pulo tiap bulan nerima duit kontrakan, sampai di Rusun bayar. Tadinya dia hidup dari uang apa? Uang kontrakan. Dia punya rumah, punya kontrakan. Setiap bulan dia tinggal nerima kontrakan, ada yang 400, ada yang 500 perbulan. Duduk aja nganggur dia bisa dapat gaji. Di Rusun terbalik. Dia duduk di sini, nganggur, malah bayar. Sampe sekarang kita gak dipindahin juga, kita gak masalah kebanjiran disini. Mungkin kalau orang-orang orang Kampung Pulo bilang banjir sudah menjadi ciri khas Kampung Pulo gitu. Ya ini sih maaf, mungkin kalau sebagian banyak orang Pulo, lebih baik gue kebanjiran daripada pindah ke Rusun.</p>



	<p>Tindakan kita selanjutnya kita protes ke pak Sofyan, ke pak camatnya langsung. kita keberatan, hujan intruksi itu rapat. Tapi kembali lagi, mereka (camat) bilang ngga tau pokoknya ini semua tidak ada ganti rugi 0%, semua harapkan bubar. Buat apa dia ada ukur-mengukur, sampai didatengin orang BPN? Orang BPN didampingi oleh pihak kelurahan ya kan. Pihak kelurahan minta bantuan orang BPN karena mereka tahu bakal dibayar. Tapi kenyataannya tidak, sampai PBB yang punya tunggaan waktu itu disuruh lunasin. sebelum ada relokasi itu rumah kita diukur, seolah-olah kayak orang mau dibayar tu rumah. Difoto, tapi setelah ada pengukuran, difoto, sampai diadakan pertemuan di Kecamatan ternyata ending dari semua rapat itu tidak ada ganti rugi, 0 persen, ya ngga.</p>
	<p>Alhamdulillah kita setiap malam jumat yasinan ngga pernah putus, setelah yasinan itulah biasanya kita semua pada bahas masalah relokasi. Kita semua musyawarah, cari jalan keluarnya bagaimana seupaya kita dapet nuntut hak kita, suapaya kita juga gak main di gusur aja. Dengan begini kita semua semakin kompak, kita tetep pegang aturan dan kesepakatan kita dalam menolak relokasi ini, semakin teguh pendirian kita nolok relokasi. Dan Alhamdulillah juga sampe saat ini kita ngga di gusur-gusur.</p>
	<p>Tindakan aksi demo kita ini, dari mulai yang pertama dan kedua itu damai-damai aja, ama-aman aja. Nah yang ketiga ini yang terakhir kemarin, gak karu-karuan udah gak bisa saling kontrol. Sampe adik saya itu si ayef di tangkep sama polisi nginep sehari di Polsek, eh dua hari. Kemarin ada 20 orang di tangkep gara-gara dianggep ngelawan aparat, kita ngga ngelawan gimana?kita disiram gas air mata. Kita demo kita di usik, di bilang ganggu ketertiban. Terus kalo bukan kita yang perjuangin hak kita siapa lagi? Yang pertahanin kampung kita siapa lagi?. Tapi ini semua ada hikmahnya, alhamdulillah setelah kejadian itu, tindakan kita dapet respon dari DPRD, setelah kita dipanggil kesana kita datengin mereka. Kita musyawarah deh disana.</p>



		<p>Kerjasama kita sama LSM ini, apa itu namanya Ciliwung Merdeka dapat terbentuk karena apa? Karena mereka berinisiatif untuk membantu kita menuntut hak-hak kita ini. Kita ya otomatis ngga nolak, karena ke DPRD juga udah mentok, apa lagi mau ke Pemprov? Di tendanglah kita. Hahaha. Kita kerjasama sama mereka juga agar kita ini aman, aman dalam arti kita jadi semakin tidak takut untuk digusur sewaktu-waktu sama Pemerintah. Mereka juga membantu kita untuk menuntut hak kita ke Pemprov, nanti mau dibawa ke Pengadilan biar kita bisa memenangkan gugatan.</p>
		<p>Sejak awal kerjasama kita sama itu LSM, tahun 2016 kemarin sampe sekarang kita udah rapat dua kali. Iya dua kali rapat kita, terakhir bulan januari abis tahun baru disitu kita bahas langkah-langkah kita selanjutnya agar tuntutan kita bisa dimenangkan di</p>
		<p>Pengadilan. Abis rapat itu kita semua warga yang menolak direlokasi, disuruh ngumpulin fotokopi ktp, kk, sama PBB. Itu saya kurang paham buat apa, kita juga buat kesepakatan tertulis sama mereka bahwa kita akan tetep menuntut hak kita dan ngga akan berubah sampe kapanpun ke Pengadilan.</p>
<p>4</p>	<p>Y</p>	<p>Kita pokoknya bareng-bareng mempertahankan kampung. Caranya gimana? Kita ambil tindakan sesuai kesepakatan kita sama warga lain yang juga nolak direlokasi. Kita bertahan dulu disini di kampung kita sendiri, di rumah kita sendiri. Kita ngga akan mau direlokasi sampe bener-bener ada ganti rugi yang jelas. Bukan kaya dulu yang tiba-tiba diganti sama unit Rusun bukan diganti uang. Kita bertahan disini bukannya kita diem bukan, kita bertahan disini biar kita gak direlokasi, biar kita juga dapet ganti rugi. Kalo gak diganti rugi kita mau tinggal dimana? Di Rusun? Saya gak pernah mimpi tinggal di Rusun. Saya lebih nyaman di pulo walaupun disini selalu kebanjiran.</p>
		<p>Ya kita semua samalah, tindakan kita ini berdasarkan kesepakatan udah pokoknya. Kita semua ini bukan temen bukan tetangga, ibaratnya kita semua ini saudara disini. Saya ya tetep nolak relokasi, saya juga ikut protes ke kantor camat. Saya protes karena waktu itu juga rumah saya udah di ukur mas, udah di foto-foto, sampe orang BPN masuk ke rumah saya. Katanya mau diganti, mana??. Pokoknya tindakan kita ini sama ngga ada bedanya semua disini yang nolak.</p>



		<p>Tindakan kita ini dengan kerjasama sama LSM, itu sangat berpengaruh bagi saya sebagai warga yang nolak. Sangat membantulah. Karena saya melihat ada harapan dari kerjasama dan bantuan LSM ini. Ini kan kemarin kita rapat, kita ngumpulin berkas-berkas itu, sama bikin perjanjian yang di tandatangi oleh Bang Udin sebagai perwakilan warga dia itu. Kita udah bikin perjanjian sama LSM, kita siap bawa masalah ini ke Pengadilan. Biar kita juga ngga was-was dari ancaman relokasi, biar kita dapet ganti rugi kalo kita direlokasi. Percuma kalo selama ini kita nolak dipindah, kita bertahan disini tapi kalo pada akhirnya ngga diganti kan buat apa?.</p>
<p>5</p>	<p>U</p>	<p>Tindakan? Kalau tindakan yang saya lakukan ya yang sesuai sama kesepakatan sama temen-temen disini yang juga nolak direlokasi. Tindakan kita yang jelas dengan kita bertahan disini, kita jaga kampung kita, rumah kita dari itu Pemerintah yang mau ambil rumah kita secara paksa. Kita tetep bertahan disini di pulo. Kita tetep dengan pendirian kita. Walaupun katanya disini kita kebanjiranlah, kita kena penyakit. Gak ada itu semua, kita disini baik-baik aja kita sehat-sehat aja, mau gimana pun kita gak akan mau direlokasi.</p> <p>Waktu kita bertindak protes ke kantor Kecamatan Jatinegara itu bener-bener emosi saya waktu itu, sampe gebrak meja saya. Saya emosi, karena itu tadi saya bilang saya merasa dimanfaatkan sama Pemprov sama camat. Rumah kita juga mau diancurin, kita mau dipindahin se enakny aja ngga diganti lagi. Udah pokonya kalo saya omongin nanti saya malah emosi kalo di inget lagi. Yang penting sekarang kita kaga di gusur itu aja. Tapi kita ngga tau ke depannya bagaimana, makanya kita terus jaga persatuan kita ini warga pulo semuanya yang nolak relokasi.</p> <p>Aksi demo kita yang terakhir itu, yang sampe kita dibentrokin sama aparat. Itu bener-bener deh ahok, maksudnya apa kita dibenturin sama aparat begitu? Tindakan kita ini tidak menyalahi aturan, kita sampein unek-unek kita, tuntutan kita. Kita gak</p>





	<p>Anarkis, saya waktu itu inget betul kita disiram pake gas air mata, waduh bener-bener. Kita ya ngelawan, kita serang pake petasan itu, hujan batu waktu itu. Setelah aksi demo itu ngga lama tahun kemarin kita langsung di panggil komisi B DPRD, saya juga waktu itu berangkat kesana ke kantor dpr. Disana kita ngebahas masalah ganti rugi, bareng DPRD bareng Pemprov juga, kita sampein semua tuntutan dan meminta hak kita sebagai warga Kampung Pulo.</p>
	<p>Setelah pertemuan pertama yang kesepakatan tadi, dua minggu kemudian bulan oktober kita sama-sama rapat di karang taruna. Disana kita musyawarah, kita bicarakan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Nah akhirnya disitu, kita putusin bahwa langkah kita selanjutnya adalah menggugat ke Pengadilan. Disitu juga saya mendatangi perjanjian dengan itu LSM saya tanda tanganin perjanjiannya, mewakili warga semua ini yang nolak relokasi.</p>
	<p>Isi perjanjian itu secara garis besarnya, bahwa kita sebagai warga Kampung Pulo sepakat untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada LSM Ciliwung Merdeka, sebagai perwakilan kita diranah hukum untuk menggugat pihak Pemprov ke Pengadilan agar mau memberikan hak dan tuntutan kami sebelum program relokasi dilaksanakan. Kita juga menuntut Pemprov DKI yang membatalkan perjanjian ganti rugi lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 itu. Yang undang-undang soal agraria. Di perjanjian itu juga berisi poin-poin tuntutan yang kita sampaikan. Secara garis besar itu perjanjiannya.</p>
	<p>Nah setelah kita buat kesepakatan dan perjanjian itu, kemudian kita semua diminta untuk mengumpulkan Fotokopi KTP, KK dan PBB. Itu kita kumpulin buat mendata warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi. Dan terutama untuk melengkapi berkas-berkas yang akan dibuat untuk menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan. Kemudian setelah rapat pertama dan semua berkas dilengkapi, kita mengadakan rapat yang kedua tahun baru kemaren bulan januari. Sebelum rapat kedua kita adakan, kita evaluasi dulu ini dari rapat pertama apa aja yang kurang, data-data yang dikumpulkan sudah lengkap atau belum? Kemudian berkas apalagi yang harus kita lengkapi?. Itu semua saya komunikasi terus sama pihak LSM, nah kemarin itu memang soal data kita agak terlambat ngasih, karena warga juga terlambat ngumpulannya. Warga telat ngumpul juga bukan ngga beralasan, warga trauma sama yang namanya ngumpul berkas-berkas. Dulu kita juga kan disuruh ngumpul berkas-berkas sama Kecamatan tapi buktinya nihil. Tapi ini karena udah</p>



		<p>kesepakatan kita, maka ya kita tetep komitmen, semua warga akhirnya ngumpulin berkas walaupun telat-telat juga</p>
		<p>Evaluasi masalah data beres, kita terus komunikasi sampe akhirnyakabar terakhir kita mesti nunggu dulu berkas-berkas yang lain untuk tuntutan ke Pengadilan masih harus dilengkapi katanya</p>
		<p>Ini kenapa gugatan kita bisa sampe di Pengadilan, karena kita bertindak sesuai hukum dan norma, makanya kita berani menggugat. Kita juga dapet bantuan dari LSM buktinya, kita bisa gugat ke Pengadilan juga karena berkat kerjasama kita sama dengan LSM ini. Gugatan kita bisa naik ke Pengadilan, karena pertama kita punya komitmen, kesepakatan kita dari awal jelas. Kita menolak direlokasi dan kita menuntut hak ganti rugi jika kita direlokasi. tindakan yang kita ambil selama ini juga gak ngelanggar hukum. Kedua kita bisa menggugat karena fakta yang kita terjadi dan yang ada dalam tuntutan itu jelas. Kemarin setelah rapat pertama kita ngumpulin data kita untuk berkas ke Pengadilan, selesai. Terus kita sama LSM ini mengajukan gugatan kita ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN). Isi tuntutan tersebut, isinya satu kita menggugat kebijakan Pemprov</p>
		<p>yang semena-mena mau gusur kita, kedua kita nuntut hak ganti rugi kalo rumah kita digusur, ketiga kita menolak relokasi karena tindak sesuai dengan perjanjian awal. Setelah kita mengajukan tuntutan kita, kan diterima tuh, kita bayar biaya perkaranya ke Pengadilan. Semua biaya itu yang ngurus pihak LSM. Nah setelah pendaftaran ini selesai, kita sekarang tinggal nunggu panggilan Pengadilan.</p>
		<p>Ini kan udah bulan maret, kita daftar dari desember bersihnya. Hasil dari koordinasi terakhir saya sama LSM, ini gugatan kita lagi di periksa perkaranya. Kita tinggal nunggu sampe abis pemilu katanya april, kita nunggu panggilan dari Pengadilan itu perkembangan terakhirnya.</p>

<p>6</p>	<p>I</p>	<p>Saya ini mas ngga banyak tuntutan orangnya, saya ngga mau ngelawan Pemerintah sebenarnya. Tapi karena Pemerintah menzalimi saya, orang tua saya dan keluarga saya, maka saya ngelawan. Sayaolak direlokasi. Saya ini yakin tindakan yang saya ambil sama temen-temen ini ngga salah, saya 100 persen yakin. Tindakan yang saya ambil ya sama kaya yang temen-temen bilang, tindakan pertama kita adalah caranya bertahan disini di kampung kita. Yang namanya kampung tempat kita lahir, tempat kita di gedein, tempat kita nyari makan juga, ya kita tetep bertahan disini mas. Itu tindakan kita.</p> <p>Saya kalo bertindak sesuai sama yang dibilang Babe Onin, karena dia buat saya juga orang tua saya. Dia ibarat orang yang dituakan disini, tokoh warga lah istilahnya. Kita semua bertindak sesuai aturan main, sesuai kesepakatan sama temen-temen yang laen. Kita gak ada disini bertindak sesuai mau nya sendiri, apalagi membelot itu namanya penghianatan bakal dimusuhin sama orang-orang disini. Saya ikut ngawal waktu protes ke Kecamatan. Saya juga ikut protes, karena saya menuntut hak saya. Saya ngga mau kalau saya direlokasi saya gak dapet apa-apa, ya allah jangan sampe dah. Mau tinggal dimana saya mas? Makanya apapun yang dilakuin sama warga untuk nolak relokasi saya ikut yang penting saya dapet ganti rugi. Saya juga mau mempertahankan tanah saya.</p> <p>Aksi kita, tindakan kita setelah aksi protes waktu itu, kita gelar aksi demo di jembatan, di pulo atas. Berapa kali kita demo ya, ada 3 kali kalo gak salah. Saya sama temen-temen ini, sama warga pulo semua kita demo disana. Kita teriak, kita nolak direlokasi, kita tagih perjanjian awal kita mau diganti rugi katanya. Kita juga bawa spanduk, sampe waktu itu kita di liput sama media, apa itu ya metro apa tv one apa sctv saya lupa. Saya juga di wawancara, saya bilang sama tv saya ini bukan warga nolak yang melawan Pemerintah. Saya nolak direlokasi karena saya nuntut hak saya dulu baru saya mau pindah, saya tagih janji mereka itu pada para penguasa yang mau gusur saya. Sampe apa coba? Sampe kita mau dibentrokin sama abri sama satpol pp padahal kita ini bukan bandit, bukan penjahat, kita nuntut hak kita.</p>
----------	----------	---



		<p>Kerjasama kita sama LSM ini, juga sangat membantu kita. Kita jadi makin kuat karena kita di dampingi mereka. Sekarang orang kelurahan sama orang Kecamatan mau datang ke kita, minta kita untuk segera pindah ke Rusun juga ngga berani. Mereka mau ngancam gusur kita juga ngga berani, karena kita sekarang udah di dampingi sama LSM loh ngga tanggung-tanggung. Apalagi sekarang ini, alhamdulillah sih katanya perwakilan LSM kemarin ini katanya sekarang lagi proses ke Pengadilan. Kita disuruh nunggu sampe pemilu besok ini selesai. Itu yang lebih tau intinya pak udin, karena dia lebih masuk ke dalam LSM.</p>
--	--	---



Lampiran 3. Data Warga Kampung

**DATA WARGA KAMPUNG PULO
 RUKUN WARGA 03
 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
 KECAMATAN JATINEGARA-JAKARTA TIMUR**

NO.	KEPALA RUMAH TANGGA		JENIS KELAMIN	RUKUN TETANGGA	KETERANGAN
	NAMA	TEMPAT LAHIR			
1.	H.taufik	Banten	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
2.	Faridah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
3	Wardatul adawiyah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Guru
4	Nur'aini	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
5	Muslimah	Banten	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
6	Aliudin	Bogor	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
7	Mulyadi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
8	Anada	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Karyawan Swasta
9	Chairudin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Karyawan Swasta
10	Darmayanti	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
11	Udin saepudin	Pandeglang	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
12	Maesaroh	Pandeglang	Perempuan	RT 011/3	Dagang
13	Sopyan	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
14	Solihat	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
15	Stefano	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
16	Fahrul rozi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
17	Nasrul	Padang	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
18	Noverma	Sumani	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
19	Ramayanti	Padang	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
20	Febrayunas	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
21	Rika yuna	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Karyawan Swasta
22	Fadillah	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
23	Sarip	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
24	Juleha	Tangerang	Perempuan	RT 011/3	Dagang
25	Husin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
26	Rohani	Jasinga	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
27	Rachmad	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
28	Suartini	Bogor	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
29	Ninis khairunnisa	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Karyawan Swasta
30	Sjarifuddin	Tg pinang	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
31	Sari	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Karyawan Swasta
32	Ahmad Onin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
33	Suryadi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
34	Masturo	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
35	Baehaky	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
36	Memed	Bogor	Laki-laki	RT 011/3	Dagang



37	Andiani	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
38	M.effendi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
39	Ahmad fauzi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
40	Arroyani	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
41	Abdul Korib	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
42	Muhammad	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
43	Momo s	Bogor	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
44	Komarudin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
45	Yusniati	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
46	Firman	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
47	Rian	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
48	Nurefri	Padang	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
49	Rahmayeni	Lk.basung	Perempuan	RT 011/3	Dagang
50	Karomudin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
51	Alwani	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
52	Kurniawati	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
53	Fauzia	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
54	Bihakki	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Swasta
55	M.surur	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
56	Holidah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Porter
57	Sudirman	Durian jantung	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
58	Asmahayati	Padang	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
59	Rohmat	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
60	Dewi	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
61	Suriansyah	Sungai tiung	Laki-laki	RT 011/3	Guru
62	Zahro	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
63	Kapid	Babakan	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
64	Rahma	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
65	Patimah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
66	Siti Yuliana	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
67	Nurul Hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
68	Mukri	Banten	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
69	Nur alfi lael	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
70	Musliah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
71	Moh muslim	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
72	Novita sari	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
73	Abdul Rojak	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
74	Rosita nurfianti	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
75	Munadi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
76	Ety sulastri	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
77	Rita	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
78	Farhan saptahadi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
79	Kurnia	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
80	Supriyadi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
81	Maesaroh	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
82	Dita septiana	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan



83	Moh Isa	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
84	M.zulfikar shahab	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
85	Hendri Yani	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
86	Vebyri	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
87	Priyatna	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
88	Arman	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
89	Heri Hermawan	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
90	Zubirman	Padang	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
91	Prayudi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
92	Haliri	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
93	N u n g	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
94	Basir	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Dagang
95	Taurusita	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
96	M subadri	Banten	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
97	Dimyati	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
98	Sarip Hidayattulloh	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
99	Mariam	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
100	M barzah	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
101	Andiah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
102	Umi hani	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
103	Fitriyah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
104	Awaludin	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
105	Purnomo	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
106	Halimah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
107	Ahmad Ikwana	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
108	Junaedi	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
109	Abd azis	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
110	Ahdiah	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Dagang
111	Muhamad Yusup	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
112	Rumiati	Purbalingga	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
113	Deni Febriansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Serabutan
114	Desi Dina	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
115	Rusdiana	Jakarta	Perempuan	RT 011/3	Serabutan
116	Hartono	Pandeglang	Laki-laki	RT 011/3	Guru
117	Asep Syaepulloh	Jakarta	Laki-laki	RT 011/3	Guru
118	Muttaqin	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
119	Nur Barokah	Batang	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
120	M. Hudaya	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
121	Nina Kristiana	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
122	Ismail	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
123	Muhammad nuh	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
124	H a s a n	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
125	Siti Nurhayah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
126	Danita Putri	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
127	Rahayu	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
128	Ma'mun bathani	Pandeglang	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan



129	Mutamimah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
130	Yulius	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
131	Nurmani alip	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
132	Hj.mariyah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
133	Mandu Chaeroni	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
134	Hamjah	Banten	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
135	E m i	Banten	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
136	Zakiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
137	Lukmanul Hakim	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Karyawan Swasta
138	Ichwan Rukmana	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Karyawan Swasta
139	Rukiah	Pandeglang	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
140	Supriyadi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
141	Rusmiyati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
142	Sopinah	Jasinga	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
143	Hermansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
144	Sadjidin	Serang	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
145	Mahmuda	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
146	Muhibah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
147	Wiwin	Kuningan	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
148	Nurpa	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
149	Resmini	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
150	Nahiliah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
151	Suyatna	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
152	Siti Wahyuni	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
153	Andini	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
154	Herlan Gunawan	Pandeglang	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
155	Herdiana	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
156	Humaesih	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
157	Suparman	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
158	Tati Suhartati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
159	Rachmat Hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
160	Rukmini	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
161	Mansur	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
162	Erma Erwin	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
163	Muhammad Husien	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
164	Arman	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
165	Tiara Darmayanti	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
166	Haryati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
167	Sanwani	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
168	Marhasan	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
169	Suhendar	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
170	Dewi Suhariyah	Bogor	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
171	Zulmaini	Padang	Perempuan	RT 012/3	Dagang
172	Inin Suhanin	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
173	Achmad Munandar	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Guru
174	Farida	Banten	Perempuan	RT 012/3	Serabutan



175	Jaeni	Banten	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
176	Farina fitri	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
177	Ucung Sunaryah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
178	Rahmat	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
179	Elda Siswati	Pd.laring	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
180	Ferry anwar	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Karyawan Swasta
181	Betnawarti	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
182	Moh Jaini	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
183	Ashari	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
184	Sumardiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Guru
185	Darmili	Padang	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
186	Indra Saputra	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
187	I s m a i l	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
188	Husnul Chotimah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
189	Alpian	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
190	Samsiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
191	B u h a r i	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
192	Zubaedah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
193	Nur irsyahdiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
194	Husin sairi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
195	Samoja Sapei	Banten	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
196	Danirwana	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
197	Isri rosnawati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
198	Supendi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
199	Ferra Maradena	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
200	Nurdin	Tasikmalaya	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
201	Siti Munawaroh	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
202	Vivi Hanifah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
203	Hj Ratna Ningsih	Banten	Perempuan	RT 012/3	Dagang
204	Ahmad Bustami	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Guru
205	Siti Fariha	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
206	Sasmedi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
207	M.rawandi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
208	Siti umainah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
209	Sarip hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
210	Encuh suhandi	Bogor	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
211	Sukrul ma'mun	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
212	Maemunah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
213	Chotman frinadi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
214	Zainal basir	Padang	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
215	Ayu gustiani	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
216	Sarip hidayat	Garut	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
217	Pujiati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Karyawan Swasta
218	Ahmad royani	Cianjur	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
219	Nuryanah	Batang	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
220	Nurjanah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan



221	Ivan ahyadi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
222	Siti haldiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
223	Syahrizal effendi,a	Batu basa	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
224	Surmiati	S pingai	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
225	Yulia andriyani	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
226	Rukiyat	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
227	Muh novel alwi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
228	Rizqi amelia	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
229	Samsiah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
230	Abd rachman	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
231	Sa'diah	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
232	Imam hanafi	Bima	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
233	Novianti	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
234	Willy erawan	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
235	Yulis setiani akbar	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
236	Rahmawati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
237	Saiful rachman	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
238	Rizal fauzan	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
239	Witdiawati	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Karyawan Swasta
240	Helda suroya	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
241	Reni febriani	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
242	Hery safari	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
243	Ery karnadi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
244	Dewi ariyani	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Serabutan
245	Ujang syaefudin	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
246	Bagas sugiyarto	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
247	Deny handayani	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Dagang
248	Annisa	Jakarta	Perempuan	RT 012/3	Dagang
249	Suryadi	Jakarta	Laki-laki	RT 012/3	Serabutan
250	Sri rokayah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
251	Ikbal saputra	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
252	Edi saputra	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
253	M. Mulyana	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
254	Achmad bechoffi	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
255	Angga permana	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
256	Mandu haironi	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
257	Ambar rukmana	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
258	Gustini	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
259	Nurdin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
260	Hodijah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
261	Elo chumaeroh	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Dagang
262	Rido hidayat	3jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Karyawan Swasta
263	Mardiyana	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Dagang
264	M.novel	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
265	Susi elfiziah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
266	Siti royanah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan



267	Angga hardiansah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
268	Muhammad	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
269	Badrul tapsir	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
270	Yuliyannah	Bogor	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
271	Enjai sanjaya	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
272	Ima	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
273	Muhamad toha	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
274	Pitriyani	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Dagang
275	Iyan supiani	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
276	Ahmad irwansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
277	Ahmad andriansah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
278	Umiyati	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
279	Ruslan	Sumedang	Laki-laki	RT 013/3	Karyawan Swasta
280	Windah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
281	Eric bastian	Medan	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
282	Maria ulpah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
283	Ahmad fauzi	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
284	Hujainah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
285	Nursan	Bogor	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
286	Saeti	Bogor	Perempuan	RT 013/3	Karyawan Swasta
287	Ir.asis wiyanto	Lumajang	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
288	Titis sukendar	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
289	Siti safuroh	Tangerang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
290	Abdul mutolib	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
291	R e n i	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
292	Maulana hasan	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
293	Husin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
294	Somaludin	Banten	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
295	Widodo	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
296	Rusmah dalina	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
297	Dina	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
298	Andriansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
299	Hakim	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
300	Ansurati	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Karyawan Swasta
301	Titis yevrison	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
302	Badriyah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
303	Evi sabariah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
304	Hj.tuti maryati	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
305	M. Zaenuri	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
306	Achmad azhari	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
307	Imi rohami	Majalengka	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
308	Wahyudin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
309	Erna muliana	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
310	Teguh	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Guru
311	Agus endang suryana	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Guru
312	Marwan	Padang	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan



313	Hilmiati	Padang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
314	Ridwansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
315	Ahmad baihaqi	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
316	Perawati	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
317	I m a h	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Dagang
318	M.nasir	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
319	Fachrudin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
320	Yuni damayanti	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
321	Yuli asdiana	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
322	Dedy	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
323	Enung nurasiah	Sukabumi	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
324	Achmad faisal	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
325	Yuyun yuliani	Bandung	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
326	Hendrik firdaus	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
327	Hamdani	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
328	Nurmala	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
329	S e n a h	Bekasi	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
330	Rusdiansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
331	Hendra Yuwono	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
332	Masitoh	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
333	Jajat Sudrajat	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
334	Siti Juariah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
335	Siti Fauziah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
336	Hairudin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
337	Nita Sopiah	Pandeglang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
338	Dede Zaenal	Sukabumi	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
339	Marfuah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
340	Hj.Sukaesih	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
341	Hj.Hamdah	Banten	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
342	Iyot Nuriah	Banten	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
343	R u d y	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
344	Mustakim	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
345	Achmad Fachrul Roji	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
346	Badru salam	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
347	Sulaeman	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
348	Kurniasih	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
349	Fatoni	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
350	Anna Mariana	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
351	Saepur Rahman	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
352	Ahmad saripin	Pandeglang	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
353	Suhermi	Sinar baru	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
354	Pebriyani Yuningsih	Pandeglang	Perempuan	RT 013/3	Karyawan Swasta
355	Panca Handiyani	Pandeglang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
356	Rachmat Maulana	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
357	Titis marina	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
358	Sopian Hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan



359	Diyan amri	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Dagang
360	Ibham	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
361	Marwiyah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
362	Hidayatullah	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
363	Weni Handayani	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
364	Henny Husnaeni	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
365	Hasanudin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Karyawan Swasta
366	Leni Marlina	Padang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
367	Janjam Wahyudi	Malang	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
368	Sri Hartati	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
369	Novi Yulyanah	Pandeglang	Perempuan	RT 013/3	Dagang
370	Iyam	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
371	Muhamad Sofyan	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
372	Esih kamila	Bogor	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
373	Nur Sa'adah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
374	Rustam	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
375	Rusmila	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
376	Tarjukiyanto	Brebes	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
377	Siti aisah	Jakarta	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
378	Martion	Padang	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
379	Rusmini	Pacitan	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
380	Zamaludin	Jakarta	Laki-laki	RT 013/3	Serabutan
381	Nurhanah	Bogor	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
382	Siti Maspupah	Pandeglang	Perempuan	RT 013/3	Serabutan
383	Ikbal	Pandeglang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
384	Risyana Sukanda	Subang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
385	Eti Hidayati	Subang	Perempuan	RT 014/3	Dagang
386	Siti Masturoh	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
387	Susanto	Gunung kidul	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
388	Zeki	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
389	Subhi Nopiana	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
390	Rahma	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
391	Dedi yansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
392	Rahmawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
393	Asep karmana	Bandung	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
394	Irna yuliarni	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Guru
395	Aisiyah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
396	Lilis suhatris	Padang	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
397	Mella Anwar	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
398	Anisah	Haurgeulis	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
399	Ahmad ansori	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Karyawan Swasta
400	Ridwan nirwana	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
401	Novianti Agustin	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
402	M.rum	Solok	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
403	Nildawati	Solok	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
404	Siti soleha	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan



405	Ana Syafriana	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
406	Musiska	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Guru
407	Dikky Abdul rohim	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Karyawan Swasta
408	Ahmad K.	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
409	Evi sylvia rahmawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
410	Kusnadi	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
411	Kinandar	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
412	Komarudin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
413	Sumiati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
414	Moh chaidori	Kediri	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
415	Helda	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
416	Nurhayati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
417	Sinta Damayanti	Klaten	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
418	Narsem	Purwokerto	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
419	Ahmad jaelani	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
420	Sunarti	Tangerang	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
421	Husnah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
422	A.Rochman	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
423	Dewi Komala Sari	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
424	Maryati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
425	Sifa Fauziah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
426	Unah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
427	Achmad Junaedi	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
428	Muhamad Ma'ruf	Pandeglang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
429	Adung bin Adimanan	Banten	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
430	Enjoh	Banten	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
431	Siti Aminah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
432	Wahono	Sukoharjo	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
433	Akbar	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
434	Ngatiyem	Sukoharjo	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
435	Soni Sutrisna	Pekan baru	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
436	Indah sari	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
437	Faisal	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
438	Miftahul Jannah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
439	Nurul Gozali	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
440	Rizki Maulana	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
441	Mahful bin Sambyah	Tegal	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
442	Wasriah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
443	Sri Hayati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
444	Puput Handayani	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
445	Zulham	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
446	Rini Fauziah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
447	Hadi Sutopo	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
448	Ika Hadianti	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
449	Watini	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
450	Rizki Dwi	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan



451	Mujemah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
452	Muhammad Yusuf	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
453	Mohamad Iischa	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
454	H.faizin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
455	Siti rizkiah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
456	Nazarudin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
457	Nur Komariah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
458	Muhammad Nuh	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
459	Fitriah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
460	Nasrun bin Muhtar	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
461	Supriyatin	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
462	Fajar Ramadhan	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
463	Hasanudin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
464	Abdul rahim	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
465	Hidayati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
466	Erna nurmala	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
467	Januar Firmansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
468	Muhamad rusli	Palembang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
469	Henri trisnawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
470	Zaenah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
471	Rizka Melita	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
472	Rachmat hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
473	Lukman hakim	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
474	Ety suriyati	Bandung	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
475	Ety suriyati	Bandung	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
476	Mohatir muhammad	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
477	Muhamad	Bogor	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
478	Rahman alamsyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
479	Mustaan nur arifin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Karyawan Swata
480	Siti dahliah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Karyawan Swata
481	Ferdiansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
482	Mulya hadipriansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
483	Mursyih	Bogor	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
484	Tan min	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
485	Saodah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
486	Achmad satiri	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
487	Moh haer	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
488	Muh.rusli	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
489	Muhammad bahrul	Tangerang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
490	Astri deviana	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
491	Evi arfiani	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
492	Slamet	Magelang	Laki-laki	RT 014/3	Guru
493	Hardi wibiksono	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
494	May sumantri	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
495	Sri amin	Purworejo	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
496	Fatimah	Padang	Perempuan	RT 014/3	Serabutan

497	Arlis widiawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
498	Syafaruddin	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Dagang
499	Martin afandi dahram	Palembang	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
500	Mulyaningsih	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
501	Ahmad dimiyati	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
502	Dwi damayanti	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
503	Siti arfah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
504	Taslani	Pekalongan	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
505	Nemi	Bogor	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
506	Budi Kristomo	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
507	Teti Rusliawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
508	Rokhartono	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
509	Tedy arto	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
510	Rodiah	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Dagang
511	Muhammad Sya'bani	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
512	Bayu Adriansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
513	Yussi surasi	Solo	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
514	Iwan Setiawan	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
515	Wardiyahan	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
516	Indah rahmawati	Jakarta	Perempuan	RT 014/3	Serabutan
517	Trias ikhtiarto	Jakarta	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
518	Sumarsono	Madiun	Laki-laki	RT 014/3	Serabutan
519	Romi yusdianto	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
520	Priyati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
521	Kilat Maulana	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
522	Achmad Purnama	Uj pandang	Laki-laki	RT 015/3	Guru
523	M umran	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
524	Rustinah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
525	Waluyo	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Guru
526	Rifal Ari Wibowo	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
527	Murtinah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
528	Alimuddin	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
529	Awaluddin lubis	Tapanuli	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
530	Sri margiyani	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
531	Siti aisyah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
532	Anna ruliah	P siantar	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
533	Rahmah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
534	Mohamad aripin	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Karyawan Swasta
535	Junariah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
536	M.derry rivai	Bandung	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
537	Rodiah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
538	Satria putra	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
539	Rasmita	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
540	Muhamad suhandi	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
541	Suryati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Dagang
542	Sri mulyanti	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Dagang



543	Zaelani	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
544	Reja faulia	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
545	Zakaria	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
546	Anti afriyanti	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
547	Murtiah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Guru
548	Muski matamin	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
549	Tumirah	Pekalongan	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
550	M.sigit nugroho	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
551	Hesti rahayu	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
552	Aminatun	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
553	Badok	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Karyawan Swasta
554	Soleha	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
555	Djumhari	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
556	Zaitun	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
557	Adiarto	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
558	Neli selviyana	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
559	Mustakim	Pekalongan	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
560	Wiwit hidayati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
561	Kholifah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
562	Irawan	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
563	Maimunah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
564	Asroriyah	Magelang	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
565	Topik hidayat	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
566	Nur erningsih	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
567	Abdul majid	Pandeglang	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
568	Ilham gunawan	Pandeglang	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
569	Eti sumarni	Pandeglang	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
570	Mugandi	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
571	Ai aisah	Cianjur	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
572	Umi zulyana	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
573	Dadang efendi	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
574	Harti	Pekalongan	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
575	Andri efendy	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
576	Euis kurnia	Kuningan	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
577	Muhammad Yusup	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
578	Sri martini	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Guru
579	Mariyam	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
580	D a r n i	Padang	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
581	Sherly aprilia	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Dagang
582	Dicky risdiansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
583	Siti sulikah	Malang	Perempuan	RT 015/3	Dagang
584	Fadholi	Batang	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
585	Ari sanjaya	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
586	Erma	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Dagang
587	Sulaiman ali	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
588	Wartini	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan



589	Putri ayu prihatini	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
590	Hamzah harapah	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Karyawan Swasta
591	Husniwati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
592	Dahlan efendi	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
593	Yuni lestari	Sleman	Perempuan	RT 015/3	Guru
594	Sudarsih	Sleman	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
595	Suparno	Semarang	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
596	Achmad Sudiby	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
597	Camelia Siti	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
598	Sri hartati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
599	Ayu latifah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Dagang
600	Agus salim	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
601	Dewi Rahmawati	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
602	Resa Y unior	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
603	Septian Odie	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
604	Sapari	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
605	Titiana yonari	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
606	Putri yulia sapriana	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
607	Sukanto	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
608	Suprapti	Wonogiri	Perempuan	RT 015/3	Guru
609	Ibnu humaidy	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
610	Zaenal abidin	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
611	Nina yusnita	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
612	Castinah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
613	Andhika ferdian	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
614	Junaedi sopyan	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
615	Suyani	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
616	Wasriyah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
617	Qisti maulana alfaruq	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
618	Afief mustofa	Tegal	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
619	Nur aini mulkiyah s	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
620	Maemunah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
621	Abd rohim	Pekalongan	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
622	Kiptiyah	Pekalongan	Perempuan	RT 015/3	Guru
623	Siti hadidjah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
624	Siti arfiyah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
625	Budi	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
626	Munawaroh	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
627	Ramelan	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
628	Fadoli	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
629	Nurlaila	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
630	Achmad zaky	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
631	Ice titi fatimah	Bogor	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
632	Mansyur	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
633	Muhamad tasyim	Kuningan	Laki-laki	RT 015/3	Karyawan Swasta
634	Suraya	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan



635	Hamidah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
636	Rabiul anwar	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Dagang
637	Syahroni	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
638	Indra kusuma	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
639	Bahtiar muslim	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
640	Siti aisyah	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
641	Syarif hidayatullah	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
642	Rosydiana syarief	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
643	Herry suwandy	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
644	Sobari	Kebumen	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
645	I r m a	Jakarta	Perempuan	RT 015/3	Serabutan
646	Suhartono	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
647	Supratno	Jakarta	Laki-laki	RT 015/3	Serabutan
648	Febri haryono	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
649	Muhammad nasir	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
650	Surati	Banyumas	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
651	Noor	Grobogan	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
652	Nur hanipiah sari	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
653	Rudy	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
654	Wartono	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
655	Tasli	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
656	Ali nurdin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
657	Hartini	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
658	Ahmad dzulfikrin nur	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
659	Waluyo puspayudo	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Karyawan Swasta
660	Durratul khurriyyah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
661	Agoes harjanto	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
662	Listriani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
663	Supriyanto	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
664	Hapsah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
665	Nurhendi	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
666	Yeni rohmadonna	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
667	Faisal	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
668	Novi	Bandung	Perempuan	RT 016/3	Dagang
669	M.sani	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
670	Hafidz fadilah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
671	Walenah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
672	Haerul Fauji	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
673	Sri Prihatanti	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
674	Zakaria	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
675	Zainul Arifin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
676	Soleha	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
677	Yanuar Fitriadi	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
678	Ahmad Andrian	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
679	Nurlinah Sari	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
680	Matnur	Pontianak	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan



681	Armaini	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
682	Sri Suprianto	Semarang	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
683	O m a h	Bogor	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
684	Wiwien wahyuni	Medan	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
685	Rukiyah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
686	Mohamad yusup	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
687	Siti chair	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
688	St asmara	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
689	Bambang cahyono	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
690	Nismawati	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
691	Sudiono	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
692	Saela	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Dagang
693	Dede sarifudin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
694	Asri hasanah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
695	Eko wahyono	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
696	Ervina seftilina	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
697	Achmad fadli	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
698	Yuli trihayani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Dagang
699	Maliki	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
700	Patonah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Dagang
701	Karmedi	Purwakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
702	Abdilah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
703	Kiki mariah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
704	Komariah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
705	Surahman	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
706	Nurhikmah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
707	Muhammad Agus	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
708	Fitriyani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
709	Ernawati	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
710	Kuswandi	Pekalongan	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
711	Nurhikmah	Pekalongan	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
712	Adri endang duriatna	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
713	Henny hanifah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
714	Roni	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
715	Siti nurhawa. P	Medan	Perempuan	RT 016/3	Guru
716	Agus mansur mulyadi	Bogor	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
717	Aditya pratama	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
718	Aina dwi aulia	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
719	Sri mulyani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
720	Herman	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
721	Hadidjah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
722	Rina	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
723	Nikki Dwimas	Semarang	Laki-laki	RT 016/3	Karyawan Swasta
724	Dewi hilma	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Dagang
725	Niken Putri Prastiwi	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
726	Saodah	Bandung	Perempuan	RT 016/3	Serabutan



727	Murgani	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
728	Nani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
729	Siti munasih	Pemalang	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
730	Odja mihardja	Purwakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
731	Irwan	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
732	Siti mardiyah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
733	Misbah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
734	Affandi	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Karyawn Swasta
735	Miftahul huda	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
736	Herlina	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
737	Arisman	Gunung rajo	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
738	U m a r	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
739	Risky amalia	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
740	Irma suminah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
741	Mulyana	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
742	Fauziah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
743	Andriyana	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
744	Joepriana amin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
745	Yohanah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
746	Indiyana amin	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
747	Hadidjah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
748	Hikmah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
749	Salim	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
750	Wildan ranu ilyas	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
751	Mukimah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
752	Nurmahasyim	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
753	L i n a	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
754	Herman sumardi	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
755	Siti aisyah	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
756	Mohammad Abdul	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
757	Puji astuti	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
758	Luhur abdillah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
759	Deni ramdani	Bekasi	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
760	Rina angraini	Singkarak	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
761	Hj. Nurhayati	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
762	Khaerul anwar	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
763	Lilik sri suwarni	Grobogan	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
764	Zaenal arifin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
765	Muqosim	Lamongan	Laki-laki	RT 016/3	Guru
766	Harun	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
767	Panca mentari	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
768	Eni kaesih	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
769	Sutini	Banyumas	Perempuan	RT 016/3	Dagang
770	Nur Alamsyah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
771	Hermawansyah	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Dagang
772	Mamenun	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan



773	Zakaria	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
774	Eti gariyati	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
775	Jaenudin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
776	Syarifudin	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
777	Mas'ud	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
778	Aryani	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
779	Mohammad rudi	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Guru
780	Maysaroh	Jakarta	Perempuan	RT 016/3	Serabutan
781	M. Nurul jamil	Jakarta	Laki-laki	RT 016/3	Serabutan
782	Maharani maliangkay	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
783	Nurrohimi	Pekalongan	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
784	Hendra setyawan	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
785	Dendy mandika	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
786	Dian ismawati	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
787	Syamsul bahri	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
788	Hikmahyati	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Dagang
789	Ahmad rohim	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
790	Kusyanto	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
791	Kasno	Yogyakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
792	Purwanto	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
793	Tisno	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
794	Jerih	Subang	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
795	Boby yan yantra	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
796	Yunaliah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
797	Cholisoh	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
798	Agus budhiharjo	Batang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
799	Moh yunus	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
800	Robby amir	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
801	Yunisara	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
802	Ayu mardika	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
803	Sulasmi	Pemalang	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
804	Damini adam	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
805	Sufi adamiyah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
806	Mukmin setio negoro	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
807	Agung prasetio	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
808	Muhamad lutfi	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
809	Ranny cahya lutfiani	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Guru
810	Fitrianah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
811	Fauzi	Teluk betung	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
812	Hardi b durman	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
813	Rokim	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
814	Muni nuraminah	Garut	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
815	Endang supriyatna	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
816	Hardi suyatna	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
817	Handre Suyatna	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
818	Herlinda Harnisa	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan



819	Hartati	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
820	Ricky	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
821	Ani setiyawati	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
822	Erry dwiyanthi	Bogor	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
823	Jumiati	Bangkalan	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
824	Hendro saputro	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
825	Dwi rosan	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
826	Khairun nisa	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
827	Arie nugraha	Tasikmalaya	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
828	Ayleen evangelista	Tasikmalaya	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
829	Iin seila	Tomohon	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
830	Bangkit galih	Sleman	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
831	Suhendra	Kuningan	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
832	Anis mahmudah	Purworejo	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
833	Resti fauziah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Karyawan Swasta
834	Tursino	Kebumen	Laki-laki	RT 017/3	Karyawan Swasta
835	Lilis yulyana	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Karyawan Swasta
836	Slamet suprihatin	Sragen	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
837	Andriaman silitonga	Medan	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
838	Zulkifli effendi	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
839	Riko hardiansah	Ngawi	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
840	Ristanti ningrum	Purworejo	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
841	Legiyah	Purworejo	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
842	Joko wibowo	Klaten	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
843	Nurul mukminah	Banyuwangi	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
844	Pilot surbakti	Cinta rakyat	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
845	Feby naomi	Bandung	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
846	Seffrial	Lemah abang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
847	Ratna juwita	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
848	Winarto mochtar	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
849	Putri rahma	Sleman	Perempuan	RT 017/3	Dagang
850	Irman firmansyah	Bandung	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
851	Nur ikmah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
852	Asep Asmara	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
853	Dian riani	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
854	Amirudin	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
855	Fransiska lusia a	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Dagang
856	Edy sucipto	Tegal	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
857	Makdori	Tegal	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
858	Ari sulaiman	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
859	Djumiaty	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
860	Edipin	Medan	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
861	Jumadi	Sragen	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
862	Eka budi prasetyo	Klaten	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
863	Siti chodarsih	Klaten	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
864	Sutarno	Batang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan



865	Sudargo	Brebes	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
866	Sujatmo	Brebes	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
867	Suliyah	Brebes	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
868	Ritta lestari	Brebes	Perempuan	RT 017/3	Guru
869	Pardiman	Klaten	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
870	Zaitun zuhri	Trenggalek	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
871	Nyai Supriyati	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
872	Diah Lusi	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
873	Seftian setiawan	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
874	Siti rosita rama	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
875	Isti barokah	Boyolali	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
876	Edi susanto	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
877	Saryad	Tegal	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
878	Iyep kosim	Garut	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
879	Andromeda	Garut	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
880	Eva oktaviani	Tegal	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
881	Kurniasih	Tegal	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
882	Andrie	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
883	Ai rohati	Garut	Perempuan	RT 017/3	Karyawan Swasta
884	Mardongan	Narabean	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
885	Shinta	Siltoluama	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
886	Nina T	Tasikmalaya	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
887	Taryono bin Mulud	Pemalang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
888	Andrian Pattinama	Tasikmalaya	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
889	Marcus	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
890	Agus supriyanto	Palembang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
891	Antonius	Tasikmalaya	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
892	Ricky saputra	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
893	Eddy	Ambon	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
894	Hana p	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
895	goas	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Dagang
896	Sofiyani Hadi	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
897	Ade Riyawan	Purworejo	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
898	Beta Septi	Magelang	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
899	Michael	Lagundi	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
900	Yanni	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
901	Tristania	Bogor	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
902	Dounald	Bangka	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
903	Dwi Putri	Medan	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
904	Hani Sianturi	Medan	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
905	Safri	Kendal	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
906	Yana rianti	Cirebon	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
907	Sigit setiawan	Tangerang	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
908	Nurlaela	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
909	Heri	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
910	Wuslimin	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan



911	Itjang halim	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
912	Bakti setia	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
913	Indriani sutedja	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
914	Elly sutedja	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
915	Yunita	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
916	Salimin	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
917	Darimun	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
918	Muhitun	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
919	Darya	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
920	Sonny lidjaya	Sukabumi	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
921	Sinarta lidjaya	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
922	Tjhai njoek mie	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
923	Soffia	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Karyawan Swasta
924	Nadia Rika	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
925	Sainah	Jakarta	Perempuan	RT 017/3	Serabutan
926	Sanin	Jakarta	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
927	Untung K	Tegal	Laki-laki	RT 017/3	Dagang
928	Didin Murod	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
929	Sarifuddin	Ciamis	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan
930	Asep Mariana	Sukabumi	Laki-laki	RT 017/3	Serabutan

Ketua Rukun Warga 03



Hasanudin



**Kunjungan Masyarakat ke PUSKESMAS
Kampung Pulo, Kampung Melayu
Periode 2015**

No.	Nama Penyakit	Kelompok Umur						Total
		0-5 thn	6-15 thn	16-45 thn	46-55 thn	> 56 thn		
1	ISPA	261	321	432	144	236	1394	
2	Diare	104	142	245	76	122	689	
3	Kulit	92	344	59	101	88	684	
4	Hipertensi	0	0	0	134	253	387	
5	Mata	26	65	93	78	303	565	
6	Telinga	12	96	45	32	76	261	
7	Gigi	0	23	34	76	105	238	
8	Cacar	21	56	97	42	32	248	
9	Leptospirosis	42	126	47	143	231	589	
	Jumlah	558	1173	1052	826	1446	5055	

Data diambil Penyakit yang muncul pasca banjir





**Luas Tanah yang terkena Dampak Relokasi
Kampung Pulo - Jatinegara**

Luas 25.218,4 M² dari Luas Keseluruhan 85.751 M³

Luas 266	M ²	: Hak Guna Bangunan (SHGB)
Luas 6	M ²	: Hak Milik (SHM)
Luas 255	M ²	: Akte Jual Beli Notaris (AJB)
Luas 4.051	M ²	: Surat Perjanjian Jual Beli
Luas 4.891	M ²	: Surat Perjanjian Kepemilikan
Luas 134	M ²	: Hibah
Luas 1.424	M ²	: Lain-lain
Luas 22	M ²	: Wasiat
Luas 14.169	M ²	: Tanpa Keterangan

**Tingkat Pendidikan
Warga Kampung Pulo RW 03
Jatinegara-Jakarta Timur**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak/Belum Sekolah	513	18,65%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	562	20,43%
3	Tamat SD/Sederajat	833	30,28%
4	SLTP/Sederajat	436	15,85%
5	SLTA/Sederajat	398	14,47%
6	Diploma I/II	7	0,25%
7	Strata I	2	0,07%
Jumlah		2751	100%

